

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**ANALISIS KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENGELOLAAN EKOWISATA BERBASIS MASYARAKAT
(STUDI KASUS DI DESA BAHOI, KECAMATAN LIKUPANG BARAT,
KABUPATEN MINAHASA UTARA)**



TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Manajemen

Disusun Oleh :

**WARINTOKO
NIM. 500003095**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2014**

ABSTRACT

Bahoi is a village located in Likupang Barat Sub District, North Minahasa Region, North Sulawesi Province, Indonesia. The village has a beauty of coral reef for ecotourism, however a community based ecotourism which has been established since 2010 still not yet optimized. The objectives of this research to analyze the existing condition of human resources, the ideal of human resources, and how to fulfill those ideal human resources needed for the community based ecotourism management in Bahoi. The research use qualitative approaches method and data collected by field observations, interviews, focus group discussions and literature studies. There are lacks of capacities almost on the overall management (organization, financial, marketing), home stay services, English conversation skills and diving certification on the ecotourism management unit. To improve the management effectiveness, it needs repositioning job description the head of unit management becomes a business manager, the secretary becomes a marketing staff and human relation staff, an the treasurer becomes a financial and administration staff. These key persons should manage three units of business: ecotourism unit (diving/mangrove/coastal), home stay services unit, and handicraft production unit. The personnel of ecotourism management should be fulfilled by local villagers as this ecotourism is a community based program. There are several needs of trainings and courses to improve the human resources capacities: leadership and business management, hospitality training/ home stay services, English conversation skill course, ecotourism guiding course, a dive master training course and a business development training for handicraft production and marketing. To avoid a social conflict between two community groups who manage ecotourism and the marine protected area in the village, it is recommended to create a holding organization which integrates both community activities on operational (cost/ revenues, a single point for internal and external relationship and communication). However, this should be continued by another research to find an ideal business model for a community based ecotourism management as case in Bahoi.

Keywords : *Ecotourism, Community Based, Bahoi, Diving, Guide, Home stay, Need Analysis, Human Resources*

ABSTRAK

Desa Bahoi di Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara adalah desa yang mempunyai potensi keindahan laut dan dikelola oleh kelompok ekowisata berbasis masyarakat namun hasilnya belum optimum. Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis kondisi SDM kelompok pengelola ekowisata di Desa Bahoi saat ini (*existing*), kondisi SDM yang ideal serta pemenuhan kebutuhan SDM pengelolaan ekowisata yang memerlukan peningkatan hasil. Penelitian menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan, wawancara, diskusi kelompok (FGD) dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas SDM kelompok pengelola ekowisata di Desa Bahoi masih terbatas, terutama kapasitas dalam pengelolaan manajemen bisnis (organisasi, keuangan, pemasaran), pelayanan *homestay*, produksi kerajinan, kualifikasi sertifikat *diving* pemandu selam, maupun kemampuan Bahasa Inggris para pemandu selam (*diving*). Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan ekowisata di Desa Bahoi perlu mereposisi fungsi ketua kelompok sebagai seorang manajer bisnis, sekretaris menjadi staf humas dan pemasaran serta bendahara menjadi staf administrasi dan keuangan. Tiga pengurus inti tersebut mengkoordinir 3 unit kegiatan ekowisata, yaitu unit wisata *diving*/ mangrove/ pasir putih, unit pengelolaan *homestay* dan unit usaha produksi kerajinan. Sebagai kegiatan yang berbasis masyarakat maka pemenuhan kebutuhan SDM menuju pengelolaan ekowisata yang lebih baik harus tetap memprioritaskan tenaga setempat. Untuk meningkatkan kapasitas SDM kelompok pengelola ekowisata diperlukan pelatihan-pelatihan: manajemen bisnis (organisasi, keuangan, pemasaran), pelatihan selam level *dive master*, pelatihan *guide*, kursus Bahasa Inggris, kursus manajemen perhotelan/ *homestay*, serta pelatihan produksi kerajinan lokal. Untuk menghindari konflik dan kecemburuan sosial antara kelompok ekowisata dan kelompok DPL di Desa Bahoi diperlukan pengelolaan terpadu di bawah satu organisasi (*holding*) yang mampu memayungi kegiatan operasional dua kelompok tersebut, baik operasional biaya, pendapatan maupun komunikasi dengan pihak luar. Untuk mengetahui model pengelolaan terpadu tersebut perlu dilakukan penelitian lanjutan sehingga ditemukan Model Bisnis Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Bahoi yang mampu memberi kesejahteraan masyarakat secara efektif.

Kata Kunci: Ekowisata, Berbasis Masyarakat, Desa Bahoi, *Homestay*, Pemandu wisata, *Diving*, Analisis Kebutuhan SDM

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia Pengelolaan Ekowisata Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Desa Bahoi Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara) adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta , 1 Desember 2014

Yang menyatakan



Warintoko

NIM : 500003095

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN**

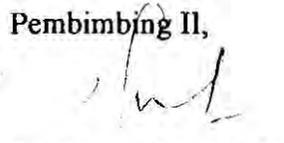
PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia Pengelolaan Ekowisata Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Desa Baho Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara)

Penyusun TAPM : Warintoko
NIM : 500003095
Program Studi : Magister Manajemen
Hari/ Tanggal : Sabtu/ 20 Desember 2014

Menyetujui:

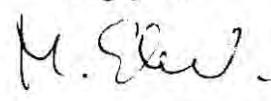
Pembimbing II,


Dr. Murnaria Manalu

Pembimbing I,

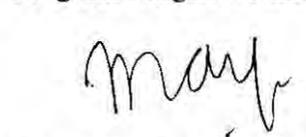

Dr. Wilfredus B. Elu, M.Si

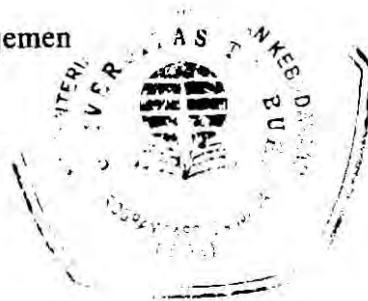
Penguji Ahli


Dr. Mahyus Ekananda Sitompul, MM., MSE

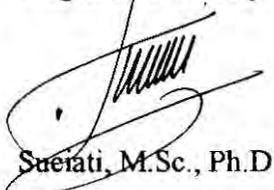
Mengetahui,

Ketua Bidang/ Ilmu
Program Magister Manajemen


Maya Maria, SE., MM



Direktur
Program Pasca Sarjana


Saerati, M.Sc., Ph.D

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN**

PENGESAHAN

Yang bertandatangan di bawah ini, Saya selaku Pembimbing TAPM dari Mahasiswa :

Nama : Warintoko

NIM : 500003095

Program Studi : Magister Manajemen

Judul TAPM : Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia Pengelolaan Ekowisata Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Desa Bahoi Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara)

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 13 Desember 2014

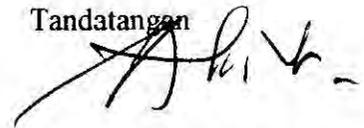
dan telah dinyatakan LULUS.

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji:

Ir. Adi Winata, M.Si

Tandatangan



Penguji Ahli:

Dr. Mahyus E. Sitompul, MM., MSE



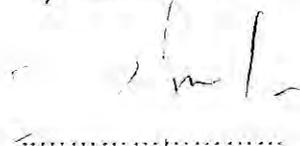
Pembimbing I:

Dr. Wilfredus B. Elu, M.Si



Pembimbing II:

Dr. Murnaria Manalu



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia Pengelolaan Ekowisata Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Desa Bahoi, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara) yang disusun untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Program Magister Manajemen Universitas Terbuka ini bisa diselesaikan.

Selama penelitian dilaksanakan penulis mendapat bantuan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, untuk itu diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Desa Bahoi, Pengurus dan Anggota Kelompok Ekowisata dan DPL Desa Bahoi, Para Fasilitator dari LSM pendamping (WCS, YAPEKA dan CELEBIO), Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara, Universitas Sam Ratulangi serta Sekolah Politeknik Negeri Manado yang telah memberikan data-data dan keterangan yang diperlukan pada penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Wilfredus B. Elu sebagai pembimbing I dan Ibu Dr. Murnaria Manalu sebagai pembimbing II yang telah memberikan saran dan bimbingannya hingga TAPM ini bisa diselesaikan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangannya, untuk itu segala saran dan masukan dari semua pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan tulisan ini sehingga bisa lebih bermanfaat.

Jakarta, 20 Desember 2014

Ttd
Penulis

RIWAYAT HIDUP

- Nama : Warintoko
NIM : 500003095
Program Studi : Magister Manajemen
Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta / 23 Januari 1968
- Riwayat Pendidikan : Lulus SD di SD Panembahan I Yogyakarta Tahun 1981
Lulus SMP di SMPN 2 Yogyakarta Tahun 1984
Lulus SMA di SMA Muh. I Yogyakarta Tahun 1987
Lulus S1 di Fakultas Kehutanan UGM Tahun 1992
- Riwayat Pekerjaan : Tahun 1992 s/d 1997 sebagai Staff R & D, Divisi Forestry di PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Riau.
Tahun 1997 s/d 2002 sebagai *Product Development Manager* di PT. Monfori Nusantara, a Monsanto Indonesia Subsidiary.
Tahun 2003 s/d 2006 sebagai Konsultan Proyek Kegiatan APBN di Kementerian Kehutanan RI.
Tahun 2007 s/d 2012 sebagai Ketua Tim Konsultan Manajemen Nasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Perdesaan, Kementerian Dalam Negeri: *Co-Financing Grant for Decentralized Management on Natural Resources and Renewable Energy*.
Tahun 2013 s/d saat ini sebagai *Deputy Team Leader Bantuan Teknis Asian Development Bank: Scaling up Renewable Energy Access in Eastern Indonesia*.

Jakarta, 6 Desember 2014

Warintoko
NIM: 500003095

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Lembar Pernyataan Bebas Plagiasi.....	iii
Lembar Persetujuan TAPM	iv
Lembar Pengesahan	v
Kata Pengantar	vi
Riwayat Hidup	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Bagan	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Foto	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	6
B. Penelitian Terdahulu	18
C. Kerangka Berpikir	24
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	26
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan	27
C. Instrumen Penelitian	28
D. Prosedur Pengumpulan Data	29
E. Metode Analisis Data.....	31

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian.....	34
B. Hasil Penelitian	43
C. Pembahasan	65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA	96
-----------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pertanyaan Penelitian	99
Lampiran 2. Panduan Wawancara dan FGD	102
Lampiran 3. Salinan Wawancara	105
Lampiran 4. Salinan FGD	120
Lampiran 5. Daftar Informan dan Narasumber	129

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1 Pengelolaam Ekowisata Berkelanjutan	22
Bagan 2.2 Kerangka Berpikir.....	25
Bagan 3.1 Tahapan Pengumpulan dan Analisis data.....	33
Bagan 4.1 Perkembangan Pengelolaan Ekowisata di Desa Bahoi.....	43
Bagan 4.2 Struktur Organisasi <i>Existing</i> Pengelola Ekowisata di Desa Bahoi.....	67
Bagan 4.3 Skema Sinergitas Aspek Pengelolaan Ekowisata Berkelanjutan.....	77
Bagan 4.4 Struktur Organisasi Ideal Pengelola Ekowisata di Desa Bahoi	84
Bagan 4.5 Model Pengelolaan Terpadu Ekowisata dan DPL di Desa Bahoi	85

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.1 Sumber Informasi dan Informan	28
Tabel 3.2 Tahapan Pengumpulan dan Analisis Data	32
Tabel 4.1 Penggunaan Lahan di Desa Bahoi	35
Tabel 4.2 Susunan Pengurus Kelompok Pengelola Ekowisata di Desa Bahoi	47
Tabel 4.3 Kondisi <i>existing</i> SDM Pengelola Ekowisata di Desa Bahoi.....	78
Tabel 4.4 Komposisi Ideal SDM Pengelola Ekowisata di Desa Bahoi.....	83
Tabel 4.5 Standar Pelatihan <i>Diving</i> di Politeknik Negeri Manado.....	87
Tabel 4.6 Strategi Peningkatan kapasitas SDM Pengelola Ekowisata.....	89
Tabel 4.7 Strategi Implementasi Pemenuhan Kebutuhan SDM	90

DAFTAR FOTO

	Halaman
Foto 4.1 Kondisi Umum Desa Bahoi	36
Foto 4.2 Pondok Kerja dan Peralatan Selam di Desa Bahoi.....	39
Foto 4.3 Perahu Motor Hibah untuk Ekowisata di Desa Bahoi.....	39
Foto 4.4 Keindahan Terumbu Karang di Kawasan DPL Desa Bahoi	40
Foto 4.5 Salah satu <i>Homestay</i> di Desa Bahoi.....	41
Foto 4.6. Contoh Produk Kerajinan di Desa Bahoi	41
Foto 4.7 Kawasan Ekowisata Pasir Putih dan Hutan Mangrove di Desa Bahoi	42
Foto 4.8 Dermaga dan Rumah Apung di Kawasan DPL Desa Bahoi.....	42
Foto 4.9 Suasana FGD di Kantor WCS Manado.....	56
Foto 4.10 Suasana FGD di Kantor Desa Bahoi.....	58
Foto 4.11 Wawancara dengan Kepala Desa Bahoi.	69
Foto 4.12 Wawancara dengan Pemilik <i>Homestay</i> di Desa Bahoi.	72
Foto 4.13 Catatan Wisatawan pada Buku Tamu di <i>Homestay</i> di Desa Bahoi.....	73
Foto 4.14 Salah Satu Lokasi <i>Spot Diving</i> Ekowisata di Desa Bahoi	75

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Salah satu potensi sumber daya alam Indonesia yang melimpah dan sangat penting adalah sumber daya alam laut. Sumber daya alam laut Indonesia berperan besar dalam menyumbang perekonomian nasional, baik untuk sektor perikanan maupun sektor pariwisata.

Sektor pariwisata Indonesia memberikan kontribusi yang terus meningkat dari tahun ke tahun, yaitu dari 10% pada tahun 2005 menjadi 17% dari total ekspor barang dan jasa pada tahun 2012. Sektor pariwisata menempati peringkat ke-4 sebagai penyumbang devisa terbesar, yaitu sebesar 10 milyar dolar Amerika setiap tahun. Sementara itu kontribusi secara langsung sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 3,8% dan apabila diperhitungkan efek penggandaannya kontribusi pariwisata pada PDB Indonesia mencapai 9%. Penyerapan tenaga kerja di sektor ini mencapai 10,18 juta orang atau 8,9% dari total jumlah pekerja, sehingga pariwisata merupakan sektor pencipta tenaga kerja terbesar ke-4 di Indonesia (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2014).

Dilihat dari sejumlah indikator yang ada, peluang Indonesia untuk lebih meningkatkan peran sektor pariwisata dalam perekonomian nasional terbuka lebar. Daya saing sektor pariwisata Indonesia terus mengalami peningkatan seperti disebutkan oleh *World Economic Forum*, bahwa daya saing pariwisata Indonesia meningkat dari peringkat ke-74 dari 140 negara pada tahun 2010

menjadi peringkat ke-70 dari 140 negara pada tahun 2012. Sedangkan untuk dalam kawasan ASEAN daya saing pariwisata Indonesia berada pada peringkat ke-4, setelah Singapura, Malaysia dan Thailand.

Salah satu sub sektor pariwisata yang terus berkembang di Indonesia saat ini adalah wisata minat khusus ekologi atau dikenal dengan sebutan ekowisata. Untuk meningkatkan daya saing di sub sektor pariwisata ini diperlukan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas. Dalam pengembangan ekowisata yang berkelanjutan maka peran strategis pemerintah adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dengan mendorong peran serta masyarakat untuk mengembangkan visi dan pengelolaan industri pariwisata sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat dan berkembang secara berkelanjutan (Azam dan Sarker, 2011: 12). Namun demikian untuk mengembangkan industri pariwisata yang baik dan berkualitas dengan melibatkan masyarakat tidaklah mudah. Hasil evaluasi proyek pesisir di Sulawesi Utara menyebutkan bahwa tantangan utama dalam pengembangan industri wisata bahari di Kabupaten Minahasa adalah masih kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM) para pelaku industri jasa pariwisata dan masih minimnya program kemitraan dengan masyarakat setempat dalam pengelolaan wisata bahari (Pangemanan dkk, 2002: 8).

Salah satu lokasi yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan ekowisata bahari adalah Desa Bahoi di Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Desa Bahoi adalah lokasi sasaran bagi model program desentralisasi dan penguatan pengelolaan sumber daya alam pesisir yang berbasis desa yang melibatkan kelompok masyarakat.

Desa ini mendapatkan bantuan Program Kegiatan Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut (DPL) dan Ekowisata Bahari melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM LMP) dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2009-2012. Selama mendapatkan program tersebut masyarakat desa mendapat pendampingan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang konservasi lingkungan, yaitu *Wildlife Conservation Society* (WCS), Yayasan Pendidikan Konservasi Alam (YAPEKA) dan *Celebes Biodiversity* (CELEBIO).

Program bantuan yang diberikan berupa pembentukan dan pengelolaan kawasan Daerah Perlindungan Laut (DPL) dan Ekowisata berbasis masyarakat. Selain bantuan yang berupa bangunan fisik dan peralatan pendukung untuk kegiatan pengelolaan DPL dan Ekowisata seperti batas-batas fisik DPL, pondok kerja, unit perahu, peralatan selam dan *snorkling*, kelompok masyarakat juga diberikan bantuan pendampingan untuk pembentukan dan penguatan kelembagaan/ kelompok serta pelatihan teknis konservasi laut/ terumbu karang maupun pelatihan wisata penyelaman (*diving*) untuk pemandu wisata (*guide*) kelompok ekowisata.

Bantuan awal program PNPM LMP tersebut di atas kemudian ditindaklanjuti dengan bantuan-bantuan fisik pendukung lainnya oleh beberapa Instansi Pemerintah di tingkat Kabupaten, antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara. Bantuan lanjutan dari tiga Instansi Pemerintah Kabupaten tersebut berupa sarana fisik infrastruktur pendukung DPL dan ekowisata, seperti unit perahu

motor, rumah apung, pondok wisata/ *gazebo*, dermaga, jembatan, serta pembukaan akses jalan dan pengerasan jalan desa.

Dari berbagai bantuan program yang diberikan oleh beberapa Instansi Pemerintah dan pendampingan dari tiga LSM tersebut di atas sebagian besar bentuk bantuan adalah bantuan fisik/ infrastruktur. Sedangkan bantuan non fisik, misalnya yang berupa pelatihan substansinya lebih banyak pada teknis pengelolaan konservasi ekosistem laut dan terumbu karang, sehingga hanya sebagian kecil saja program pelatihan yang memperkuat kapasitas SDM pengelolaan ekowisata secara langsung. Hal ini mengakibatkan pengelolaan ekowisata bahari di Desa Bahoi tersebut hingga saat ini belum optimum meskipun potensi alam keindahan lautnya sangat besar.

B. Rumusan Masalah

Pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat di Desa Bahoi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2010 belum dirasakan manfaatnya secara optimum oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan selama ini penguatan kapasitas SDM pengelola ekowisata lebih banyak dilakukan untuk mendukung kegiatan konservasi dan perlindungan ekosistem terumbu karang, lamun dan mangrove. Sedangkan penguatan kapasitas SDM pengelola ekowisata dalam hal manajemen bisnis masih sangat kurang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi struktur, komposisi dan kapasitas SDM saat ini (*existing*) kelompok pengelola ekowisata di Desa Bahoi?;
2. Bagaimana struktur, komposisi dan kapasitas SDM yang ideal?;

3. Bagaimana strategi implementasi pemenuhan kebutuhan SDM yang ideal bagi kelompok pengelola ekowisata di Desa Bahoi agar lebih efektif dan mampu memberikan dampak ekonomi yang positif bagi kesejahteraan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kondisi struktur, komposisi dan kapasitas SDM saat ini (*existing*) kelompok pengelola ekowisata di Desa Bahoi;
2. Untuk mengetahui struktur, komposisi dan kapasitas SDM yang ideal bagi pengelolaan ekowisata di Desa Bahoi, dan;
3. Untuk menganalisis strategi implementasi pemenuhan kebutuhan SDM yang ideal bagi kelompok pengelola ekowisata di Desa Bahoi agar lebih efektif dan mampu memberikan dampak ekonomi yang positif bagi kesejahteraan masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk dunia pendidikan dan penelitian hasil penelitian ini berguna sebagai bahan sumber informasi atau rujukan khususnya dalam hal analisis kebutuhan SDM pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat.
2. Untuk para Praktisi, LSM, dan Instansi Pemerintah penelitian ini berguna sebagai sumber referensi terutama terkait dengan perencanaan, operasionalisasi dan pengembangan kelembagaan pengelolaan ekowisata yang berbasis desa dan kelompok masyarakat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Ekowisata

Pariwisata adalah industri yang terus mengalami perkembangan pesat. Menurut laporan dari *World Travel and Tourism Council* pariwisata memberikan kontribusi lebih dari 11% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) di dunia dan terus mengalami pertumbuhan minimal 5% setiap tahun (Brandon, 1996:3). Selanjutnya disebutkan bahwa salah satu jenis pariwisata yang terus mengalami pertumbuhan yang pesat adalah wisata minat khusus pada keindahan alam dan ekologi, atau dikenal dengan sebutan ekowisata (*ecotourism*) dengan pertumbuhannya berkisar 10% - 15% setiap tahun sejak tahun 1990.

Definisi ekowisata pertama kali dipopulerkan pada tahun 1991 oleh *The International Ecotourism Society* (sebagaimana dikutip oleh Brandon, 1996: 1): “Ekowisata adalah kegiatan wisata alam yang bertanggung jawab dengan menjaga keaslian dan kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat”. Selanjutnya Ceballos-Lascurain (1992: 31) berpendapat bahwa ekowisata adalah perjalanan ketempat-tempat yang masih alami dan relatif belum terganggu atau tercemari dengan tujuan untuk mempelajari, mengagumi dan menikmati pemandangan, flora dan fauna, serta bentuk-bentuk manifestasi budaya masyarakat yang ada, baik dari masa lampau maupun masa kini

Sementara pengertian ekowisata menurut WWF (sebagaimana dikutip dalam Salim, 2013: 3) adalah perjalanan oleh seorang pelancong/ turis ke suatu daerah terpencil dengan tujuan untuk menikmati dan mempelajari alam, sejarah

dan budaya di suatu daerah, di mana pola wisatanya membantu ekonomi masyarakat setempat dan mendukung pelestarian alam. Selanjutnya Salim (2013: 4) menyatakan bahwa ekowisata adalah wisata alam berdampak ringan yang menyebabkan terpeliharanya spesies dan habitatnya secara langsung dengan peranannya dalam pelestarian dan atau secara tidak langsung dengan memberikan pandangan kepada masyarakat setempat, untuk membuat masyarakat setempat mendapatkan suatu nilai, dan melindungi wisata alam dan kehidupan lainnya sebagai sumber pendapatan.

Selanjutnya disebutkan Salim (2013: 8) bahwa dalam pengembangan ekowisata harus memenuhi 8 prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Mencegah dan menanggulangi dampak dari aktivitas wisatawan terhadap bentang alam dan budaya masyarakat setempat;
- 2) Mendidik atau menyadarkan wisatawan dan masyarakat setempat akan pentingnya konservasi;
- 3) Mengatur agar kawasan yang digunakan untuk ekowisata dan manajemen pengelola kawasan pelestarian dapat menerima langsung penghasilan atau pendapatan;
- 4) Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pengembangan ekowisata;
- 5) Keuntungan ekonomi yang diperoleh secara nyata harus dapat mendorong masyarakat untuk menjaga dan melestarikan kawasan pesisir dan laut;
- 6) Semua upaya pengembangan, termasuk pengembangan fasilitas dan utilitas, harus tetap menjaga keharmonisan dengan alam;

- 7) Pembatasan pemenuhan permintaan, karena umumnya daya dukung ekosistem secara alamiah lebih rendah daripada daya dukung ekosistem buatan, dan;
- 8) Apabila suatu kawasan pelestarian dikembangkan untuk kegiatan ekowisata, maka devisa dan belanja wisatawan dialokasikan secara proporsional dan adil untuk pemerintah pusat dan daerah.

Salah satu sektor ekowisata minat khusus yang memiliki potensi untuk berkembang di Indonesia adalah ekowisata laut atau ekowisata bahari. Menurut Sukoraharjo (sebagaimana dikutip dalam Latifah, 2014:11) menyatakan ekowisata bahari adalah ekowisata yang berbasis pada pematangan dan keunikan alam laut dan pantai, karakteristik ekosistemnya, kekhasan seni budaya dan karakteristik masyarakat setempat. Selanjutnya disebutkan bahwa kegiatan ekowisata bahari antara lain adalah berperahu, berenang, *snorkling*, menyelam (*diving*), memancing, kegiatan olahraga pantai dan piknik dengan menikmati atmosfer laut.

Kawasan yang dijadikan tempat tujuan ekowisata bahari biasanya merupakan suatu kawasan laut yang dilindungi, disebut dengan kawasan Daerah Perlindungan Laut atau disingkat dengan DPL. Kawasan DPL adalah kawasan pesisir dan laut yang dapat meliputi terumbu karang, hutan mangrove, lamun dan habitat lainnya secara sendiri atau bersama-sama yang dipilih dan ditetapkan untuk ditutup secara permanen dari kegiatan perikanan dan pengambilan biota laut, dan pengelolaannya yang dilakukan secara bersama antara pemerintah, masyarakat dan pihak lain, dalam merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pengelolaannya (Tulungen dkk, 2000).

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (2006) tujuan pembentukan kawasan DPL antara lain adalah :

- 1) Meningkatkan dan mempertahankan produksi perikanan di sekitar daerah yang dilindungi;
- 2) Menjaga dan memperbaiki keanekaragaman hayati terumbu karang, ikan, dan biota lainnya;
- 3) Dapat dikembangkan menjadi tempat tujuan wisata;
- 4) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pengguna;
- 5) Memperkuat masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang;
- 6) Mendidik masyarakat dalam konservasi dan pemanfaatan sumberdaya berkelanjutan, dan;
- 7) Sebagai lokasi penelitian dan pendidikan tentang keanekaragaman hayati laut.

Selanjutnya diuraikan bahwa kawasan DPL yang berbasis masyarakat harus mempunyai perencanaan zonasi yang ditetapkan secara sederhana, artinya mudah dipahami dan dilaksanakan, serta dipatuhi oleh masyarakat. Zona yang umum dipunyai oleh suatu kawasan DPL adalah Zona Inti dan Zona Penyangga, sedang di luarnya adalah Zona Pemanfaatan. Zona Inti adalah suatu areal yang di dalamnya kegiatan penangkapan ikan dan aktivitas pengambilan sumberdaya alam laut lainnya sama sekali tidak diperbolehkan. Begitu pula kegiatan yang merusak terumbu karang, seperti pengambilan karang, pelepasan jangkar serta penggunaan galah untuk mendorong perahu juga tidak diperbolehkan. Sedang kegiatan yang tidak ekstraktif, seperti berenang, *snorkling* dan menyelam untuk tujuan rekreasi masih diperbolehkan. Namun demikian perlu kesepakatan dengan masyarakat

perihal kegiatan apa saja yang boleh dilakukan di zona inti, sehingga fungsi zona tersebut tetap optimal.

2. Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Untuk mengelola ekowisata yang berkelanjutan diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan memiliki visi perencanaan strategik SDM. Menurut Noe *et al* (sebagaimana dikutip dalam Iswanto, 2011: 1.50) seorang eksekutif SDM yang profesional adalah SDM yang mempunyai 4 kompetensi dasar untuk dapat menjadi mitra bagi perencanaan strategik SDM, yaitu:

- 1) Kompetensi bisnis, artinya SDM harus menguasai bisnis perusahaan dan memahami finansial dan ekonomi perusahaan;
- 2) Kompetensi teknis dalam aspek SDM, antara lain rekrutmen dan seleksi, pelatihan, pengembangan, desain organisasi, penilaian kinerja dan program penghargaan;
- 3) Kompetensi manajemen perubahan, seperti mendiagnosis masalah, melaksanakan perubahan organisasional, mengevaluasi hasil, mengelola konflik dan membawa keberhasilan perubahan, dan;
- 4) Kompetensi integrasi, yaitu memiliki kemampuan mengintegrasikan ketiga kompetensi terdahulu untuk meningkatkan perusahaan.

Sementara menurut Greer (sebagaimana dikutip dalam Iswanto, 2011: 2.7) persyaratan personal yang akan melaksanakan fungsi *strategic* SDM harus memiliki 5 keahlian, yaitu :

- 1) Manajemen informasi, seperti riset, analisis dan statistik;
- 2) Manajemen perencanaan;
- 3) Manajemen bisnis dan lingkungan;

- 4) Kemampuan integrasi, dan;
- 5) Manajemen perubahan.

Untuk mengetahui jumlah dan jenis SDM yang akan digunakan dalam menjalankan suatu organisasi bisnis diperlukan Analisis Perencanaan SDM. Ivancevich (sebagaimana dikutip dalam Iswanto, 2011:2.19) menyatakan bahwa perencanaan SDM adalah proses yang digunakan oleh suatu organisasi untuk menentukan jumlah dan jenis karyawan yang direkrut ke dalam suatu organisasi atau dihapus dari organisasi.

Selanjutnya disebutkan bahwa secara umum perencanaan SDM dilaksanakan melalui 4 tahap, yaitu:

- 1) Analisis situasi, yaitu menganalisis kondisi lingkungan dan fungsi manajemen untuk mengantisipasi adaptasi terhadap perubahan, misalnya kecepatan teknologi, dsb;
- 2) Meramalkan kebutuhan SDM, memperkirakan jumlah dan jenis karyawan yang dibutuhkan di masa mendatang oleh organisasi. Teknik yang digunakan salah satunya adalah dengan teknik estimasi ahli, yaitu pendekatan sederhana untuk menentukan kebutuhan SDM didasarkan pada pengalaman, intuisi dan perkiraan para ahli;
- 3) Analisis pasokan SDM, untuk menjawab kebutuhan berapa banyak karyawan dan seperti apa karyawan yang harus dimiliki organisasi saat ini dalam kaitannya dengan kebutuhan akan keahlian dan pelatihan di masa mendatang. Biasanya menggunakan alat inventarisasi keahlian, dan;

- 4) Mengembangkan rencana tindakan, yaitu menentukan tindakan yang harus diambil setelah menganalisis dan membandingkan kondisi pasokan maupun kebutuhan SDM di masa mendatang.

Selain melaksanakan perencanaan SDM, hal penting yang menyangkut analisis kebutuhan SDM adalah Analisis Jabatan. Menurut Ivancevich (sebagaimana dikutip dalam Iswanto, 2011: 2.37) analisis jabatan adalah proses pengumpulan, penganalisisan, dan pensitesaan informasi mengenai jabatan. Selanjutnya disebutkan bahwa analisis jabatan akan menghasilkan informasi mengenai tuntutan suatu jabatan yang selanjutnya digunakan untuk mengembangkan deskripsi jabatan (*job description*).

Metode pengumpulan data untuk keperluan analisis jabatan ada 4, yaitu wawancara, observasi, kuisisioner dan catatan/ buku harian pemegang jabatan (Iswanto, 2011: 2.46). Selanjutnya disebutkan bahwa teknik wawancara lebih cocok untuk deskripsi jabatan, sedangkan kuisisioner lebih cocok untuk menilai jabatan untuk tujuan kompensasi. Sedangkan teknik observasi adalah metode analisis jabatan yang paling sederhana dan langsung bermanfaat terutama untuk jabatan yang aktivitas fisiknya dapat dilihat, seperti perakit, dan akunting. Sedangkan teknik catatan buku harian pemegang jabatan hanya bermanfaat untuk menganalisis jabatan yang sulit diobservasi, seperti ilmuwan, insinyur, dan eksekutif senior.

3. Strategi Implementasi Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Analisis kebutuhan SDM menghasilkan informasi mengenai deskripsi komposisi SDM yang dibutuhkan pada suatu organisasi, meliputi jabatan (*job*

description), dan spesifikasi jabatan (Iswanto, 2011: 3.1). Analisis kebutuhan SDM akan menghasilkan informasi jumlah dan kualitas SDM yang dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi (Mangkuprawira, 2011:81). Selanjutnya disebutkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan SDM suatu organisasi berdasarkan analisis kebutuhan SDM adalah dengan melakukan perekrutan karyawan. Menurut Noe et (sebagaimana dikutip dalam Iswanto, 2011: 3.4) perekrutan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan, memilih, mendapatkan, dan menempatkan orang yang diperlukan untuk memenuhi rencana organisasi. Sedangkan Menurut Rue (sebagaimana dikutip dalam Iswanto, 2011: 2.10) salah satu cara perekrutan dan seleksi untuk mengisi jabatan pada suatu organisasi adalah dengan menggunakan SDM yang sudah ada (*internal*), namun diperlukan pengembangan kemampuan atau peningkatan kapasitas bagi orang tersebut agar mendekati kriteria dan kualifikasi yang telah dipersyaratkan.

Salah satu strategi untuk meningkatkan kapasitas SDM agar memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan perencanaan SDM adalah dengan Program Pelatihan dan Pengembangan Karyawan. Menurut Dessler (2004:216) pelatihan (*training*) merupakan proses pembelajaran karyawan baru tentang keahlian dasar yang diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Pelatihan merupakan proses yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja karyawan.

Menurut Simamora (2006) mengacu kepada pasal 1 ayat 9 undang-undang No.13 Tahun 2003, pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian

tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Sementara, pengembangan (*development*) diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga atau instansi pendidikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelatihan lebih terarah pada peningkatan kemampuan dan keahlian SDM organisasi yang berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan saat ini. Sasaran yang ingin dicapai dan suatu program pelatihan adalah peningkatan kinerja individu dalam jabatan atau fungsi saat ini. Sedangkan Pengembangan cenderung lebih bersifat formal, menyangkut antisipasi kemampuan dan keahlian individu yang harus dipersiapkan bagi kepentingan jabatan yang akan datang. Sasaran dan program pengembangan menyangkut aspek yang lebih luas yaitu peningkatan kemampuan individu untuk mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi tanpa direncanakan.

Menurut Ivancevich (sebagaimana dikutip Iswanto, 2011: 4.12) ada empat tipe atau jenis-jenis pelatihan yang dapat diselenggarakan, yaitu pelatihan magang (*apprenticeship*), pelatihan simulasi (*vestibule*), pelatihan di tempat kerja (*on the job training*), dan pelatihan di luar tempat kerja (*off the job training*). Untuk memilih program pelatihan yang tepat diperlukan analisis kebutuhan pelatihan.

Menurut (Dessler: 2004:217) program pelatihan terdiri dari lima langkah, yaitu:

- 1) Langkah analisis kebutuhan, yaitu mengetahui ketrampilan kerja spesifik yang dibutuhkan, menganalisa keterampilan dan kebutuhan

calon yang akan dilatih, dan mengembangkan pengetahuan khusus yang terukur serta tujuan prestasi;

- 2) Merancang instruksi, untuk memutuskan, menyusun, dan menghasilkan isi program pelatihan, termasuk buku kerja, latihan dan aktivitas;
- 3) Langkah validasi, yaitu program pelatihan dengan menyajikan kepada beberapa orang yang bisa mewakili;
- 4) Menerapkan program itu, yaitu melatih karyawan yang ditargetkan, dan;
- 5) Langkah evaluasi dan tindak lanjut, dimana manajemen menilai keberhasilan atau kegagalan program ini.

Tujuan diselenggarakan pelatihan dan pengembangan kerja menurut Simamora (2006: 276) adalah untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan. Adapun tujuan secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

- 1) Memperbaiki kinerja karyawan-karyawannya yang bekerja secara tidak memuaskan karena kekurangan keterampilan merupakan calon utama pelatihan, kendatipun tidak dapat memecahkan semua masalah kinerja yang efektif, program pelatihan dan pengembangan yang sehat sering bermanfaat dalam meminimalkan masalah ini;
- 2) Memuktahirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi. Melalui pelatihan, pelatih memastikan bahwa karyawan dapat megaplikasikan teknologi baru secara efektif. Perubahan teknologi pada gilirannya, berarti bahwa pekerjaan senantiasa berubah

- dan keahlian serta kemampuan karyawan haruslah dimuktahirkan melalui pelatihan, sehingga kemajuan teknologi dapat diintegrasikan dalam organisasi secara sukses;
- 3) Mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten dalam pekerjaan. Seorang karyawan baru acap kali tidak menguasai keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan untuk bekerja sesuai dengan *output* dan standar mutu yang diharapkan;
 - 4) Membantu memecahkan masalah operasional. Para manajer harus mencapai tujuan mereka dengan kelangkaan dan kelimpahan sumber daya: kelangkaan sumberdaya finansial dan sumberdaya teknologi manusia, dan kelimpahan masalah keuangan, manusia dan teknologi;
 - 5) Mempersiapkan karyawan untuk promosi satu cara untuk menarik, menahan, dan memotivasi karyawan adalah melalui program pengembangan karir yang sistematis. Pengembangan kemampuan promosional karyawan konsisten dengan kebijakan sumber daya manusia untuk promosi dari dalam dan pelatihan adalah unsur kunci dalam sistem pengembangan karir. Dengan secara berkesinambungan mengembangkan dan mempromosikan sumber daya manusianya melalui pelatihan, manajer dapat menikmati karyawan yang berbobot, termotivasi dan memuaskan;
 - 6) Mengorientasikan karyawan terhadap organisasi, karena alasan inilah, beberapa penyelenggara orientasi melakukan upaya bersama dengan tujuan mengorientasikan para karyawan baru terhadap organisasi dan bekerja secara benar, dan;

- 7) Memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi. Misalnya sebagian besar manajer adalah berorientasi pencapaian dan membutuhkan tantangan baru di pekerjaannya. Pelatihan dan pengembangan dapat memainkan peran ganda dengan menyediakan aktivitas-aktivitas yang menghasilkan efektifitas organisasional yang lebih besar dan meningkatkan pertumbuhan pribadi bagi semua karyawan.

Pelatihan mempunyai andil besar dalam menentukan efektivitas dan efisiensi organisasi. Beberapa manfaat nyata yang ditanggung dari program pelatihan dan pengembangan (Simamora, 2006:278) adalah:

- 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas;
- 2) Mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kinerja yang dapat diterima;
- 3) Membentuk, sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan;
- 4) Memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia;
- 5) Mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja, dan;
- 6) Membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi .

Manfaat di atas membantu baik individu maupun organisasi. Program pelatihan yang efektif merupakan bantuan yang berharga dalam perencanaan karir dan sering dianggap sebagai penyembuh penyakit organisasional. Apabila produktivitas tenaga kerja menurun banyak manajer berfikir bahwa solusinya adalah pelatihan. Program pelatihan tidak mampu mengatasi semua masalah organisasional, namun berpotensi untuk memperbaiki situasi tertentu apabila program dijalankan secara benar.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian pernah dilakukan oleh peneliti lain yang terkait dengan topik penelitian ini baik perihal pengelolaan ekowisata maupun kebutuhan SDM bagi pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat. Hasil penelitian Sastria (2009) tentang Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal Dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Malang menyebutkan bahwa pengembangan ekowisata di wilayah Pulau Sempu harus diselaraskan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat, serta tidak boleh berbenturan dengan upaya konservasi yang telah dilakukan pemerintah daerah di wilayah ini. Selanjutnya disebutkan bahwa pengembangan ekowisata di Pulau Sempu semaksimal mungkin harus dapat melibatkan masyarakat dan Pemerintah Daerah secara optimal dalam setiap proses-proses di dalamnya, hal ini dilakukan guna memberikan ruang yang luas bagi masyarakat setempat untuk menikmati keuntungan secara ekonomi dari pengembangan ekowisata di wilayah ini.

Penelitian Aryunda (2011) tentang Dampak Ekonomi Pariwisata di Kepulauan Seribu menyebutkan bahwa secara umum ekowisata yang terjadi di Kepulauan Seribu menyebabkan dampak ekonomi yang positif bagi pengembangannya. Masyarakat mengindikasikan terjadinya peningkatan dari segi pendapatan dan/ atau usaha yang berkaitan dengan kegiatan ekowisata di Kepulauan Seribu. Selain itu kegiatan ekowisata menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup besar bagi masyarakat setempat maupun masyarakat di luar wilayah Kepulauan Seribu. Peningkatan pendapatan juga terjadi pada penerimaan daerah, terutama dari sektor perdagangan, hotel dan restoran. Namun demikian perlu

adanya pembedaan terhadap obyek ekowisata dan pelatihan terhadap masyarakat setempat mengenai ekowisata yang berlangsung di daerahnya untuk meningkatkan minat dan daya tarik wisatawan untuk meningkatkan ekonomi lokal wilayah Kepulauan Seribu.

Menurut Nandi (2008) dalam penelitiannya tentang Pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk mengembangkan dan mengelola destinasi pariwisata yang sukses maka diperlukan SDM yang profesional dan berkualitas, sehingga seluruh SDM yang terlibat baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal perihal manajemen pariwisata.

Selanjutnya penelitian Mudayen dan Lantum (2008) tentang *Needs Assessment* Pelatihan Pengembangan SDM Pendukung Pariwisata di Kabupaten Bantul menyebutkan bahwa Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) sangat membutuhkan Pelatihan Kepariwisataan, Pelatihan Bahasa Asing, Pelatihan Sadar Budaya Wisata, Pelatihan Pengolahan Hasil Laut, Pelatihan Praktik Perkoperasian, dan Pelatihan Pengembangan Potensi Kewirausahaan. Pemenuhan kebutuhan akan pelatihan dan pendidikan tersebut dapat dipenuhi oleh lembaga pendidikan atau balai diklat yang ada di sekitar lokasi, antara lain Pusat Pengembangan dan Pelatihan Pariwisata (P3PAR) dan Pusat Pengembangan dan Pelatihan Kewirausahaan (P3Kwu), Universitas Sanata Dharma serta didukung oleh peran Pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Program pelatihan dan kurikulum pengembangan sumber daya manusia pendukung pariwisata harus disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat POKDARWIS di Kabupaten Bantul.

Sementara itu penelitian Kumar dan Ramaswamy (2010) dengan judul *Tourism and Environment: Pave the Way for Sustainable Eco-Tourism* menegaskan bahwa pengelolaan ekowisata mampu memberikan kontribusi positif bagi konservasi keanekaragaman hayati (*biodiversity*); memberikan pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat sekaligus melibatkan tanggungjawab mereka bersama dengan pengunjung dalam mengelola industri ekowisata; mempromosikan usaha pariwisata skala kecil dan menengah; mengurangi konsumsi akan sumber daya alam, memperkuat kelembagaan lokal dan peluang bisnis lokal terutama masyarakat di perdesaan sekaligus memberikan pembelajaran dan pengalaman bagi masyarakat setempat.

Sedangkan penelitian Mirsanjari (2012) yang berjudul *Study of Strategic Eco-Tourism Potential Based on Sustainable Development and Management* menyebutkan bahwa dalam mendesain ekowisata perlu mempertimbangkan secara sekaligus aspek sosial kemanusiaan dan alam. Artinya apabila akan mengembangkan fasilitas sarana ekowisata seperti ruang terbuka hijau, jalan atau *jogging track*, kolam air, *camping ground*, restoran dan penginapan serta fasilitas lain maka harus disesuaikan dengan kapasitas daya dukung alam yang ada di tempat tersebut.

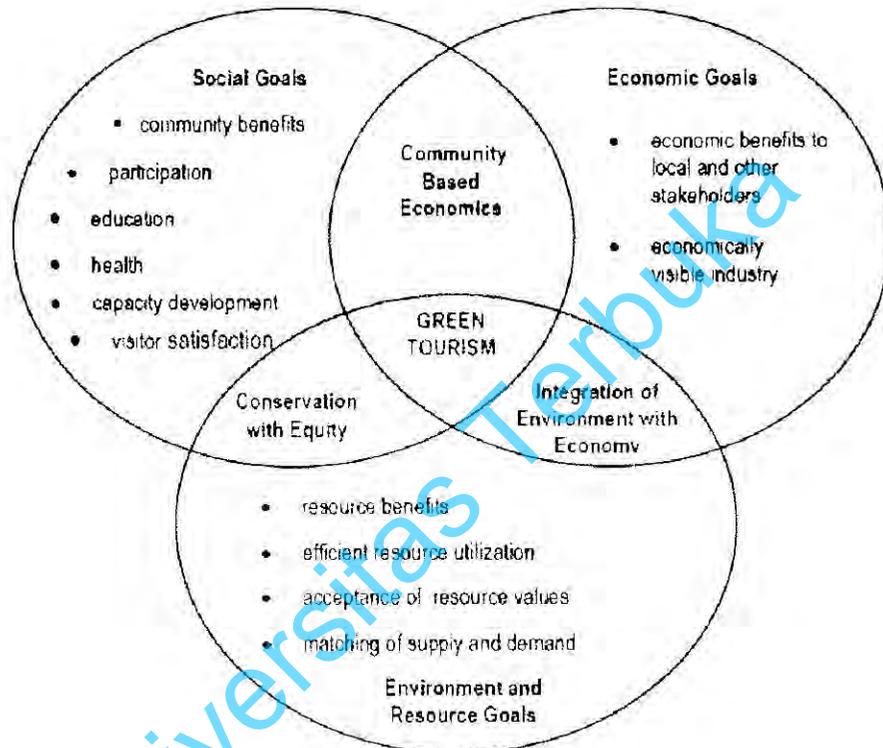
Penelitian Ardahaey (2009) menegaskan bahwa ada tendensi yang kuat pada organisasi saat ini di seluruh dunia untuk memperkuat SDM dalam industri pariwisata guna meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem pengelolaannya. Dalam hal peningkatan SDM ini semua personil diharuskan mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang cukup, baik pendidikan jangka panjang yang sifatnya formal, jangka pendek dalam bentuk kursus dan pelatihan *on the job training*.

Selanjutnya Crawford dkk (2006) dalam penelitian tentang pengelolaan kawasan Daerah Perlindungan Laut (DPL) berbasis masyarakat di Sulawesi Utara memberikan rekomendasi antara lain perlunya melaksanakan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi masyarakat secara terus-menerus guna meningkatkan kapasitas SDM kelompok masyarakat dan modal sosial, memastikan partisipasi masyarakat dalam forum pertemuan-pertemuan untuk mendiskusikan permasalahan di antara mereka. Proses tersebut sebaiknya didampingi oleh fasilitator pemberdayaan masyarakat (*community organizer*) yang mengenal budaya dan adat setempat.

Penelitian Kinard dan O'Brien (1996) yang berjudul *Ecotourism in The Tangkoko Dua Saudara Nature Reserve: Opening Pandora Box* menyimpulkan bahwa keterbatasan manajemen organisasi dalam pengelolaan ekowisata Cagar Alam Tangkoko di Sulawesi Utara telah berdampak negatif terhadap kehidupan dan populasi satwa liar jenis *Macaca* dan *Tarsius*. Keuntungan ekonomi pengelolaan ekowisata di Cagar Alam Tangkoko, hanya dinikmati sebagian kecil pihak, diantaranya Pemerintah Provinsi dalam bentuk retribusi dan pendapatan langsung Petugas Jagawana sebagai pemandu wisata sekaligus pihak yang memiliki *homestay* yang disewakan kepada pengunjung. Hanya sedikit sekali manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat setempat yang tinggal di sekitar kawasan Cagar Alam Tangkoko.

Penelitian Azam dan Sarker (2011: 9) dalam *Green Tourism in The Context of Climate Change Towards Sustainable Economic Development in South Asian Region* seperti ditunjukkan pada bagan 2.1 menyebutkan bahwa pengembangan ekowisata yang berkelanjutan maka peran strategis pemerintah

adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dengan mendorong peran serta masyarakat untuk untuk mengembangkan visi dan pengelolaan industri pariwisata sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat dan berkembang secara berkelanjutan.



Bagan 2.1

Pengelolaan ekowisata berkelanjutan yang harus selalu mensinergikan kepentingan sosial, ekonomi, dan konservasi lingkungan secara seimbang dengan melibatkan masyarakat (Sumber : Azam and Sarker, 2011: 9)

Secara ringkas pada tabel 2.1 disajikan rangkuman penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian, yaitu penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan ekowisata terutama dengan SDM pengelolanya sebagai dasar rujukan dari penelitian ini.

Tabel 2.1.

Daftar Penelitian Terdahulu yang Terkait dengan Topik Penelitian Pengelolaan Ekowisata dan Sumber Daya Manusia

No.	Peneliti / penulis	Judul Penelitian
1.	Sastria, D. (2009)	Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal Dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Malang
2.	Aryunda, H. (2011)	Dampak Ekonomi Pengembangan Kawasan Ekowisata Kepulauan Seribu
3.	Nandi (2009)	Pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.	Mudayen, Y.M.V and Lantum, A.K. (2008)	<i>Needs Assessment</i> Pelatihan Pengembangan SDM Pendukung Pariwisata di Kabupaten Bantul
5.	Kumar, G.S. and Ramaswamy, S. (2010)	<i>Tourism and Environment: Pave the Way for Sustainable Eco-Tourism</i>
6.	Mirsanjari, M. M. and Mirsanjari, M. O (2012)	<i>Study of Strategic Eco-Tourism Potential Based on Sustainable Development and Management</i>
7.	Ardahaey, F.T. (2009)	<i>The Role of Human Resources Empowerment in the Sustainable Development of Tourism Industry</i>
8.	Crawford B. et al (2006)	<i>Factors Influencing Progress in Establishing Community-Based Marine Protected Areas in Indonesia</i>
9.	Kinard, M.F and O'Brien, T.G. (1996)	<i>Ecotourism in The Tangkoko Dua Saudara Nature Reserve: Opening Pandora Box.</i>
10.	Azam M. and Sarker T. (2011)	<i>Green Tourism in The Context of Climate Change Towards Sustainable Economic Development in South Asian Region</i>

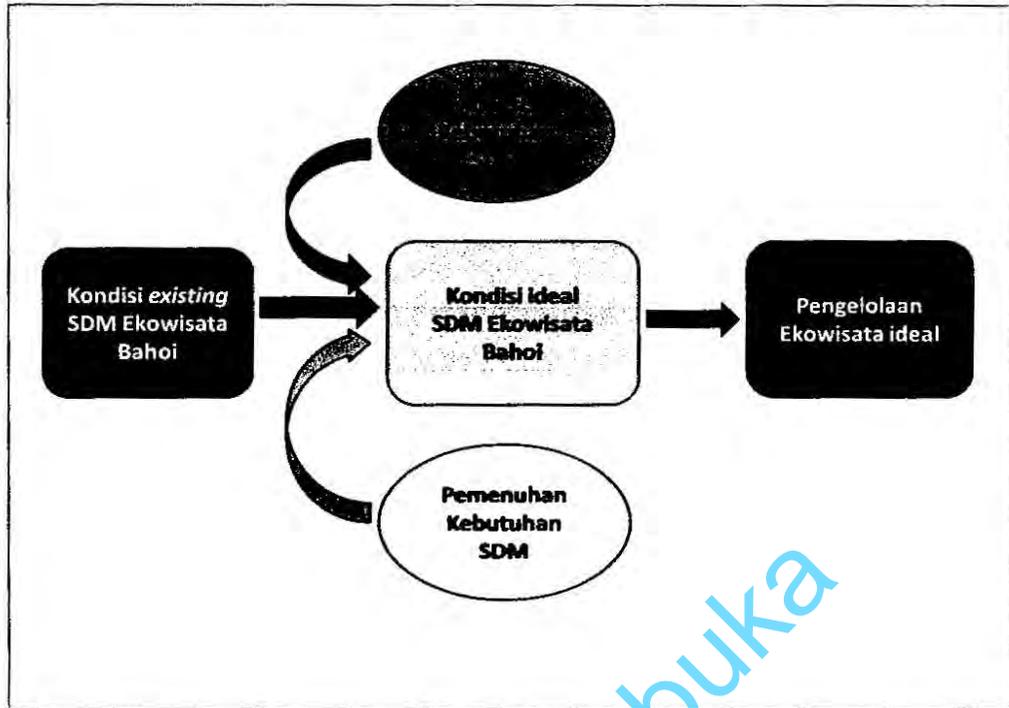
Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu tersebut di atas ternyata tidak banyak peneliti yang telah melakukan penelitian khusus perihal kebutuhan SDM untuk kelompok pengelola ekowisata bahari/ laut berbasis masyarakat. Untuk melengkapi informasi dan pengetahuan tentang kebutuhan SDM pengelolaan ekowisata, terutama ekowisata bahari/ laut berbasis masyarakat maka sangat penting untuk dilakukan penelitian dengan topik

ini, yaitu Analisis Kebutuhan SDM Kelompok Pengelola Ekowisata Berbasis Masyarakat: Studi Kasus di Desa Bahoi, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara.

C. Kerangka Berpikir

Desa Bahoi di Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara adalah desa yang telah mendapat model desentralisasi dan penguatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang berbasis pada wilayah desa dan melibatkan kelompok masyarakat di desa (Digdo, 2013: 7). Sebagai desa yang mempunyai kekayaan alam berupa keindahan laut maka Desa Bahoi memiliki potensi ekonomi besar yang apabila dikembangkan dan dikelola dengan baik akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakatnya. Namun demikian keterbatasan SDM dalam mengelola kekayaan laut tersebut yaitu ekowisata bahari yang saat ini ada belum menampakkan hasil seperti yang diharapkan.

Pada bagan 2.2 digambarkan bagaimana pola alur kerangka berpikir penelitian ini yang menganalisis kondisi SDM kelompok pengelola ekowisata di Desa Bahoi saat ini (*existing*), bagaimana kondisi SDM yang ideal atau yang sebaiknya, serta menganalisis strategi implementasi pemenuhan kebutuhan SDM yang ideal tersebut sehingga pengelolaan ekowisata dapat memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat desa.



Bagan 2.2

Kerangka berpikir konsep penelitian Analisis Kebutuhan SDM Pengelolaan Ekowisata Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Desa Bahoi, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara)

Universitas Terbuka

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. *Setting* penelitian di Desa Bahoi, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian dilaksanakan pada bulan September - November Tahun 2014. Sasaran penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran akan kebutuhan ideal SDM Pengelola Ekowisata berbasis masyarakat di Desa Bahoi dengan mengumpulkan data kondisi *existing* yang meliputi struktur, komposisi dan kapasitas SDM yang ada saat ini, menganalisis kebutuhan SDM yang ideal serta menganalisis strategi implementasi pemenuhan kebutuhan SDM ideal tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, observasi, wawancara dan diskusi kelompok (FGD).

Metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara kuantitatif lainnya (Strauss dan Corbin, 1997). Sementara Miles dan Huberman (1994) menjelaskan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang dilakukan secara intensif dan komunikasi mendalam dengan lapangan yang diteliti atau situasi yang hidup. Situasi ini bisa berupa refleksi dari kehidupan atau dinamika suatu individu, kelompok masyarakat, kelompok sosial maupun sebuah organisasi yang diungkap secara rinci dan mendalam serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam sebuah penelitian kualitatif akan didapatkan suatu pemahaman tentang suatu kenyataan melalui proses berpikir induktif, peneliti dapat mengenali subyek, merasakan apa yang mereka alami, terlibat dalam situasi dan fenomena atau kejadian yang diteliti yang bersifat unik (Basrowi dan Suwandi, 2009:2). Untuk mendapatkan kesimpulan dari suatu penelitian kualitatif diperlukan analisis dengan menggunakan metode triangulasi. Menurut Creswell J.W (2007) triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif. Pada dasarnya triangulasi ini merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multi perspektif. Artinya untuk menarik kesimpulan yang mantap, diperlukan tidak hanya dari satu sudut pandang saja.

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Sumber Informasi dalam penelitian ini adalah informan individu dan kelompok yang dipilih berdasarkan pertimbangan keterlibatan secara langsung dalam pengelolaan ekowisata di Desa Bahoi, ditambah informan narasumber yang dipilih berdasarkan pertimbangan tingkat pengetahuan dan kapabilitas untuk dapat memberikan informasi dan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah terkait dengan pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat. Pada tabel 3.1 disajikan pihak-pihak yang dipilih sebagai informan serta dasar pertimbangan dipilihnya sebagai informan dalam penelitian ini. Selanjutnya daftar lengkap informan dan nara sumber tertulis pada lampiran 5.

Tabel 3.1

Sumber Informasi dan Informan Penelitian Analisis Kebutuhan SDM Pengelolaan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Bahoi Kabupaten Minahasa Utara

Instansi	Jumlah informan	Teknik pengumpulan data	Alasan pemilihan sebagai informan
Kelompok Pengelola Ekowisata dan DPL Desa Bahoi	8	Observasi, Wawancara & FGD	Menangani langsung Ekowisata dan DPL serta mengetahui permasalahan yang ada di lapangan
LSM Pendamping (Yapeka, WCS, Celebio)	5	Wawancara & FGD	Mengetahui proses dan permasalahan pengelolaan ekowisata dan DPL di lapangan
Kepala Desa Bahoi	1	Wawancara	Mengetahui proses dan permasalahan pengelolaan ekowisata dan DPL di lapangan
Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara	1	Wawancara	Sebagai instansi Pembina pariwisata daerah, mengetahui permasalahan pengelolaan ekowisata di Bahoi
Pakar, Universitas Sam Ratulangi Manado	1	Wawancara	Sebagai pakar/ akademisi mampu memberikan saran/ solusi terhadap permasalahan pengelolaan ekowisata di Bahoi
Pakar, Sekolah Politeknik Negeri Manado	1	Wawancara	Sebagai pakar/ akademisi mampu memberikan saran/ solusi terhadap permasalahan pengelolaan ekowisata di Bahoi

C. Instrumen Penelitian

Instrumen-instrumen yang dipakai pada penelitian ini adalah :

- 1) Peneliti, sebagai instrumen utama penelitian kualitatif;
- 2) Pertanyaan penelitian;
- 3) Pedoman wawancara dan FGD;
- 4) Catatan lapangan;
- 5) Kamera dan Alat Perekam (*recorder*).

D. Prosedur Pengumpulan Data

1. Dokumentasi Studi Pustaka

Data sekunder yang terkait dengan pengelolaan ekowisata di Desa Bahoi dikumpulkan dan didokumentasikan melalui studi pustaka. Dokumentasi dikumpulkan dari berbagai penelitian yang telah ada, laporan, dokumen proyek, serta informasi lain yang telah dilaksanakan oleh pihak lain perihal kegiatan ekowisata dan DPL di Desa Bahoi, baik dari LSM, Perguruan Tinggi maupun Instansi Pemerintah. Hasil dari dokumentasi studi pustaka ini kemudian dipergunakan sebagai bahan-bahan awal penelitian guna mempersiapkan instrumen penelitian lainnya, seperti pertanyaan penelitian, panduan wawancara dan FGD serta cek lis data observasi lapangan yang akan dikumpulkan pada saat penelitian di lapangan.

2. Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran kondisi saat ini SDM pengelola ekowisata di Desa Bahoi serta gambaran kegiatan fisik kelompok pengelola ekowisata. Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung kondisi fisik dan non fisik kegiatan ekowisata, fasilitas yang ada, serta dokumen yang tersedia secara fisik di lapangan, antara lain:

- 1) Profil Desa Bahoi;
- 2) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Bahoi;
- 3) SK dan Peraturan Desa tentang pembentukan kelompok pengelola ekowisata;

- 4) Data personil kelompok pengelola ekowisata;
- 5) Sarana dan pra sarana fisik pendukung ekowisata;
- 6) Daftar pengunjung ekowisata/ buku tamu;
- 7) Aktivitas-aktivitas kegiatan ekowisata di lapangan;
- 8) Bagan organisasi kelompok pengelola ekowisata Desa Bahoi; dan
- 9) Pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti oleh kelompok pengelola ekowisata.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengetahui kondisi saat ini SDM pengelola ekowisata, kondisi ideal SDM serta strategi implementasi pemenuhan SDM kelompok pengelola ekowisata di Desa Bahoi berdasarkan keterangan dari para informan yang telah dipersiapkan sebelum penelitian di lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung terhadap informan dan nara sumber yang dilakukan di lokasi penelitian untuk melengkapi data selama observasi di lapangan. Untuk wawancara kepada informan dari LSM, Pakar/Akademisi serta Instansi Pemerintah dilakukan di kantor instansi yang bersangkutan. Sedangkan wawancara kepada informan dari unsur kelompok masyarakat dan Desa dilaksanakan di lokasi penelitian di Desa Bahoi. Prosedur dan tatacara wawancara berpedoman kepada daftar pertanyaan penelitian sebagaimana tertera pada lampiran 1

4. Diskusi Kelompok (FGD)

Metode FGD dilaksanakan untuk mengkonfirmasi, memverifikasi serta melengkapi data dari hasil wawancara dan observasi di lapangan yang telah dilakukan sebelumnya. FGD dilakukan di dua tempat, yaitu di Desa Bahoi untuk

informan yang berasal dari Desa Bahoi dan di Manado untuk informan yang berasal dari LSM pendamping. Prosedur dan tatacara FGD dilaksanakan dengan berpedoman kepada panduan yang telah dipersiapkan sebagaimana tertera pada lampiran 2.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis interaktif yang mengacu kepada metode analisis penelitian kualitatif yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman (2002). Analisis data dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data diawali dengan memilih dan menyeleksi data hasil dari hasil studi pustaka, observasi lapangan, wawancara dan FGD di lapangan. Maksud dari reduksi data ini agar data yang terkumpul bisa diolah sehingga memberikan gambaran yang lebih fokus dan tajam dari hasil pengamatan di lapangan. Reduksi data ini dilakukan dengan membuat ringkasan, pengkodean, pengelompokan kategori dan membuat catatan refleksi pemilihan data sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan pada aspek penelitian, yaitu kondisi *existing* SDM, kondisi ideal SDM dan pemenuhan kebutuhan SDM pengelola ekowisata di Desa Bahoi.

2. Display data.

Display data adalah proses menampilkan data dari hasil olahan data yang telah melalui tahap reduksi data secara sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat, naratif, petikan wawancara, tabel, grafik, gambar, bagan dan foto agar lebih

mudah dibaca dan dipahami. Display data dilakukan sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat.

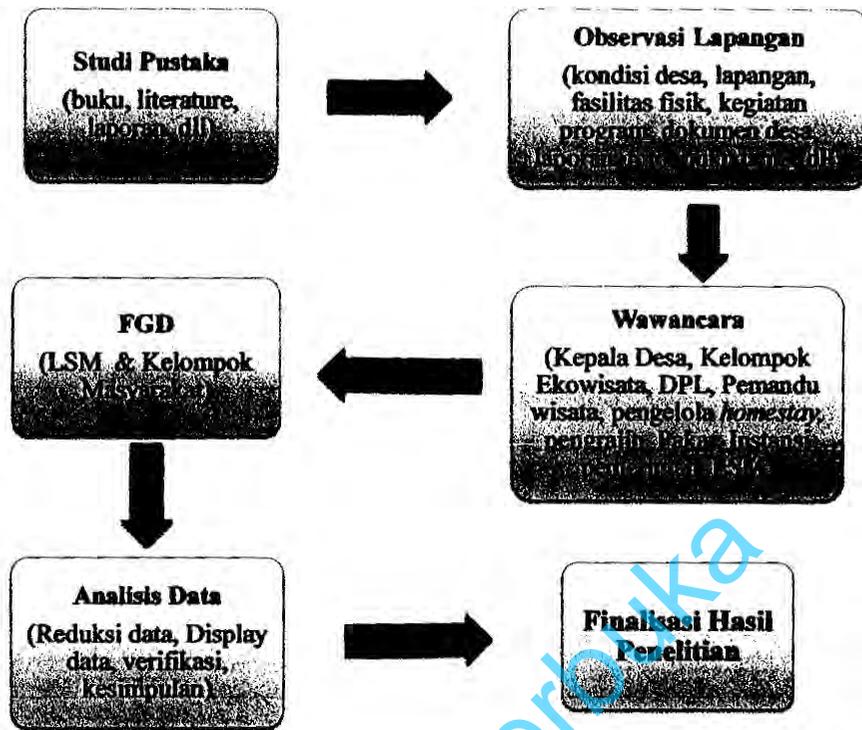
3. Verifikasi dan Kesimpulan

Kesimpulan-kesimpulan dibuat dan harus dicek kembali atau diverifikasi pada catatan lapangan yang telah dibuat, salinan hasil wawancara dan FGD serta hasil observasi di lapangan. Pengambilan kesimpulan ini merupakan proses penarikan intisari dari data-data yang terkumpul dalam bentuk pernyataan kalimat yang tepat dan memiliki data yang jelas. Kesimpulan akhir yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian & temuan penelitian yang sudah dilakukan pada bab pembahasan.

Tabel 3.2

Tahapan Pengumpulan dan Analisis Data pada Penelitian Analisis Kebutuhan SDM Pengelolaan Ekowisata Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Desa Bahoi, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara)

Tanggal.	Uraian Kegiatan	Lokasi	Keterangan
1-20/9/14	Studi Literatur	Jakarta, Bogor	Pengumpulan data awal, data sekunder, dokumen, laporan, dan data pendukung sebelum melakukan penelitian di lapangan.
21-27/9/14	Penyusunan Pertanyaan penelitian, Panduan wawancara, Panduan FGD dan cek lis data observasi.	Jakarta, Bogor	Sebelum diterapkan di lapangan terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Dosen Pembimbing
28/9/14 s.d 6/10/14	Penelitian di lapangan: Observasi Lapangan, Wawancara, dan FGD	Manado, Kab. Minahasa Utara, Desa Bahoi.	Wawancara & FGD Pakar dan LSM dilakukan di Manado, wawancara Dinas Pariwisata di Kabupaten Minahasa Utara, dan Wawancara dengan kepala Desa, Kelompok Ekowisata & DPL di Desa Bahoi.
7-30/10/14	Analisis Data	Jakarta, Bogor	Hasil analisis data dikonsultasikan kepada Dosen Pembimbing untuk mendapatkan saran dan masukan.
1-15/11/14	Finalisasi Penulisan Hasil Penelitian	Jakarta, Bogor	



Bagan 3.1

Tahapan Pengumpulan dan Analisis Data pada Penelitian Analisis Kebutuhan SDM Pengelolaan Ekowisata Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Desa Bahoi, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara)

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Profil Desa Bahoi

Menurut dokumen sejarah desa yang tertulis dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Bahoi tahun 2010-2015, Desa Bahoi pertama kali dibuka dan dihuni pada tahun 1934 oleh sekelompok penduduk yang berasal dari Kepulauan Nusa Utara (Siau, Sangihe dan Talaud) yang merantau ke tanah Minahasa. Nama “*Bahoi*” berasal dari kata “*Mubaho*” atau “*Baho*” yang berarti Tekad. Sejak berdiri pada tahun 1934 hingga saat ini Desa Bahoi telah dipimpin oleh 9 Kepala Desa yang disebut dengan istilah “*Hukum Tua*”. Sejak tahun 2008 hingga saat ini Kepala Desa Bahoi dijabat oleh Daud Dalero.

Secara administratif wilayah Desa Bahoi terletak di Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Tanah di Desa Bahoi terletak pada ketinggian 0 - 76 meter dari permukaan laut (dpl). Batas wilayah Desa Bahoi di sebelah utara adalah Desa Serei dan Selat Lihaga, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bulutui dan Desa Mubune, sebelah Timur berbatasan dengan dengan Selat Lihaga dan di sebelah barat berbatasan dengan jalan raya/ jalan desa yang menuju ke Desa Serei. Sebagaimana daerah lain di Indonesia pada umumnya Desa Bahoi mempunyai iklim tropis dengan musim penghujan biasanya berlangsung pada bulan Oktober - Maret dan musim kemarau berlangsung pada bulan April - Oktober.

Jumlah penduduk Desa Bahoi adalah 493 jiwa, terdiri dari 134 kepala keluarga (KK). Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Bahoi masing-masing adalah Sarjana 10 orang, SMA 57 orang, SMP 66 orang, SD 66 orang dan sisanya tidak atau belum bersekolah. Mata pencaharian penduduk Desa Bahoi sebagian besar adalah nelayan (81 orang), petani (40 orang), karyawan swasta (19 orang), wiraswasta (10 orang), PNS (13 orang), tukang kayu/ batu (11 orang) dan sisanya adalah sopir, tukang ojek, peternak, dan pensiunan.

Selanjutnya Desa Bahoi berdasarkan penggunaan lahannya terbagi menjadi tujuh tipe penggunaan lahan, yaitu perkebunan, pertanian, hutan bakau, daerah perlindungan laut, semak berbatu, rawa pasang surut dan pemukiman. Pada tabel 4.1 disajikan penggunaan lahan di Desa Bahoi.

Tabel 4.1
Data Penggunaan Lahan di Desa Bahoi, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten
Minahasa Utara

No.	Jenis Penggunaan lahan	Luas (Ha)	Keterangan
1	Perkebunan	91	Sebagian besar tanaman kelapa
2	Pertanian	78	Padi dan palawija
3	Hutan Bakau (<i>mangrove</i>)	40	Jenis <i>Rizophora</i> dan <i>Soneratia</i>
4	Daerah Perlindungan Laut	18	DPL berbasis masyarakat
5	Lahan semak dan berbatu	10	Tidak produktif (batu karang)
6	Rawa / pasang surut	4	-
7	Pemukiman	1.7	Dihuni oleh 134 KK

Sumber : Dokumen RPJM Desa Bahoi Tahun 2010 - 2015

Misi Desa Bahoi sebagaimana tertulis pada dokumen RPJM Desa adalah
“Mewujudkan Desa Bahoi yang Mandiri, Makmur dan Sejahtera Melalui

Pembangunan di Bidang Perikanan, Perkebunan dan Ekowisata”. Sedangkan Misinya adalah :

- 1) Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan SDM melalui pendidikan formal maupun informal;
- 2) Membuka jalan-jalan penghubung antar desa sebagai akses transportasi hasil perikanan, perkebunan dan pariwisata;
- 3) Meningkatkan usaha perikanan dan perkebunan;
- 4) Meningkatkan pelayanan, keahlian, ketrampilan dan jasa pariwisata untuk menunjang ekowisata;
- 5) Mengelola dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
- 6) Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan otonomi desa.



Foto 4.1

Kondisi umum pemukiman di Desa Bahoi, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, foto diambil pada Tanggal 30 September 2014.

2. Perkembangan Pengelolaan Ekowisata di Desa Bahoi

Kegiatan ekowisata di Desa Bahoi dimulai pada tahun 2010 dari bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Perdesaan ((PNPM LMP) oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari wawancara dengan Informan S.1, S.2 maupun S.10 diperoleh informasi bahwa pada tahun 2010 merupakan awal dibentuk dan dimulainya kegiatan kelompok pengelola ekowisata berbasis masyarakat di Desa Bahoi. Pada saat itu struktur kepengurusan kegiatan ekowisata disepakati berdasarkan musyawarah desa dan dipilih tiga orang pengurus inti dari anggota masyarakat, yaitu Hans Lahamendu sebagai Ketua, Carles Sahudege sebagai Sekretaris, dan Jomilke Corneles sebagai Bendahara. Tiga pengurus inti tersebut adalah tim kerja yang dalam tata kelola program PNPM LMP disebut dengan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Ekowisata Desa Bahoi. Keterangan tersebut dikuatkan dengan hasil petikan wawancara dengan informan S.1 dan S.2 sebagai berikut:

“Proses pembentukan kelompok ekowisata dilakukan pada tahun 2010, yaitu pada saat ada program BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) PNPM LMP. Proses pembentukan kelompok difasilitasi oleh FK (Fasilitator Kecamatan) PNPM LMP dan CSO (WCS). Usulan kegiatan ekowisata di Bahoi diusulkan pada forum Musyawarah Desa yang kemudian diajukan ke program PNPM LMP. Usulan ini kemudian diajukan ke Musyawarah Antar Desa di tingkat kecamatan dan mendapat persetujuan dari program untuk mendapat pendanaan program. Usulan ekowisata ini dulu dinyatakan layak oleh program dikarenakan potensi keberlanjutannya dianggap cukup baik.: (Informan S.1).

“Pengurus kelompok ekowisata dipilih secara aklamasi pada Musyawarah Desa PNPM LMP pada tahun 2010. Penunjukan saya sebagai ketua dikarenakan saya dipandang oleh masyarakat mempunyai kepedulian lingkungan dan sosial, disamping mungkin juga karena faktor usia atau dituakan di desa. Kelompok ekowisata ini dibentuk melanjutkan kegiatan PNPM LMP lain sebelumnya. Makanya pengurus ekowisata adalah juga dulunya pengurus TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) PNPM LMP yang ada di Desa Bahoi. Jadi pengurus yang

ada, yaitu Ketua, Sekretaris (Carles Sahudege) dan Bendahara (Jomilke Cornelis) semua adalah mantan pengurus TPK tahun 2009 untuk kegiatan PNPM LMP". (Informan S.2)

Pada kegiatan ekowisata di Desa Bahoi ini Program PNPM LMP memberikan bantuan kepada kelompok pengelola ekowisata berupa 10 set peralatan selam (*diving*) dan *snorkling*, satu unit pondok kerja, serta satu unit perahu motor. Untuk peralatan selam, *snorkling* dan pondok kerja saat penelitian dilakukan masih dalam kondisi baik serta berfungsi dengan baik. Namun demikian satu unit bantuan perahu motor menurut keterangan dari informan S.1, S.2 dan S.3 sudah mengalami kerusakan berat dan saat ini tidak bisa dipergunakan lagi. Selain itu program PNPM LMP juga memberikan bantuan berupa paket pelatihan bagi 10 anggota kelompok ekowisata sebagai pemandu (*guide*) untuk wisata selam (*diving*) dan *snorkling* yang merupakan bagian dari kegiatan utama ekowisata di Desa Bahoi. Keterangan tersebut sebagaimana hasil petikan FGD II dari informan S.1. sebagai berikut:

"Kegiatan utama ekowisata waktu itu adalah pembelian peralatan selam (10 set) dengan pelatihan diving untuk guide. Juga bantuan satu unit perahu motor, namun sekarang perahu motor sudah rusak. Selain itu ada juga bantuan satu unit pondok kerja, sekaligus pembentukan kelompok yang telah dikuatkan dengan SK Kepala Desa dan Peraturan Desa pada tahun 2010". (Informan S.1)



Foto 4.2

Pondok kerja dan peralatan selam bantuan dari Program PNPM LMP tahun 2009 - 2010 untuk kelompok ekowisata di Desa Bahoi. Foto diambil pada Tanggal 1 Oktober 2014



Foto 4.3

Satu unit perahu motor bantuan dari Program PNPM LMP untuk kelompok ekowisata di Desa Bahoi. Foto dokumentasi dari PNPM LMP tahun 2010, pada saat itu perahu masih berfungsi dengan baik.

Selanjutnya pelaksanaan kegiatan ekowisata ini diatur melalui Peraturan Desa No.02 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Laut Desa Bahoi dan Surat Keputusan Hukum Tua (Kepala Desa) No.140/3/20.11/VI-2010 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Desa Bahoi. Dalam SK tersebut

dijelaskan bahwa kawasan wilayah pesisir dan laut yang bisa dikelola oleh kelompok ekowisata sebagai obyek wisata berbasis masyarakat adalah:

- (1). Daerah Perlindungan Laut (DPL);
- (2). Kawasan Pasir Putih;
- (3). Kawasan *Mangrove* dan Terumbu Karang, dan;
- (4). Kawasan Perlindungan Pantai.



Foto 4.4

Keindahan terumbu karang di Kawasan Daerah Perlindungan Laut (DPL) sebagai salah satu obyek ekowisata andalan selam dan *snorkling* di Desa Bahoi. Foto diambil pada Tanggal 1 Oktober 2014.

Hasil wawancara terhadap informan S.1, S.2, S.3, S.4 dan S.10 diperoleh informasi bahwa setelah berakhirnya program PNPM LMP pada tahun 2012, kegiatan ekowisata di Desa Bahoi berkembang dengan dibentuknya unit pendukung kegiatan ekowisata, yaitu kelompok pengelolaan *homestay* (10 orang/ rumah), dan unit kerajinan tangan (*handicraft*), sebagaimana petikan wawancara sebagai berikut:

“Pengurus awal kelompok ekowisata terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara sebagai pengurus inti. Kemudian ada bidang dive center 9 orang. Kemudian ekowisata berkembang dengan bertambah lagi bidang homestay 10 orang dan handicraft pada tahun 2012. (Informan S.1)



Foto 4.5

Salah satu *homestay* yang merupakan pengembangan unit usaha kelompok ekowisata di Desa Bahoi sejak tahun 2012. Foto diambil pada Tanggal 2 Oktober 2014

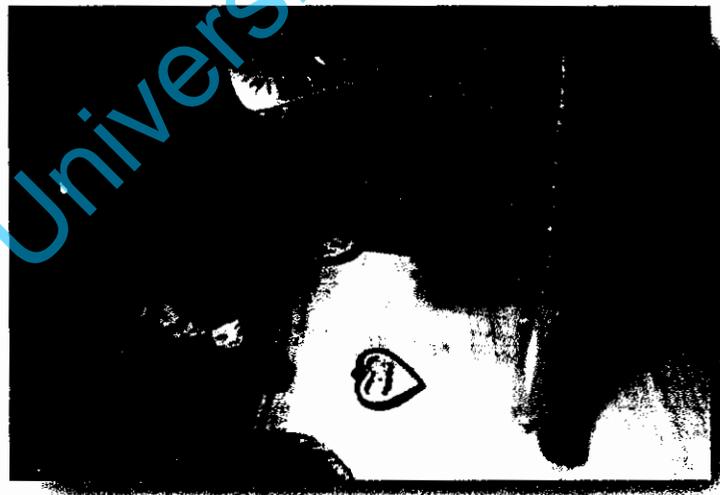


Foto 4.6

Salah satu produk kerajinan dari batok kelapa yang merupakan pengembangan unit usaha kelompok ekowisata di Desa Bahoi sejak tahun 2012. Foto diambil pada Tanggal 2 Oktober 2014.

Selain wisata selam dan *snorkling*, pada tahun 2014 Kelompok Pengelola Ekowisata yang didukung oleh Pemerintah Desa Bahoi juga mulai mengembangkan obyek tujuan wisata baru yaitu Pasir Putih dan Hutan Bakau (*mangrove*). Program ini mendapatkan dukungan dan bantuan berupa prasarana jalan akses desa menuju kawasan Pasir Putih dan satu unit jembatan dari Dinas PU serta sarana pendukung berupa beberapa tiga unit *gazebo* dari Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara. Selain itu kegiatan ekowisata Desa Bahoi ini juga mendapatkan bantuan lain berupa satu unit rumah apung, satu unit karamba apung dan satu unit dermaga dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Utara.



Foto 4.7

Kawasan Pasir Putih dan *mangrove* sebagai obyek wisata pengembangan kelompok ekowisata di Desa Bahoi. Foto diambil pada Tanggal 2 Oktober 2014

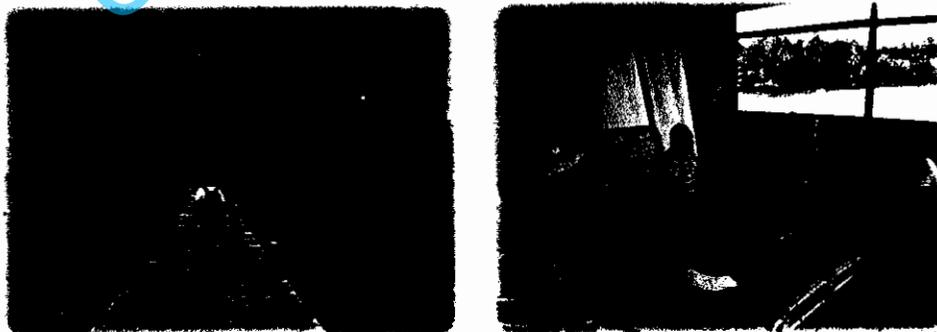
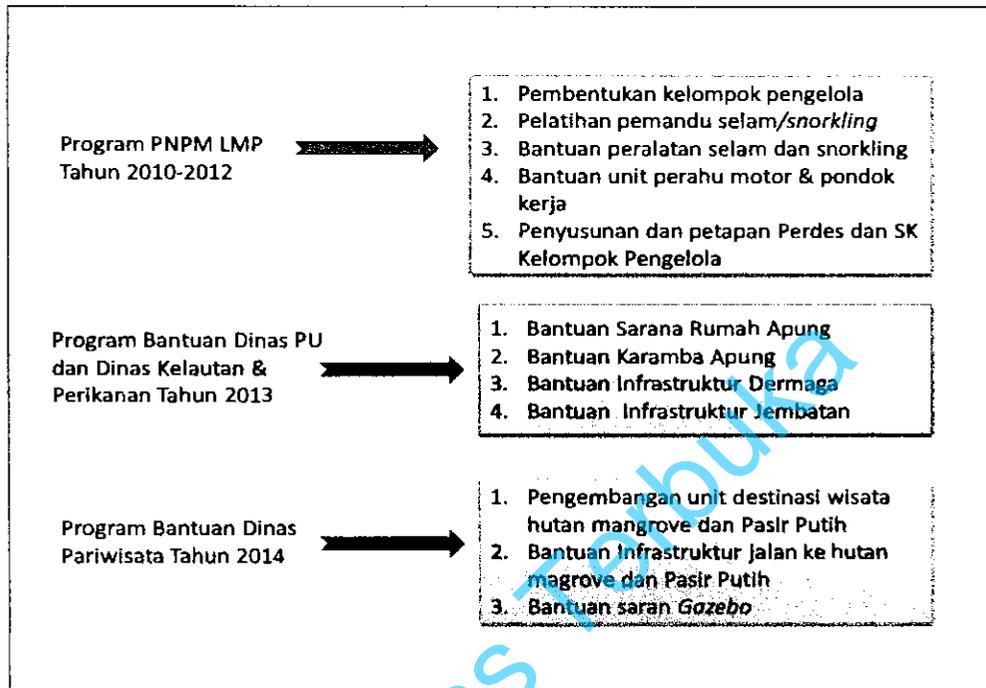


Foto 4.8

Fasilitas dermaga (kiri) dan rumah apung (kanan) bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Utara untuk kegiatan DPL dan Ekowisata di Desa Bahoi. Foto diambil pada Tanggal 3 Oktober 2014.

Selanjutnya secara ringkas pada bagan 4.1. digambarkan perjalanan dan perkembangan kegiatan pengelolaan ekowisata di Desa Bahoi dari mulai pembentukannya pada tahun 2010 hingga tahun 2014.



Bagan 4.1

Perkembangan pengelolaan ekowisata di Desa Bahoi, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara sejak Tahun 2010 hingga Tahun 2014. (Diolah dari hasil observasi lapangan dan wawancara)

B. Hasil Penelitian

1. Kondisi *Existing* SDM Kelompok Pengelola Ekowisata di Desa Bahoi

Data tentang kondisi saat ini (*existing*) SDM pengelola Ekowisata di Desa Bahoi dikumpulkan dengan melakukan wawancara kepada para informan dan melakukan FGD dengan mengajukan 9 pertanyaan penelitian (Lampiran 1). Data hasil dari wawancara dan FGD (Lampiran 3 dan 4) dirangkum dan dikelompokkan sebagai berikut.

1.a. Pembentukan Kelompok Pengelola Ekowisata Desa Bahoi

Untuk mengetahui pembentukan kelompok pengelola ekowisata di Desa Bahoi diajukan pertanyaan penelitian kepada para informan: *“Bagaimana pembentukan kelompok pengelola ekowisata di Desa Bahoi dan apakah pembentukannya dikuatkan dengan SK Kepala Desa atau Perdes?”*

Semua informan yang diwawancarai, yaitu informan S.1, sampai dengan informan S.3 memberikan jawaban yang relatif seragam, yaitu Kelompok Pengelola Ekowisata di Desa Bahoi dibentuk pada tahun 2010 pada saat Program PNPM LMP dan telah dikuatkan melalui SK Kepala Desa dan Peraturan Desa. Selanjutnya menurut keterangan dari informan S.1, S.2, S.3 dan S.10 serta S.12 diperoleh informasi lebih lanjut bahwa pembentukan kelompok ekowisata di Desa Bahoi pada tahun 2010 merupakan pengembangan lanjutan dari kegiatan sebelumnya dari PNPM LMP di Desa Bahoi pada tahun 2009, yaitu pembentukan Kawasan Daerah Perlindungan Laut (DPL).

Berdasarkan dokumen yang diperoleh dari penelitian di lapangan ditemukan data bahwa pada tahun 2010 kelompok pengelola ekowisata di Desa Bahoi telah dikukuhkan secara resmi melalui SK Kepala Desa (Hukum Tua) No.140/2/20.11/VII-2010 tentang Penetapan Kelompok Pengelola Pesisir Desa (KPPD) atau juga disebut kelompok ekowisata. Kelompok ekowisata yang dikukuhkan melalui SK Kepala Desa bahoi tersebut terdiri dari 3 pengurus inti, yaitu ketua, bendahara dan sekretaris, ditambah dengan 9 anggota yang merupakan pemandu wisata selam. Sedangkan pelaksanaan kegiatan ekowisata ini diatur melalui Peraturan Desa No.02 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Laut Desa Bahoi dan Surat Keputusan Kepala Desa

No.140/3/20.11/VI-2010 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Desa.

Keterangan tersebut dikuatkan dari petikan salinan FGD II sebagai berikut:

“Kegiatan ekowisata di desa Bahoi dimulai pada tahun 2010 sejak masuk program PNPM LMP dan ada pendampingan dari WCS. Sebenarnya kalau DPL sudah ada program sebelumnya yaitu CMRP (proyek pesisir) tahun 2000-an, namun tidak berbekas lagi alias mati suri, dan sejak 2010 ada PNPM LMP itulah DPL dihidupkan kembali dan hingga sekarang masih berlanjut. Pembentukan kelompok DPL maupun ekowisata ini telah dikuatkan dengan Perdes dan SK Hukum Tua (kepala desa). Secara resmi struktur dan komposisi pengurus yang ada sekarang adalah hasil Perdes dan SK tahun 2010”. (Informan S.10)

1.b. Tujuan Pengelolaan Ekowisata Desa Bahoi

Untuk mengetahui tujuan pengelolaan atau visi dan misi ekowisata di Desa Bahoi disampaikan pertanyaan penelitian: *“Bagaimanakah visi dan misi atau tujuan dibentuknya kelompok pengelola ekowisata di Desa Bahoi? Apakah dikuatkan dan tercantum dalam AD/ART atau dokumen sejenisnya?”*

Keterangan yang diperoleh dari Informan S.1, S.2, S.3 dan S.10, S.11 serta S.12, secara umum diperoleh keterangan adalah bahwa kegiatan ekowisata di Desa Bahoi bertujuan untuk memanfaatkan potensi wisata pesisir dan laut di Desa Bahoi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa. Keterangan tersebut sejalan dengan data yang tertera dalam dokumen Peraturan Desa tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Laut Desa Bahoi, Bab IX, Pasal 11 ayat 3 dan ayat 4, yaitu:

“Kelompok Pengelola Ekowisata Desa wajib menyelenggarakan atau mengurus anggotanya dalam berbagai pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam rangka mengembangkan ekowisata di Desa Bahoi”.

“Kelompok Pengelola Ekowisata Desa bertanggungjawab mengelola dana yang dihasilkan dari jasa ekowisata untuk kepentingan pengelolaan kawasan dan kesejahteraan anggota dengan bimbingan dan arahan Pemerintah Desa”.

Tujuan dibentuknya Kelompok Pengelola Ekowisata ini juga sejalan dengan Visi Desa Bahoi yang termuat dalam dokumen RPJM Desa Bahoi tahun

2010 - 2015, Bab III, yaitu : *“Mewujudkan Desa Bahoi yang Mandiri, Makmur dan Sejahtera Melalui Pembangunan di Bidang Perikanan, Perkebunan dan Ekowisata”*. Tujuan dibentuknya Kelompok Pengelola Ekowisata ini juga sejalan dengan Misi Desa Bahoi yang termuat dalam dokumen RPJM Desa Bahoi tahun 2010 - 2015, Bab III, khususnya misi ke-empat: *“Meningkatkan pelayanan, keahlian, ketrampilan dan jasa pariwisata untuk menunjang ekowisata”*.

1.c. Komposisi SDM Kelompok Pengelola Ekowisata

Untuk mengetahui kondisi komposisi personalia kelompok ekowisata di Desa Bahoi diajukan pertanyaan penelitian kepada para informan: *“Bagaimana struktur dan komposisi pengurus kelompok pengelola ekowisata di Desa Bahoi dan bagaimanakah bagan organisasi kelompok pengelola tersebut?”*

Terhadap pertanyaan tersebut Informan S.1, S.2, S.3 dan S.4 menjelaskan bahwa personil kelompok pengelola Ekowisata Desa Bahoi terdiri dari 3 pengurus inti yang ketiganya merupakan mantan pengurus lama Tim Pengelola Kegiatan (TPK) program PNPM LMP, ditambah dengan 9 anggota, sebagaimana tercantum dalam SK Kepala Desa Bahoi tentang penetapan kelompok pengelola ekowisata Desa Bahoi yang disajikan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Susunan Pengurus Kelompok Pengelola Ekowisata di Desa Bahoi

No.	Nama	Jabatan
1.	Hans Lahamendu	Ketua
2.	Carles Sahudege	Sekretaris
3.	Jomilke Corneles	Bendahara
4.	Jance Moloke Prong	Angota
5.	Frangki Sahudege	Angota
6.	Jastin Hengkengbala	Angota
7.	Johanis Dermanto Hontong	Angota
8.	Jendri Palandang	Angota
9.	Welmas Harikasi	Angota
10.	Andreow Lahading	Angota
11.	Roy Dalero	Angota
12.	Sperjus Sahudege	Angota

Sumber : Surat Keputusan Hukum Tua Desa Bahoi No.140/2/20.11/VII-2010

1.d. Prosedur Pemilihan Personel Kelompok Pengelola Ekowisata

Untuk mengetahui bagaimana prosedur dan proses pemilihan personalia yang diangkat sebagai kelompok pengelola ekowisata di Desa Bahoi diajukan pertanyaan penelitian: *“Bagaimana prosedur dan tatacara pemilihan personel kelompok pengelola ekowisata? Apakah ada persyaratan khusus/ tertentu untuk menjadi ketua/ anggota atau pengurus kelompok ekowisata di Desa Bahoi?”*

Menurut keterangan dari informan S.1, S.2, S.3 dan S.4 personil atau anggota masyarakat yang ditetapkan sebagai pengurus kelompok pengelola ekowisata Desa Bahoi dipilih melalui Musyawarah Desa yang dihadiri perwakilan dari Pemerintah Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, maupun perwakilan masyarakat dan nelayan dari Desa Bahoi. Dipilihnya tiga orang mantan pengurus

TPK kegiatan PNPM LMP sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara menurut keempat informan tersebut adalah dengan mempertimbangkan bahwa ketiga orang tersebut sudah berpengalaman pernah menangani kegiatan program PNPM LMP sebelumnya pada tahun 2009.

Penunjukan Hans Lahamendu (Informan S.2) sebagai Ketua Kelompok Ekowisata dikarenakan yang bersangkutan adalah tokoh masyarakat desa yang dituakan, saat ini tokoh tersebut berumur 70 tahun dan masih mempunyai semangat yang tinggi untuk memajukan pembangunan di Desa Bahoi. Namun demikian menurut keterangan selanjutnya dari informan S.2, yang bersangkutan sesungguhnya sudah mengajukan pengunduran diri beberapa kali dikarenakan usia dan kemampuan fisik dan kesehatan yang sudah dirasakan menurun, namun dikarenakan anggota yang lebih muda tidak ada yang bersedia untuk menggantikannya maka terpaksa posisi sebagai Ketua Kelompok Ekowisata masih dijabatnya hingga saat ini. Keterangan di atas sesuai dengan petikan wawancara dari dua informan sebagai berikut:

“Pengurus inti ketua, sekretaris dan bendahara dipilih berdasarkan musyawarah di Desa. Pada saat itu yang dipilih adalah 3 orang yang pernah menjadi pengurus PNPM LMP, atau Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang dianggap oleh masyarakat berpengalaman mengelola program. Sedangkan tim diving dipilih 9 orang yang mempunyai ketrampilan teknis menyelam di laut. Pengurus ditetapkan SK Kepala Desa pada tahun 2010”. (Informan S.1)

“Pemilihan pengurus pengelola ekowisata dilakukan melalui musyawarah di tingkat desa yang difasilitasi oleh PNPM LMP pada saat itu. Waktu itu orang-orang memilih saya sebagai pengurus/ ketua mungkin karena faktor usia yang sudah tua, dan saya banyak aktif di kegiatan sosial dan pemerhati lingkungan. sehingga dianggap lebih berpengalaman. Namun untuk anggota tim diving semua para pemuda memiliki ketrampilan khusus menyelam di laut”. (Informan S.2)

Namun demikian ada sedikit informasi tambahan yang sedikit berbeda dari informan S.3 dan S.10 yang menyatakan bahwa memang pemilihan pengurus

kelompok ekowisata ditetapkan melalui musyawarah warga desa, namun demikian faktor adanya kedekatan dengan Kepala Desa juga merupakan faktor yang penting dalam pemilihan pengurus. Keterangan ini sesuai dengan petikan wawancara dan FGD sebagai berikut:

“Semua pengurus kelompok di Bahoi ini baik DPL maupun ekowisata sebenarnya dipilih karena kekerabatan atau hubungan keluarga. Maksudnya, baik anggota kelompok DPL maupun Kelompok Ekowisata semuanya berkerabat dengan Hukum Tua (Kepala Desa). Meskipun secara formal semua pengurus kelompok diputuskan melalui forum Musyawarah Desa” (Informan S.3).

“Khusus untuk tim diving dipilih berdasarkan kemampuan teknis berenang dan menyelam di laut, kalau pengurus lainnya kayaknya karena faktor kedekatan dengan Hukum Tua saja (Kepala Desa). Faktor Kepala Desa sangat dominan dalam menentukan susunan kepengurusan, meskipun memang keputusan dilakukan melalui musawarah desa”. (Informan S.10)

1.e. Prosedur Penggantian Personalia Kelompok Ekowisata

Untuk mengetahui prosedur penggantian pengurus kelompok ekowisata Desa Bahoi disampaikan pertanyaan penelitian berikut kepada para informan; *“Bagaimana mekanisme penggantian kepengurusan dan apakah selama ini pernah ada penggantian anggota pengelola ekowisata di Desa Bahoi?”*

Menurut keterangan dari informan S.1, S.2 dan S.3 sejak ditetapkan pada tahun 2010 hingga saat ini personil pengurus kelompok pengelola ekowisata di Desa Bahoi belum pernah ada pergantian. Ketika pertanyaan dilanjutkan dengan: *“Mengapa hingga saat ini belum pernah ada penggantian pengurus kelompok ekowisata ini?”*, maka menurut keterangan selanjutnya dari informan S.2, yang bersangkutan sesungguhnya sudah mengajukan pengunduran diri beberapa kali pada pertemuan kelompok, dikarenakan usia, kemampuan fisik dan kesehatan yang sudah dirasa menurun, namun hingga saat ini tidak ada anggota lain atau

anggota yang lebih muda yang bersedia menggantikannya sebagai ketua kelompok.

“Memang sampai dengan saat ini belum pernah ada pengurus yang diganti. Sebenarnya saya ini kan sudah tua (70 tahun), hanya tamatan SR (Sekolah Rakyat). Banyak warga yang lebih muda dan lebih pantas menjadi pengurus kelompok ekowisata ini. Sebenarnya sudah berkali-kali (lebih dari 50 kali mungkin...), setiap ada pertemuan saya wacanakan penggantian pengurus, tapi mereka yang masih muda-muda tidak mau bersuara, mungkin mereka segan kepada para tetua desa. Mungkin juga mereka tidak mau menjadi pengurus dikarenakan ini kerja sosial yang tidak ada gaji atau honorinya... ha ha”. (Informan S.2)

1.f. Kapasitas SDM Kelompok Pengelola Ekowisata Desa Baho

Untuk mengetahui sejauh mana kapasitas SDM pengelola ekowisata di Desa Baho para informan ditanyakan pertanyaan: *“Menurut saudara bagaimana kapasitas SDM kelompok pengelola ekowisata di Desa Baho yang telah dibentuk? Apakah SDM yang ada mempunyai kapasitas cukup untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan visi/ misi/ tujuan pengelolaan Ekowisata di Desa Baho?”*

Keterangan yang diperoleh dari para informan dan nara sumber terhadap pertanyaan penelitian tersebut cukup beragam, namun demikian semua keterangan dari seluruh informan S.1 hingga S.5 hampir semuanya sepakat menyatakan bahwa kapasitas SDM pengelola ekowisata di Desa Baho masih sangat kurang dan belum memadai, hanya saja masing-masing informan memberikan penekanan-penekanan khusus terhadap keterbatasan SDM dalam hal apa saja sesuai dengan yang dialami masing-masing informan.

“Kami menyadari bahwa kapasitas SDM pengelola ekowisata ini masih banyak kekurangan. Motivasi anggota kelompok untuk mengurus ekowisata ini masih minim. Untuk tim diving memang mereka sudah mendapatkan sertifikat diving, namun masih kurang dalam ketrampilan guide, dan Bahasa Inggris. Selain itu kami tidak mengerti manajemen organisasi yang baik, kami kurang mengerti

tentang pemasaran atau promosi yang baik. Promosi wisata kami terbatas hanya pada stand-stand pameran di Pemda”. (Informan S.2)

“Memang secara khusus kami pengelola homestay ini belum pernah mendapatkan pelatihan khusus bagaimana cara mengelola homestay dan melayani tamu yang menginap dengan baik. Banyak pemilik homestay belum berani menerima tamu untuk menginap di homestay nya dikarenakan masih takut dan ragu-ragu karena tidak memiliki pengalaman menerima tamu selama ini. Pemilik homestay yang sudah cukup berpengalaman menerima tamu bermalam adalah Ibu Konstanti (S.8). Kebetulan ada sanak keluarganya yang bekerja di satu Resort di Bitung yang memberikan informasi bagaimana memberikan pelayanan kepada para tamu”. (Informan S.5)

Sementara informan S.6 dan S.7 memberikan keterangan bahwa kemampuan komunikasi dalam Bahasa Inggris dan sertifikat pemandu selam yang belum memenuhi kualifikasi *rescue diving* atau *dive master* adalah kapasitas SDM yang dirasakan masih sangat kurang.

“Ada yang masih kurang dari kami pemandu diving adalah sertifikat diving kami yang masih level basic diving. Banyak wisatawan yang meragukan kami karena mereka yang berwisata ke Bahoi ini banyak yang memiliki sertifikat diving level dive master, dan ini membuat kami merasa kurang percaya diri saat memandu mereka. Bahkan mereka memberitahukan kepada kami bahwa sebenarnya untuk menjadi pemandu selam seperti kami harus memiliki sertifikat level dive master. Selain itu kemampuan Bahasa Inggris kami yang minim juga menjadi kendala pada saat memandu turis asing. Kebanyakan yang menyelam ke Bahoi adalah turis asing dan kami tidak mampu berkomunikasi baik dengan mereka karena keterbatasan kemampuan Bahasa Inggris ini”. (Informan S.6 dan S.7).

Menurut Informan S.10, S.11, S.12, S.13 dan S.14 kapasitas SDM yang dirasa masih sangat kurang adalah kapasitas dalam manajemen pengelolaan atau kelembagaan, sedangkan kapasitas SDM kelompok dalam hal melaksanakan koservasi lingkungan dipersepsikan sudah cukup baik dikarenakan sudah mendapatkan pendampingan yang memadai dari LSM pendamping pada program PNPM LMP yang berlangsung selama lima tahun, yaitu tahun 2009-2012. Sedangkan menurut informan S.5 dan S.8 kapasitas SDM yang dirasakan masih sangat kurang adalah pengelolaan *homestay*.

“Kayaknya hanya tim diving yang punya kapasitas cukup dalam arti teknis. Kalau pengurus lainnya kapasitas SDMnya masih sangat kurang, penguatan kelembagaan juga masih sangat kurang. Kapasitas SDM ini menjadi titik lemah dari pengelolaan ekowisata di Bahoi. Kalau bagaimana melindungi terumbu karang mereka sudah mahir, namun bagaimana menjalankan organisasi masih sangat lemah dan perlu penguatan. Penguatan SDM inilah yang dulu tidak kami sentuh dan sekarang terasa sangat penting akibat banyak terjadi konflik sosial antar kelompok akibat lemahnya manajemen koordinasi dan pengelolaan antar kegiatan: DPL, ekowisata, homestay, handicraft, dsb”. (Informan S.10)

1.g. Kendala dan Tantangan dalam Pengelolaan Ekowisata di Desa Bahoi

Untuk mengetahui perihal kendala-kendala dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kelompok pengelola ekowisata di Desa Bahoi diajukan pertanyaan kepada para informan: *“Apakah aspek utama yang menjadi kendala utama atau tantangan utama dalam pengelolaan ekowisata di Desa Bahoi?”*

Informan S.1 memberikan keterangan bahwa kendala utama dalam pengelolaan ekowisata di Desa Bahoi adalah masih kurangnya infrastruktur jalan yang memadai dan pembinaan yang masih kurang dari Instansi Pemerintah Daerah, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan pemasaran atau promosi wisata. Sedangkan informan S.2, hingga S.9 menyatakan bahwa kendala utama saat ini dalam pengelolaan ekowisata adalah tidak adanya biaya pemeliharaan untuk sarana/peralatan, sehingga beberapa peralatan utama mengalami kerusakan, seperti perahu motor dan beberapa peralatan selam. Minimnya pengetahuan kelompok pengelola ekowisata terhadap sistem manajemen pengelolaan ekowisata yang baik ini dikarenakan pelatihan yang selama ini diperoleh masih jauh dari mencukupi.

“Untuk kendala infrastruktur jalan, bersyukur sekarang dari Bupati sudah membantu pengerasan jalan Desa, meskipun belum sampai diaspal. Disamping itu kemampuan SDM kami adalah juga merupakan kendala utama. Disamping

teknik guide yang baik, kemampuan promosi/pemasaran maka kendala infrastruktur jalan ke desa Bahoi adalah kendala tersendiri". (Informan S.2)

Sedangkan informan S.10, S.11, S.12, S.14, S.15, S.16 dan S.17 memberikan informasi yang relatif sama, yaitu bahwa kendala dan tantangan utama pengelolaan ekowisata di Desa Bahoi adalah minimnya kemampuan SDM dalam pengelola ekowisata, baik dalam hal berkoordinasi antar Pemerintah Desa, bekerjasama dengan Kelompok DPL, pengelolaan *homestay*, pengelolaan administrasi pembukuan keuangan, kapasitas komunikasi dan bahasa asing (terutama Bahasa Inggris) dan serta kemampuan dasar manajemen organisasi.

Adanya 3 kelompok di Desa yang sebenarnya secara bersama-sama memanfaatkan keindahan dan kekayaan sumber daya alam laut, yaitu kelompok pengelola DPL, kelompok ekowisata dan kelompok pengelola *homestay* diakui oleh semua informan bahwa pada kenyataannya di lapangan ketiga kelompok tersebut berjalan secara sendiri-sendiri, tanpa arahan yang jelas, tanpa payung dan koordinasi serta pembinaan yang jelas dari Pemerintahan Desa. Kelompok pengelola *homestay* dituding paling banyak mengambil keuntungan atau manfaat langsung dari jasa penginapan pengunjung ekowisata yang menginap atau bermalam di Desa Bahoi, sedangkan kelompok pengelola ekowisata juga dituding mendapatkan manfaat langsung dari jasa pelayanan wisata selam atau *snorkling*. Di lain pihak kelompok pengelola DPL merasa tidak pernah mendapatkan manfaat langsung secara ekonomi dari kunjungan wisatawan ke Desa Bahoi, meskipun kelompok ekowisata pada dasarnya memanfaatkan kawasan DPL sebagai lokasi *spot diving/snorkling* untuk setiap kunjungan wisatawan ekowisata yang berkunjung di Desa Bahoi.

“Kita dulu terlalu konsentrasi pendampingan-pendampingan yang bersifat teknis dan fisik, seperti membuat batas-batas DPL, pelatihan ekosistem terumbu karang dsb, ternyata masalah utamanya ada di non teknis, yaitu masalah SDM, sehingga terjadi konflik sosial antar kelompok di Desa Bahoi, yang itu terlambat kita antisipasi. Masalah koordinasi belum juga terselesaikan hingga sekarang antara kelompok DPL dan ekowisata”, (Informan S.10)

1.h. Mengatasi Kendala dan Tantangan di Bidang SDM Ekowisata

Untuk mengetahui bagaimana kendala dan tantangan dalam bidang SDM yang dihadapi oleh pengelola ekowisata di Desa Bahoi kepada para informan diajukan pertanyaan: *“Langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan oleh pihak terkait dengan kendala kapasitas SDM Pengelola ekowisata di Desa Bahoi? Bagaimana peran bantuan dan dukungan dari Pemerintah Desa, LSM, Instansi Pemda atau pihak lainnya? Apakah dukungan tersebut dirasa mencukupi atau masih jauh dari harapan?”*

Terkait dengan bagaimana dan apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dan tantangan di bidang SDM dalam pengelolaan ekowisata di Desa Bahoi, informan S.1 memberikan keterangan bahwa selama ini yang dilakukannya adalah dengan melobi kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk mendapatkan pembinaan dan pengembangan kemampuan SDM untuk pengelola ekowisata di Desa Bahoi, namun hingga saat wawancara dilakukan hal tersebut belum ada bantuan yang direalisasikan.

“Untuk pengembangan produksi dan promosi kerajinan pemerintah Desa Bahoi sudah minta dukungan Dinas Pariwisata dan Deperindag untuk membantu pengembangan usaha produksi kerajinan di Desa Bahoi, namun belum direalisasikan. Pemerintah Desa baru mendapat bantuan dari Kabupaten (Dinas PU) pengerasan jalan desa, meskipun belum diaspal (hotmix) tapi dirasakan sudah cukup banyak membantu. Sedangkan untuk peningkatan kapasitas SDM selama ini kami baru mendapatkan dari teman-teman LSM”. (Informan S.1)

Sementara itu informan S.2 dan S.3 dengan sangat tegas memberikan keterangan bahwa untuk mengatasi kendala berupa kapasitas SDM kelompok pengelola mereka selalu meminta langsung bantuan dan bimbingan kepada LSM pendamping, yaitu WCS, Yapeka dan Celebio. Permintaan bantuan tersebut diantaranya berupa penguatan-penguatan SDM dan kelembagaan, baik untuk kelompok ekowisata maupun kelompok pengelola DPL.

“Selama ini kami banyak dibantu oleh teman-teman dari LSM yang selalu mendampingi kami di lapangan. Untuk tim diving mereka pernah mendapat pelatihan dari Dragon net Diving Centre, di Malalayang (Manado), dan sudah mendapatkan sertifikat diving Scuba School International. Kemudian mereka juga pernah mendapatkan pelatihan dari WCS tentang ekosistem terumbu karang, jenis-jenis ikan dan karang. Pihak Pemda juga sudah membantu perbaikan jalan desa, pembangunan dermaga, dan sarana pendukung lain seperti pondok wisata (gazebo)”.

Hal ini dibenarkan oleh informan S.10, S.11, S.12, S.13 dan S.14 yang menyatakan bahwa LSM dalam hal ini WCS, YAPEKA maupun CELEBIO selama masa pendampingan program hanya mampu memfasilitasi penguatan SDM dan kelembagaan kelompok dalam bidang teknis lingkungan dan konservasi sesuai dengan kapasitasnya sebagai LSM lingkungan dan sangat sedikit melakukan penguatan di bidang manajemen SDM ekowisata dengan melibatkan personil dari perguruan tinggi dan lembaga pendidikan setempat, seperti Universitas Sam Ratulangi dan Politeknik Negeri Manado. Namun demikian hal itu dirasakan oleh para informan tersebut masih jauh dari harapan untuk meningkatkan kapasitas SDM terutama di bidang manajemen pengelola ekowisata di Desa Bahoi. Bahkan informan S.10 memberikan keterangan bahwa konflik atau kecemburuan sosial yang saat ini terjadi antara kelompok pengelola ekowisata, kelompok pengelola DPL dan pengelola *homestay* akibat dari

kurangnya penguatan kapasitas SDM yang diberikan oleh program selama pendampingan berlangsung.

“Sebenarnya yg telah kami lakukan sudah cukup banyak, ada pelatihan alternative livelihood untuk mencegah mereka mengambil ikan di laut di wilayah DPL dan terumbu karang. Pelatihan monitoring terumbu karang, pelatihan diving, pelatihan guide, homestay, handicraft, dsb. Tapi pelatihan manajemen untuk meningkatkan kapasitas SDM memang masih sangat kurang kami lakukan. Akibatnya masing-masing kelompok tersebut berjalan sendiri-sendiri. Sekarang kami sedang menggodok SOP yang mengatur koordinasi antar kelompok tersebut supaya tidak jalan sendiri-sendiri, tapi masih belum selesai. Rencananya SOP ini nanti akan dimusyawarahkan dulu dengan kelompok dan kepala desa di Baho. (Informan S.10)



Foto 4.9

Suasana FGD dengan para informan dari LSM pendamping WCS, Yapeka dan Celebio di Kantor WCS Manado pada Tanggal 29 September 2014

Sedangkan informan S.8 memberikan informasi bahwa yang bersangkutan mengatasi kapasitas SDM dalam mengelola *homestay* dengan berusaha untuk memperbaiki ketrampilan dalam pengelolaan *homestay* secara informal atau pendekatan pribadi, yaitu mengundang dan bertanya langsung kepada salah satu karyawan Resort bagaimana teknik atau pengetahuan dasar melakukan pelayanan penginapan kepada tamu atau wisatawan yang menginap di *homestay*, meliputi cara berkomunikasi, menjaga kebersihan kamar dan fasilitas kamar mandi,

pelayanan makanan dan menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan *homestay* agar pengunjung merasakan pelayanan yang memadai. Namun demikian usaha tersebut dirasa belum cukup dan informan tersebut mengharapkan untuk mendapatkan pelatihan pengelolaan *homestay* yang lebih memadai. Sedangkan informan S.5 yang juga merupakan pemilik *homestay* bahkan sama sekali belum pernah mendapatkan pelatihan baik informal maupun formal tentang manajemen pengelolaan *homestay*. Informan tersebut selama ini hanya berusaha mendapatkan pengetahuan dimaksud dengan berdiskusi dengan informan S.8 yang dipandang lebih mengetahui dan lebih berpengalaman menerima tamu yang menginap di Desa Bahoi.

“Untuk homestay, dulu Ibu Konstanti pernah mendapat pengarahan dari pemilik resort yang ada di Bitung (Resort Batu Putih). Rencana di Bahoi akan dipersiapkan 10 rumah homestay. Meskipun yang saat ini siap baru 6 rumah. Sebenarnya yg dibutuhkan turis yang bermalam di homestay bukan kemewahan fasilitas, tapi mereka hanya membutuhkan kamar dan kamar mandi yang bersih dan rapi, juga makan yang khas lokal yang sehat. Nach, ketrampilan untuk memenuhi pelayanan yang diminta turis itulah yang diperlukan, dan saat ini kami belum mempunyai panduan untuk itu. Untuk pengembangan produksi dan promosi kerajinan pemerintah Desa Bahoi sudah minta dukungan Dinas Pariwisata dan Deperindag untuk membantu pengembangan usaha produksi kerajinan di Desa Bahoi”.(Informan S.1)

2. Kondisi Ideal SDM Pengelolaan Ekowisata di Desa Bahoi

Untuk mendapatkan gambaran kondisi ideal terutama SDM pengelola ekowisata di Desa Bahoi diajukan 6 pertanyaan penelitian kepada para informan pada forum FGD di Desa Bahoi seperti digambarkan pada foto 4.10, serta wawancara dengan pakar yang hasilnya disajikan pada rangkuman berikut.



Foto 4.10

Suasana FGD dengan informan Kepala Desa, Kelompok Pengelola Ekowisata dan Pengelola DPL Desa Bahoi di Kantor Desa Bahoi, Kabupaten Minahasa Utara pada Tanggal 2 Oktober 2014.

2.a. Organisasi Ideal Pengelola Ekowisata di Desa Bahoi

Untuk mengetahui kondisi yang ideal SDM seperti apa seharusnya bagi pengelola ekowisata di Desa Bahoi diajukan pertanyaan penelitian kepada para informan: *“Setelah mengetahui kondisi SDM saat ini kelompok pengelola ekowisata di Desa Bahoi, menurut pendapat anda bagaimana seharusnya struktur dan komposisi SDM pengelola ekowisata di Bahoi?”*

Informan S.10, S.16, dan S.17 memberikan informasi bahwa organisasi pengelola ekowisata harus terintegrasi dengan kelompok lain yang terkait dengan pengelolaan pesisir di Desa Bahoi, yaitu kelompok pengelola DPL. Hal ini sangat penting untuk menghindari konflik antar kelompok pengelola ekowisata dan pengelola DPL yang menjadikan suasana kontra produktif sehingga tujuan pengelolaan DPL maupun ekowisata untuk kesejahteraan masyarakat bisa lebih terarah. Namun demikian diperlukan payung dan tokoh perekat yang disegani oleh kedua kelompok pengelola yang sama-sama dari anggota masyarakat setempat. Tokoh alternatif yang paling disegani adalah Pendeta, sedangkan tokoh formal juga harus dilibatkan dalam hal ini Kepala Desa Bahoi. Organisasi payung

ini juga seharusnya menarik kedalam kelompok pengelola *homestay* dan usaha produksi *handycraft*. Dengan demikian semua pendapatan baik dari hasil jasa kunjungan wisatawan berupa wisata selam/*snorkling*, jasa penginapan maupun hasil penjualan kerajinan dikelola secara bersama dan transparan untuk kesejahteraan bersama masyarakat di Desa Bahoi.

“Ekowisata di Desa Bahoi ini kan program pemberdayaan masyarakat. Idealnya program yang berjalan harus mampu memberikan manfaat ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Desa. Namun memang hal ini tidak mudah untuk diimplementasikan di lapangan. Seringkali apabila suatu program berhubungan dengan pendapatan (uang) akan menimbulkan konflik sosial di antara kelompok masyarakat yang ada di Desa, hal ini mungkin terjadi di Bahoi juga. Salah satu cara untuk meminimalisir hal tersebut adalah dengan melibatkan Tokoh setempat yang disegani dan dihormati semua pihak, dan Seorang Tokoh Adat atau Tokoh Agama (Pendeta) bisa menjadi alternatif pilihan yang terbaik. Apabila semua permasalahan dimusyawarahkan secara adat atau ditengahi Pendeta di Gereja biasanya permasalahan di Desa itu bisa akan cepat selesai”. (Informan S.16).

Selain pengelolaan terpadu antara DPL dengan Ekowisata, menurut keterangan dari informan S.17 pengelolaan ekowisata di Desa Bahoi ini harus dikelola secara profesional sesuai dengan kaedah pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat. Pengelolaan ekowisata laut harus mempunyai kemampuan dasar-dasar pengetahuan ekowisata, manajemen operasional ekowisata, manajemen *homestay* serta mengelola wisata *diving*.

*“Untuk mengelola ekowisata yang baik para pengurus atau kelompok harus mengetahui dan memahami pengetahuan dasar-dasar ekowisata, manajemen operasional ekowisata, pemanduan wisata *diving* dan manajemen dasar pelayanan hotel non bintang atau *homestay*. Tatakelola ekowisata yang berbasis masyarakat tentu saja berbeda dengan tata kelola pariwisata umum yang menggunakan standar hotel berbintang. Karena konsep pengelolaan ekowisata laut yang berbasis masyarakat seperti di Bahoi ini adalah konsep pariwisata minat khusus yang harus dikelola secara hati-hati dengan mempertimbangkan daya dukung ekologi lautnya serta kearifan lokal masyarakat Desa itu sendiri. Sehingga pengelolaannya harus dengan pendekatan *konservasi* namun bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat di Desa Bahoi”.* (Informan S.17)

2.b. Perubahan Organisasi SDM Pengelola Ekowisata

Untuk mengetahui sejauh mana perubahan organisasi yang diperlukan sehingga pengelolaan ekowisata di Desa Bahoi menjadi lebih optimal kepada para informan diajukan pertanyaan: *“Kira-kira perlu penambahan personil apa atau bagaimana perubahan komposisi SDM kelompok pengelola ekowisata di Desa Bahoi yang lebih baik atau ideal ?”*

Informan S.10 memberikan informasi bahwa untuk melakukan perombakan personil hal yang paling mendesak adalah mempersiapkan terlebih dahulu sistem tata kelola pengelolaan pesisir di Desa Bahoi, atau sejenis SOP (Standar Prosedur Operasi). Apabila sistem sudah mantap maka baru kemudian dilakukan perubahan organisasi kelompok dengan menyesuaikan sistem yang sudah dibentuk tersebut.

Apabila diperlukan personel tambahan pada kelompok ini maka yang diperlukan adalah personel bidang pemasaran. Personel ini diharapkan mampu memperluas pasar dengan menjalin hubungan kerjasama dengan jaringan pemasaran ekowisata lain di Sulawesi Utara dan atau dengan agen perjalanan guna meningkatkan kunjungan wisatawan. Personel ini juga diharapkan mampu menjalankan posisi sebagai kontak person tunggal bagi calon wisatawan yang berminat akan mengunjungi ekowisata ke Desa Bahoi. Dengan demikian seluruh kunjungan wisatawan bisa melalui satu pintu dan bisa dikoordinasikan dengan lebih baik. Selain itu Bendahara kelompok DPL dan kelompok ekowisata yang saat memiliki bendahara masing-masing hendaknya disatukan menjadi satu bendahara saja sehingga lebih terkoordinasi dengan baik serta lebih mudah dalam pengawasan.

“Sebelum merombak kepengurusan sebaiknya dipersiapkan terlebih dulu SOP atau sistem pengelolaannya. Perubahan personil dimusyawarahkan dengan tokoh adat dan tokoh agama di Desa. Hukum Tua sebaiknya hanya berfungsi sebagai pembina dan penasehat saja. Karena biasanya tokoh adat atau tokoh agama lebih netral dan bisa diterima semua pihak”. (Informan S.10)

2.c. Pemenuhan Kebutuhan SDM untuk Pengelola Ekowisata di Desa Bahoi

Untuk mengetahui bagaimana sebaiknya pemenuhan kebutuhan SDM kelompok pengelola di Desa Bahoi kepada para informan dan nara sumber diajukan pertanyaan: *“Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang ideal bagi kelompok ekowisata di Desa Bahoi bagaimana sebaiknya strategi pemenuhan kebutuhan SDM nya, Apakah perlu direkrut personel dari luar Desa? Atau personel tetap dari Desa setempat dengan dilatih atau ditingkatkan kapasitas tertentu?”*

Semua informan dan narasumber mulai dari informan S.1 hingga S.17 umumnya menjawab bahwa pemenuhan kebutuhan SDM ekowisata di Desa Bahoi harus tetap dipenuhi dari masyarakat dari Desa Bahoi sendiri, dikarenakan pengelolaan ekowisata di Desa Bahoi ini adalah ekowisata berbasis masyarakat. Namun untuk dapat mengelola ekowisata desa yang lebih baik anggota masyarakat yang tergabung dalam pengurus kelompok pengelola ekowisata harus dilatih secara memadai baik teknis lingkungan konservasi maupun kemampuan manajemen organisasi serta pengembangan kelembagaan.

“Kunci utama keberhasilan dari program ekowisata ini adalah membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi laut yang bisa dikelola sebagai ekowisata dan mendatangkan manfaat secara ekonomi, dan peran LSM adalah untuk menumbuhkan motivasi tersebut. Menurut saya karena ini program pemberdayaan masyarakat maka anggota kelompok pengelola harus mutlak dari Desa itu sendiri, namun tetap harus didampingi oleh LSM di lapangan.(Informan S.16)

2.d. Pelatihan SDM yang Diperlukan Pengelola Ekowisata di Desa Bahoi

Khusus mengenai kebutuhan pelatihan apa saja yang diperlukan oleh kelompok pengelola ekowisata di Desa Bahoi pertanyaan yang diajukan kepada para informan adalah; “*Program pelatihan apa saja yang diperlukan oleh SDM kelompok pengelola ekowisata di Bahoi agar memiliki kompetensi dan kapasitas yang mencukupi?*”

Para Informan yang berasal dari kelompok pengelola ekowisata menjawab bahwa kebutuhan pelatihan cukup beragam sesuai dengan yang dirasakan dan dialami masing-masing. Informan S.6 dan S.7 menjawab bahwa pelatihan yang paling dibutuhkan adalah pelatihan atau kursus Bahasa Inggris dan pelatihan pemandu selam (*diving*) hingga kualifikasi *Rescue Diving* atau *Dive Master*. Hal ini sangat diperlukan menurut mereka dikarenakan sebagian besar wisatawan yang datang ke Desa Bahoi adalah wisatawan manca negara yang bertujuan untuk menyelam (*diving*) atau *snorkling* dan keamanan menyelam adalah harga mati sehingga dibutuhkan pemandu wisata yang sudah mengantongi sertifikat menyelam kualifikasi minimum *rescue diving* atau idealnya kualifikasi *dive master*.

Sedangkan informan S.1 dan S.2 menjawab bahwa pelatihan yang sangat penting bagi kelompok pengelola adalah manajemen pengelolaan pariwisata, terutama dasar-dasar manajemen administrasi pengelolaan keuangan dan pemasaran. Menurut kedua informan ini dan juga dikuatkan oleh informan S.5 dan S.8 bahwa pelatihan manajemen *homestay* juga sangat dibutuhkan, terutama manajemen pelayanan (*hospitality*), layanan makanan/kuliner dan pemasaran.

“Kami perlu pelatihan bagaimana melayani tamu (manajemen homestay), program pemasaran, atau pelatihan manajemen lainnya. Untuk diving juga perlu pelatihan lanjutan (tidak hanya pelatihan dasar). Sebenarnya banyak tamu asing yang akan bermalam di Desa, tapi kesiapan homestay di sini masih sangat kurang. Apabila semua siap, saya yakin industri kuliner akan tumbuh di masyarakat Desa. Hal lain yang diperlukan adalah produksi kerajinan. Bahan baku melimpah di desa (kelapa), namun jenis dan variasi produk kerajinan masih minim. Kalau produk kerajinan ini sudah mantap tinggal dipikirkan pemasarannya nanti.” (Informan S.2)

2.e.Dukungan Instansi Pendidikan dalam Peningkatan SDM Pengelola Ekowisata di Desa Bahoi

Untuk mendalami bagaimana bentuk dukungan instansi pendidikan setempat dalam program peningkatan kapasitas SDM pengelola ekowisata di Desa Bahoi diajukan pertanyaan kepada para informan sebagai berikut: *“Bagaimana strategi untuk melibatkan partisipasi instansi pendidikan atau pelatihan di luar kabupaten Minahasa Utara guna memenuhi kebutuhan SDM kelompok pengelola ekowisata di Des Bahoi?”*

Secara khusus informan S.16 dan S.17 menyatakan bahwa bentuk dukungan yang selama ini dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi sangat terbatas, diantaranya melalui program pengabdian masyarakat, namun program ini dananya sangat terbatas dan biasanya melibatkan mahasiswa untuk praktek atau magang di tempat seperti misalnya Desa Bahoi. Tentu saja hal ini tidaklah mencukupi bagi peningkatan kapasitas SDM pengelola ekowisata di Desa Bahoi. Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang ideal bagi kelompok pengelola ekowisata di Desa Bahoi perlu menggandeng pihak lain, terutama LSM pendamping yang memiliki akses pendanaan dari berbagai donor atau dana bantuan hibah dari luar negeri. Apabila hal ini dilaksanakan dan direncanakan dengan baik maka cukup untuk menyelenggarakan pelatihan formal peningkatan kapasitas SDM bagi kelompok ekowisata di Desa Bahoi.

“Universitas Sam Ratulangi Fakultas Kelautan dan Perikanan biasanya menjalin kerjasama dengan Pemerintah dan LSM dalam beberapa program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Sulawesi Utara ini. Seperti halnya pada proyek CMRP tahun 2000 -2002 lalu dengan Bappenas (Proyek Pesisir), kami diminta untuk memberikan pelatihan survey potensi, monitoring terumbu karang dan konservasi DPL berbasis masyarakat. Untuk program dari universitas sendiri kami sangat terbatas dananya sehingga hanya ada pos pada penelitian dan pengabdian masyarakat, namun itu jumlahnya sangat terbatas”.(Informan S.16)

Selanjutnya informan S.17 secara khusus menyebutkan bahwa kelompok pengelola ekowisata yang berasal dari masyarakat ini bisa mendapatkan paket pelatihan secara formal berupa paket pendidikan berupa program pelatihan manajemen pariwisata secara khusus oleh Lembaga Pendidikan yang berkompeten yang ada di Manado, yaitu: Sekolah Politeknik Negeri Manado yang memiliki program studi Manajemen Pariwisata dan Ekowisata Laut. Dengan mendapatkan program pendidikan yang memadai tersebut diharapkan kelompok pengelola ekowisata di Desa Bahoi akan mampu menjalankan tugas dan fungsinya guna mencapai tujuan yang diharapkan.

“Politeknik Negeri Manado siap memberikan kursus dan pelatihan yang diperlukan bagi peningkatan kapasitas SDM pengelola ekowisata seperti di Desa Bahoi ini. Kami memiliki program studi Manajemen Pariwisata yang mampu memberikan penguatan kapasitas dalam manajemen hospitality, tata boga, standar pelayanan hotel berbintang dan non bintang (kelas melati/homestay), pelatihan guide atau pemandu wisata. Kami juga memiliki program studi ekowisata laut yang bisa menyediakan pelatihan diving hingga level dive master (dive 4) maupun level instructor (dive 5). Pelatihan diving Politeknik Negeri Manado bermitra dengan SSI (Scuba School International) sehingga sertifikatnya diakui secara internasional”. (informan S.17)

2.f. Program Pendampingan yang Diperlukan untuk Pengelola Ekowisata di Desa Bahoi

Untuk mendalami program apa yang diperlukan bagi pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat di Desa Bahoi diajukan pertanyaan kepada para

informan: “*Selain pelatihan-pelatihan secara formal, bagaimana bentuk bantuan teknis atau pendampingan LSM yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas SDM ideal bagi kelompok pengelola ekowisata di Desa Bahoi ?*”

Informan S.1 hingga S.8 dan S.15, S.16 serta S.17 sepakat menjawab bahwa untuk mengawal program pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat di Desa Bahoi masih sangat diperlukan fasilitasi dan pendampingan intensif di lapangan oleh LSM, seperti yang selama ini sudah dilakukan. Pendampingan ini diperlukan untuk terus menjaga motivasi masyarakat dan pemberdayaan kelompok hingga suatu titik tertentu di mana kelompok masyarakat yang ada di Desa bisa mengelola ekowisata secara mandiri. Keberadaan pendampingan LSM juga diperlukan untuk mengawal pengelolaan yang mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas.

“*Keberadaan fasilitator pendamping dari PNPM dan WCS, YAPEKA, CELEBIO sangat kami rasakan manfaatnya. Kami tidak bisa membayangkan apabila dulu mereka tidak ada dan tidak mendampingi kami selama program berlangsung. Hampir semua permasalahan di Desa ini selalu kami mintakan nasihatnya kepada LSM*”. (Informan S.2).

“*Peran langsung lembaga pendidikan seperti kami untuk terjun langsung pada program berbasis masyarakat sangat terbatas, hanya pada program Bakti Sosial saja. Namun demikian hal itu sangat kecil dan tentu saja tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Untuk itu peran LSM sangat diperlukan untuk memenuhi gap tersebut. LSM juga lebih fleksibel dalam peranannya sebagai fasilitator masyarakat di lapangan dan biasanya memiliki jaringan akses pendanaan yang memadai*” (Informan S.17).

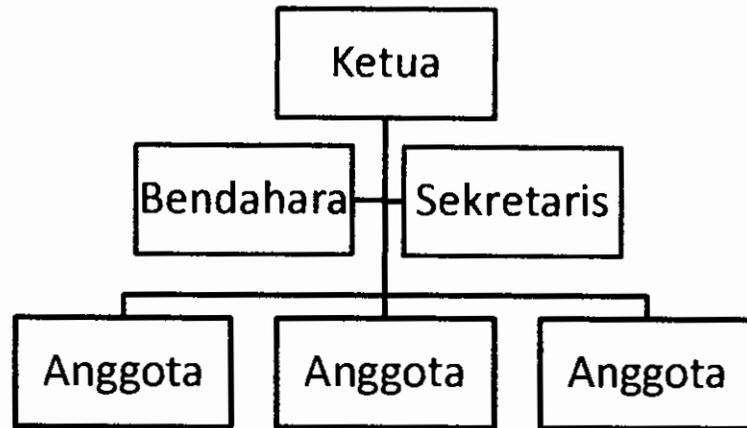
C. Pembahasan

1. Kondisi Existing SDM Pengelola Ekowisata di Desa Bahoi

Dari hasil penelitian di lapangan, baik dari studi literatur, observasi maupun wawancara terhadap para informan ditemukan fakta bahwa kelompok pengelola ekowisata di Desa Bahoi dibentuk pada tahun 2010 hasil dari

musyawarah desa dan kepengurusannya serta pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Desa dan Surat Keputusan Kepala Desa/Hukum Tua. Pengurus inti yang terdiri dari satu orang ketua, satu orang sekretaris dan satu orang bendahara merupakan penyederhanaan atau melanjutkan kepengurusan lama Tim Pengelola Kegiatan (TPK) program PNPM LMP yang memang dibentuk oleh program berdasarkan musyawarah di desa secara partisipatif. Tiga pengurus inti kemudian dilengkapi dengan 9 orang anggota yang kesemuanya adalah pemandu wisata (*guide*) untuk wisata selam dan *snorkling*. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 9 anggota tersebut saat ini hanya 6 orang yang aktif, dikarenakan 5 orang lainnya sudah pindah atau bekerja di luar desa.

Melihat dari struktur organisasi kelompok pengelola wisata ekowisata di Desa Bahoi maka struktur organisasi kelompok pengelola ekowisata dapat dikategorikan kedalam struktur organisasi sederhana. Menurut Robbin (sebagaimana dikutip dalam Ratmawati, 2012:7.9) struktur organisasi sederhana sebagaimana pada gambar 4.2 bercirikan tingkat departemenisasi sederhana, rentang kendala yang luas, wewenang yang dipusatkan pada satu orang dan formalisasi yang rendah. Selanjutnya disebutkan bahwa struktur organisasi sederhana mempunyai kekuatan cepat dalam pengambilan keputusan, namun memiliki kelemahan apabila organisasi berkembang menjadi lebih besar.



Bagan 4.2
Struktur Organisasi Kelompok Pengelola Ekowisata di Desa Bahoi

Komposisi kepengurusan kelompok pengelola ekowisata di Desa Bahoi sebagaimana pada tabel 4.2 hingga saat ini diketuai oleh Hans Lahamendu, tokoh masyarakat yang dituakan di Di Desa Bahoi yang usianya sekitar 70 tahun. Meskipun sebenarnya sudah beberapa kali mengusulkan pergantian pengurus dikarenakan kondisi usia dan kesehatan yang semakin menurun namun musyawarah desa tetap menghendaki dan memutuskan tokoh masyarakat tersebut menjadi ketua kelompok. Kondisi serupa juga terjadi pada penunjukan pengurus bendahara dan sekretaris. Bendahara dan sekretaris kelompok pengelola ekowisata ditunjuk personil yang sama atau melanjutkan jabatan kedua personil sebelumnya yang bertindak sebagai bendahara dan sekretaris Tim Pengelola program Kegiatan (TPK) PNPM LMP.

Dasar pertimbangan pemilihan pengurus inti yang terdiri dari ketua, bendahara dan sekretaris ini menurut keterangan dari informan S.1 seperti disajikan pada foto 4.10 lebih disebabkan pertimbangan segi kepraktisan saja, bahwa mereka telah mengetahui dan melaksanakan kegiatan ekowisata sebelumnya bersama program PNPM LMP di Desa Bahoi. Hal ini sebenarnya

tidak sesuai dengan penerapan teori analisis kebutuhan SDM yang berbasis kompetensi. Menurut Noe *et al* (sebagaimana dikutip dalam Iswanto, 2011: 1.50) seorang eksekutif SDM yang profesional adalah SDM yang mempunyai 4 kompetensi dasar untuk dapat menjadi mitra bagi perencanaan strategik SDM, yaitu kompetensi bisnis, artinya SDM harus menguasai bisnis perusahaan dan memahami finansial dan ekonomi perusahaan; kompetensi teknis dalam aspek SDM, antara lain memahami proses rekrutmen dan seleksi, pelatihan, pengembangan, penghargaan, desain organisasi, penilaian kinerja dan program penghargaan; kompetensi manajemen perubahan, seperti mendiagnosis masalah, melaksanakan perubahan organisasional, mengevaluasi hasil, mengelola konflik dan membawa keberhasilan perubahan; dan kompetensi integrasi, yaitu memiliki kemampuan mengintegrasikan ketiga kompetensi terdahulu untuk meningkatkan kinerja organisasi atau perusahaan. Hal ini juga tidak sesuai dengan persyaratan eksekutif organisasi menurut Greer (sebagaimana dikutip dalam Iswanto, 2011: 2.7) menyatakan persyaratan personal yang akan melaksanakan fungsi *strategic* SDM harus memiliki 5 keahlian manajemen, yaitu manajemen informasi, seperti riset, analisis dan statistik; manajemen perencanaan; manajemen bisnis dan lingkungan; kemampuan integrasi, dan manajemen perubahan.



Foto 4.11.

Suasana Wawancara dengan Informan S.1. di Desa Bahoi pada Tanggal 30 September 2014.

Selama diangkat menjadi pengurus inti kelompok ekowisata di Desa Bahoi, ketiga personil baik ketua, bendahara maupun anggota merasa tidak memiliki kapasitas SDM yang cukup untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengelola kegiatan ekowisata di Desa Bahoi. Hal ini dikarenakan kurangnya mereka mendapatkan *capacity building* berupa pelatihan-pelatihan penguatan kelembagaan dan kemampuan organisasi atau manajerial baik dari Instansi Pemerintah Kabupaten sebagai pembina maupun dari LSM pendamping. Kurangnya penguatan kapasitas SDM kelompok pengelola ekowisata ini dikuatkan dengan keterangan informan S.10, S.11, S.12, S.13 dan S.14 bahwa memang selama dibentuk pada tahun 2010 pelatihan atau *capacity building* untuk peningkatan SDM yang diberikan kepada kelompok ekowisata sangat minim.

Peningkatan kapasitas SDM dilakukan terbatas hanya pada pelatihan menyelam tingkat dasar dan prosedur/ tata cara penyusunan Peraturan Desa serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Sebagian besar *capacity building* dan *awareness* yang telah diberikan oleh LSM pendamping kepada kelompok pengelola ekowisata dan DPL di Desa Baho di adalah pelatihan yang bersifat teknis, yaitu konservasi terumbu karang dan hutan mangrove.

Hal sedikit berbeda terjadi pada pemilihan anggota kelompok ekowisata lainnya, yaitu 9 orang yang merupakan pemandu wisata selam/*snorkling* yang dipilih berdasarkan kemampuan teknis berenang dan menyelam di laut. Para anggota pemandu wisata ini adalah personil yang pada tahun 2010 terpilih untuk mengikuti pelatihan dasar selam. Pada saat itu Program PNPM LMP selain memfasilitasi pembentukan kelompok atau kelembagaan ekowisata di tingkat desa juga menyediakan peralatan selam dan *snorkling* lengkap beserta program pelatihan bagi anggota kelompok yang akan diangkat sebagai pemandu wisata selam dan *snorkling*. Pelatihan selam yang diberikan pada saat itu adalah pelatihan tingkat dasar (*basic diving*) dan seluruh 9 anggota telah lulus pelatihan dan mendapatkan sertifikat kualifikasi *basic diving*. Berdasarkan diskusi pada FGD dan wawancara dengan pakar yang dilaksanakan di Desa Baho di dan Manado, informan S.6 dan S.7 memberikan keterangan bahwa sebenarnya sertifikat selam yang diperoleh dari pelatihan dasar hanya bisa dipergunakan untuk menyelam diri sendiri dan tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sebagai pemandu selam. Untuk bisa menjadi pemandu selam, maka pemandu harus memiliki sertifikat menyelam minimum kualifikasi tingkat *rescue diving*, dan idealnya adalah sertifikat kualifikasi *dive master*. Keterangan ini

dibenarkan dan dikuatkan oleh keterangan hasil wawancara dengan pakar informan S.17, bahwa persyaratan untuk menjadi pemandu selam mereka harus memiliki sertifikat menyelam kualifikasi *Rescue Diving* atau idealnya kualifikasi *Dive Master* yang pada kurikulum program ekowisata laut di Politeknik Negeri Manado adalah kualifikasi *Dive 4*.

Seiring dengan perkembangan kegiatan ekowisata di Desa Bahoi, maka kegiatan wisata tidak hanya berupa wisata selam dan *snorkling*, namun kemudian berkembang dan bertambah dengan wisata hutan *mangrove* dan pasir putih. Dengan dukungan bantuan sarana fisik dari Dinas Pariwisata dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Utara kegiatan ekowisata di Desa Bahoi bertambah dengan adanya sarana jalan desa, jembatan, dermaga, *gazebo*, dan bangunan rumah apung. Selain itu dengan semakin banyaknya kunjungan wisatawan, terutama wisatawan asing yang berminat untuk tinggal lebih dari 1 hari maka berkembang usaha penginapan (*homestay*) di Desa Bahoi. Pola kunjungan wisatawan asing ini tidak teratur baik dari jumlah maupun dari waktu kunjungan. Dari hasil catatan yang dikumpulkan dari buku tamu yang ada di salah satu *homestay* milik informan S.8 diperoleh keterangan setiap tahun lebih kurang *homestay* di Desa Bahoi menerima tamu wisatawan asing yang bermalam di desa kurang lebih 100 orang. Wisatawan asing yang pernah berkunjung dan bermalam di *homestay* tersebut antara lain berasal dari negara Swis, Jerman, Belanda, Australia, Ceko dan Perancis.

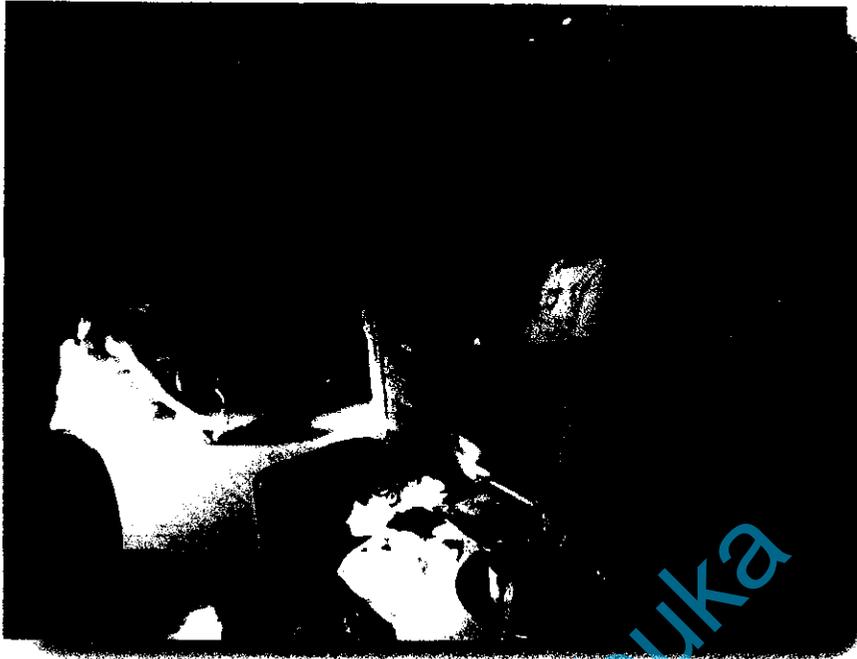


Foto 4.12

Suasana Wawancara dengan Informan pemilik *homestay* (Informan S.8) di Desa Bahoï pada Tanggal 3 Oktober 2014

Berdasarkan keterangan S.8 dan S.3 sebagaimana pada saat wawancara seperti disajikan pada foto 4.12 bahwa kunjungan wisatawan ke lokasi destinasi ekowisata di Bahoï sebenarnya lebih dari 5 kali lipat dari yang tercatat di Buku tamu *homestay*. Kurang tertibnya administrasi atau sistem pencatatan yang baik mengakibatkan hanya sebagian kecil tamu wisatawan saja yang tercatat, baik di buku tamu *homestay* maupun buku tamu yang ada di Kantor Desa. Faktanya sebagian besar tamu yang mengunjungi ekowisata Desa Bahoï menginap di hotel-hotel berbintang yang tersedia di kota Manado. Hal ini dapat dipahami mengingat Desa Bahoï hanya berjarak kurang lebih 60 km dari Kota Manado dan bisa ditempuh dari kota Manado dalam waktu 1 jam perjalanan darat dengan kondisi jalan yang mulus. Untuk wisatawan lokal yang berkunjung ke Bahoï namun tidak

bermalam setiap akhir pekan berkisar 30-40 orang. Menurut informasi dari S.3 dan S.10 mereka biasanya datang secara grup dan berasal dari perusahaan, instansi pemerintah serta TNI/Polri yang ada di sekitar Manado. Biasanya mereka mengunjungi Bahoi untuk menikmati terumbu karang (*diving*) sekaligus wisata memancing di Bahoi pada akhir pekan namun tidak menginap di *homestay*, sehingga kunjungan mereka tidak tercatat di buku tamu *homestay*.



Foto 4.13

Catatan wisatawan yang berkunjung ke Desa Bahoi yang tercatat dalam Buku tamu di *homestay* milik Ibu Konstansi Mancari, foto diambil pada Tanggal 3 Oktober 2014

Para pengelola *homestay* yang ada di Desa Bahoi juga merasakan keterbatasan kemampuan SDM dalam mengelola *homestay* mereka. Pada umumnya mereka belum pernah mendapatkan pelatihan secara formal baik dari LSM pendamping maupun Instansi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara maupun Provinsi Sulawesi Utara. Pengelola *homestay* S.8 secara mandiri dan informal belajar bagaimana mengelola penginapan dan melayani tamu wisatawan dari salah satu sanak keluarganya yang bekerja di sebuah resort di Bitung. Namun

9 pengelola *homestay* lain yang tidak melakukan hal sama seperti yang telah dilakukan pengelola *homestay* S.8. tersebut. Hal ini mengakibatkan setiap tamu yang bermalam di Desa Bahoi, lebih memilih bermalam di *homestay* yang dikelola oleh informan S.8 tersebut dibandingkan 9 *homestay* lainnya. Kenyataan ini mengakibatkan kecemburuan sosial dikarenakan pendapatan dari kunjungan wisatawan yang bermalam di Desa Bahoi hanya dinikmati oleh satu pengelola *homestay* saja.

Dari catatan wisatawan yang berkunjung ke Bahoi, diperoleh fakta lapangan bahwa wisatawan sebenarnya hanya menginginkan pelayanan yang tidak terlalu berlebihan, yaitu aspek kebersihan kamar dan makanan serta ketenangan lingkungan. Khusus untuk ketenangan memang di Desa Bahoi terkenal dengan kebiasaan warganya memutar musik dengan sangat keras dan dilengkapi dengan peralatan *sound system* yang berkekuatan besar, sehingga hal ini dirasakan sebagai hal yang kurang nyaman bagi para wisatawan asing yang bermalam di Desa Bahoi.

Berkembangnya usaha *homestay* di Desa Bahoi kemudian diikuti juga dengan berkembangnya usaha pembuatan cendera mata (*souvenir*). Berbagai produk cendera mata yang sudah diproduksi dan dijual untuk wisatawan yang berkunjung ke Desa Bahoi antara lain adalah kerajinan berbagai bentuk dari bahan tempurung kelapa dan kerang. Namun demikian usaha kerajinan ini nampaknya belum dikelola dengan baik sehingga hasilnya belum optimal.

Dari hasil observasi, wawancara maupun FGD di lapangan diperoleh fakta menarik lainnya, bahwa selain kelompok pengelola ekowisata, di Desa Bahoi juga

ada satu kelompok lain yaitu Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut (DPL). Kelompok ini dibentuk satu tahun lebih awal dari pembentukan kelompok ekowisata, yaitu pada tahun 2009 melalui fasilitasi program PNPM LMP, seperti halnya kelompok ekowisata. Namun demikian pembentukan kelompok secara formal baik ekowisata maupun DPL disahkan melalui Perdes pada tahun yang sama, yaitu tahun 2010. Berbeda dengan kelompok ekowisata, kegiatan kelompok DPL ini adalah menjalankan kegiatan yang berupa menjaga dan melindungi ekosistem laut yang ada di dalam batas wilayah yang telah ditetapkan sebagai DPL.



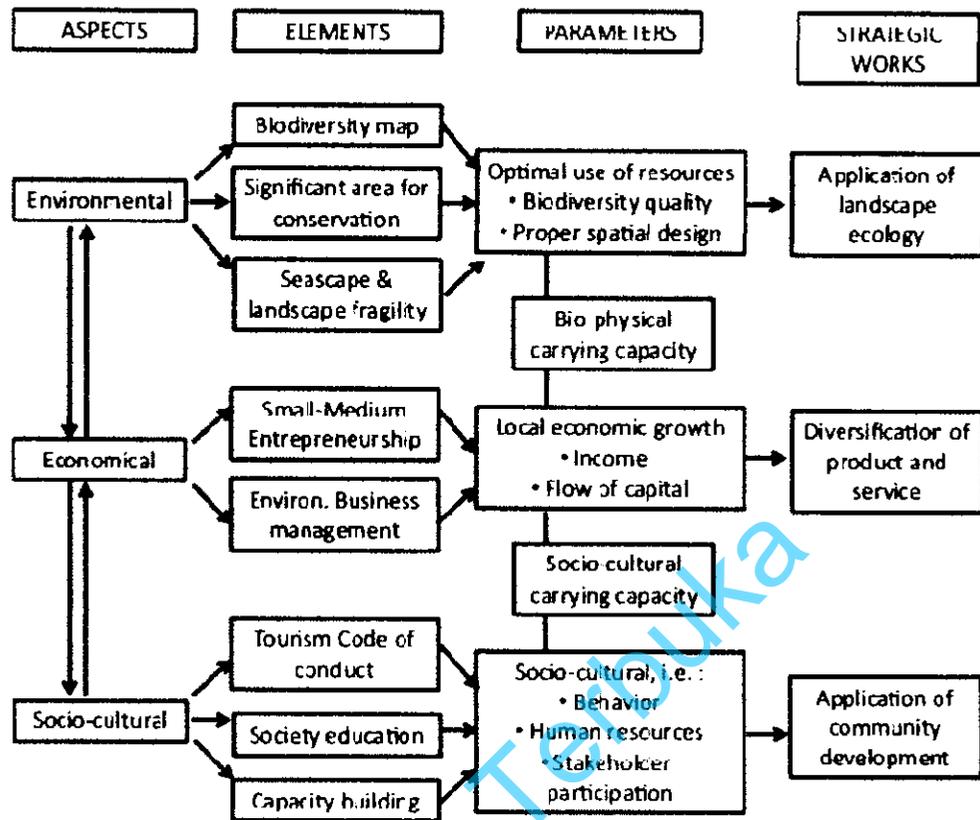
Foto 4.14

Lokasi DPL di Desa Bahoi yang juga merupakan lokasi *spot diving* untuk ekowisata, foto diambil pada tanggal 3 Oktober 2014

Permasalahan sosial muncul antara kelompok pengelola DPL dan kelompok ekowisata, dikarenakan lokasi destinasi ekowisata yang berupa *spot diving* sebagian besar berada pada kawasan DPL. Kelompok DPL merasa bahwa mereka hanya kebagian tugas untuk melindungi dan menjaga kawasan DPL saja, namun pada kenyataannya pihak kelompok ekowisata yang mendapat manfaat

langsung dari keberadaan DPL, berupa pendapatan hasil dari kunjungan wisatawan yang menyelam, serta pendapatan dari penjualan cendera mata dan penginapan (*homestay*). Ketidakterpaduan pengelolaan dua kelompok pengelola berbasis masyarakat di Desa Bahoi ini mengakibatkan kecemburuan sosial, terutama dirasakan oleh kelompok pengelola DPL. Hal ini tidak akan terjadi apabila dibangun integrasi dan koordinasi pengelolaan dua kelompok tersebut yang sama-sama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Bahoi.

Pentingnya aspek pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat yang memberikan manfaat langsung secara sosial dan ekonomi kepada masyarakat setempat ini sesuai rekomendasi penelitian Hakim dkk (2012: 61-71) bahwa dalam pengelolaan ekowisata mengembangkan dan meningkatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) menjadi aspek yang harus dipertimbangkan dan sangat signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan dengan mengembangkan usaha skala mikro/kecil/menengah dalam pengelolaan ekowisata akan mengurangi pengangguran, kemiskinan dan eksploitasi sumber daya alam. Pada skema yang dijelaskan pada bagan 4.3 masyarakat setempat akan menerima manfaat langsung dari pengelolaan ekowisata.



Bagan 4.3.

Skema pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan yang dapat memberi manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat (Sumber : Hakim dkk., 2012:69)

Selanjutnya pada tabel 4.3 disajikan rangkuman yang menggambarkan temuan-temuan perihal kondisi *existing* SDM pengelolaan ekowisata di Desa Banoi beserta permasalahannya pada saat dilakukan penelitian di lapangan.

Tabel 4.3
Kondisi *existing* SDM dan permasalahan kelompok pengelola ekowisata di Desa Bahoi

No	Aspek SDM	Permasalahan & KapasitasSDM
1.	Pengurus inti (Ketua, Bendahara & Sekretaris)	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak pernah berganti sejak tahun 2010 • Tidak pernah mendapat pelatihan kelembagaan/organisasi/manajerial • Dipilih berdasarkan pertimbangan kepraktisan, dan hubungan kekerabatan, bukan berdasarkan kompetensi.
2.	Anggota (Pemandu Selam)	<ul style="list-style-type: none"> • Dari semula 9 tinggal 6 orang yang aktif • Hanya sekali memperoleh pelatihan selam (<i>basic diving</i>) • Belum memiliki sertifikat menyelam tingkat <i>rescue</i> atau <i>dive master</i> • Tidak memiliki kemampuan Bahasa Inggris
3.	Pengelola <i>homestay</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Secara formal belum pernah mendapatkan pelatihan manajemen perhotelan/pariwisata • Belum ada rujukan standar pelayanan <i>homestay</i> • Cukup kesulitan mengatasi kebisingan lingkungan
4	Kelompok <i>handicraft</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Secara formal belum pernah mendapatkan pelatihan (produksi/pemasaran) dari instansi terkait • Belum ada standar mutu produk cendera mata. • Variasi dan kualitas produk masih kurang
5	SDM Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada personil yang khusus menangani promosi/pemasaran ekowisata • Promosi masih sangat tergantung jejaring LSM dan Pameran Pemda
6	Pengelolaan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada standar pencatatan administrasi dan pembukuan keuangan yang tertib • Bendahara dan sekretaris belum mempunyai kapasitas pengelolaan administrasi dan keuangan yang akuntabel
7	Integrasi dengan Kelompok DPL	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan terpisah dan tidak terintegrasi dengan kelompok DPL • Tidak ada payung hukum dan organisasi <i>holding</i> yang mengintegrasikan kedua kelompok

Sumber: Diolah dari hasil temuan lapangan

2. Analisis Kebutuhan SDM Ideal Pengelola Ekowisata di Desa Bahoi

Berdasarkan uraian pada kondisi *existing* SDM kelompok pengelola ekowisata di Desa Bahoi bisa diperoleh fakta bahwa SDM kelompok pengelola ekowisata tersebut masih banyak kekurangan. Keterbatasan kemampuan organisasi dan manajerial menjadi kendala utama, terutama pada posisi pengurus inti, dan pengelolaan *homestay*. Secara filosofi bisnis ketua kelompok pengelola ekowisata bisa dinalogikan seorang manajer puncak suatu organisasi yang bertindak merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan rencana dan melakukan evaluasi sesuai dengan tujuan organisasi. Meskipun kelompok pengelola ekowisata ini adalah berbasis masyarakat idealnya ketua kelompok mempunyai visi sebagai seorang manajer handal suatu perusahaan yang mampu menjalankan perusahaan dalam mencapai tujuan, dalam hal ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi sekretaris dan bendahara pada kelompok yang saat ini ada kurang efektif dan cenderung menjalankan fungsi administratif saja sehingga fungsinya tidak optimum. Sekretaris hanya mengurus surat menyurat, undangan, notulen rapat dan sebagainya. Pada konteks organisasi kelompok ekowisata yang dikelola sebagai organisasi yang berorientasi pada pendapatan atau bisnis, maka fungsi sekretaris yang selama ini dijalankan menjadi rancu dan tidak jelas tugas pokok fungsinya. Justru fungsi kehumasan dan personil yang menangani bidang pemasaran sangat relevan untuk menggantikan peran dan fungsi sekretaris yang selama ini ada dalam organisasi kelompok ekowisata di Desa Bahoi. Seorang staff yang menangani humas dan pemasaran bertugas menjalankan promosi wisata, membangun dan memperluas jaringan pemasaran dengan pihak hotel, agen

travel/biro perjalanan wisata, serta menangani teknologi informasi sederhana yang mendukung program pemasaran ekowisata di Desa Bahoi yang berbasis internet. Dengan diadakannya staff atau seksi humas dan pemasaran maka promosi ekowisata Desa Bahoi akan lebih terarah, semakin luas jaringan dan tepat sasaran sehingga akan mengundang lebih banyak kunjungan wisata yang berkunjung ke Desa Bahoi.

Sedangkan Bendahara yang selama ini ada bertugas mencatat pembukuan keuangan, menyimpan uang serta melakukan transaksi pembayaran sebagaimana peran yang biasanya dijalankan oleh seorang staff keuangan suatu perusahaan. Idealnya bendahara direposisikan peran dan fungsinya menjadi staff administrasi dan keuangan. Untuk menghindari kecurigaan kepada pihak-pihak lain atau kelompok masyarakat lainnya maka pengelolaan keuangan kelompok ekowisata harus menganut asas transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Untuk menjalankan fungsi atau jabatan staf administrasi keuangan tersebut maka orang yang ditempatkan di posisi tersebut harus mempunyai kompetensi di bidang akuntansi atau manajemen keuangan, sehingga seluruh pencatatan keuangan kelompok ekowisata dan laporan keuangan bisa dilaksanakan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu pemandu selam yang ideal sebagaimana diuraikan sebelumnya harus memiliki kualifikasi dan bersertifikat *dive master* atau minimum *rescue diving*. Hal ini sangat penting mengingat kegiatan penyelaman di laut adalah kegiatan yang beresiko tinggi dan memerlukan keahlian khusus dan pengalaman yang memadai. Selain kemampuan teknis penyelaman di dalam laut, seorang pemandu wisata selam atau *snorkling* juga harus menguasai teknik

penyelamatan atau *rescue* sehingga apabila terjadi kecelakaan atau sesuatu yang tergolong darurat pada saat penyelaman dengan wisatawan yang dipandunya maka dia mampu melakukan aksi penyelamatan dan pertolongan. Disamping mampu menyelam dengan baik dan melakukan *rescue*, pemandu selam juga dituntut kemampuan tambahan, yaitu ketrampilan komunikasi dan penguasaan Bahasa Asing, dalam hal ini minimum adalah Bahasa Inggris. Hal ini dikarenakan lebih dari separuh wisatawan yang berkunjung ke Bahoi adalah wisatawan yang berasal dari mancanegara sebagaimana telah dikuatkan pada foto 4.11. Pemandu selam sekaligus juga harus mampu melakukan perawatan atau pemeliharaan peralatan selam dan *snorkling*, sehingga peralatan yang ada selalu dalam kondisi siap pakai dan sesuai dengan standar keselamatan.

Kompetensi SDM terkait dengan kepeemanduan ekowisata sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 61 Tahun 2009 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Parawisata Bidang Kepemanduan Ekowisata. Hal ini dilatarbekangi akan kecenderungan kebutuhan tuntutan Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) atau kualifikasi minimal dibidang Kepemanduan Ekowisata. Untuk mengantisipasi hal tersebut di atas maka perlu pembinaan Sumber Daya Manusia di bidang Kepemanduan Ekowisata agar mampu bersaing dengan negara-negara lain. Terpenuhinya pembinaan ini dapat memberikan nilai tambah bagi perkembangan ekowisata di Indonesia, termasuk ekowisata berbasis masyarakat di Desa Bahoi ini.

Untuk memenuhi profesionalisme Sumber Daya Manusia khususnya tenaga kerja di bidang Kepemanduan Ekowisata, sangat perlu ditetapkan standar yang merupakan pernyataan ketrampilan, pengetahuan dan sikap yang diterapkan

dalam rangka pemenuhan persyaratan standar Industri. Bersama *stakeholder* Kepemanduan ekowisata, regulator dan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) di segala lini siap memberikan gambaran dan pedoman yang sistematis tentang tugas dan pekerjaan serta persyaratan minimal tenaga kerja di bidang Kepemanduan ekowisata. Untuk itu perlu disusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Kepemanduan Ekowisata. Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) disusun untuk menyediakan sebuah pedoman yang baku dapat diaplikasikan dalam rangka memenuhi kebutuhan industri sebagai pengguna.

Untuk pengelola *homestay* idealnya perlu disusun pelayanan yang standar, meliputi kelengkapan fasilitas (kamar tidur, kamar mandi, ruang makan, listrik), menu makanan dan penyajiannya, kebersihan dan kenyamanan lingkungan, termasuk diantaranya adalah mengurangi kebisingan akibat musik yang terlalu keras yang sudah menjadi kebiasaan hidup masyarakat di Desa Bahoi. Selain itu administrasi yang sebenarnya hal kecil namun sangat besar manfaatnya adalah buku tamu dengan format yang standar. Untuk mencapai kondisi tersebut maka para pengelola *homestay* harus dilatih dan diberikan kursus manajemen perhotelan yang setara dengan manajemen pelayanan hotel kelas melati. Para pengelola *homestay* ini idealnya bekerjasama sangat erat dengan staf bagian humas dan pemasaran serta seksi atau kelompok pengrajin *souvenir* kerajinan yang membuat barang-barang cendera mata.

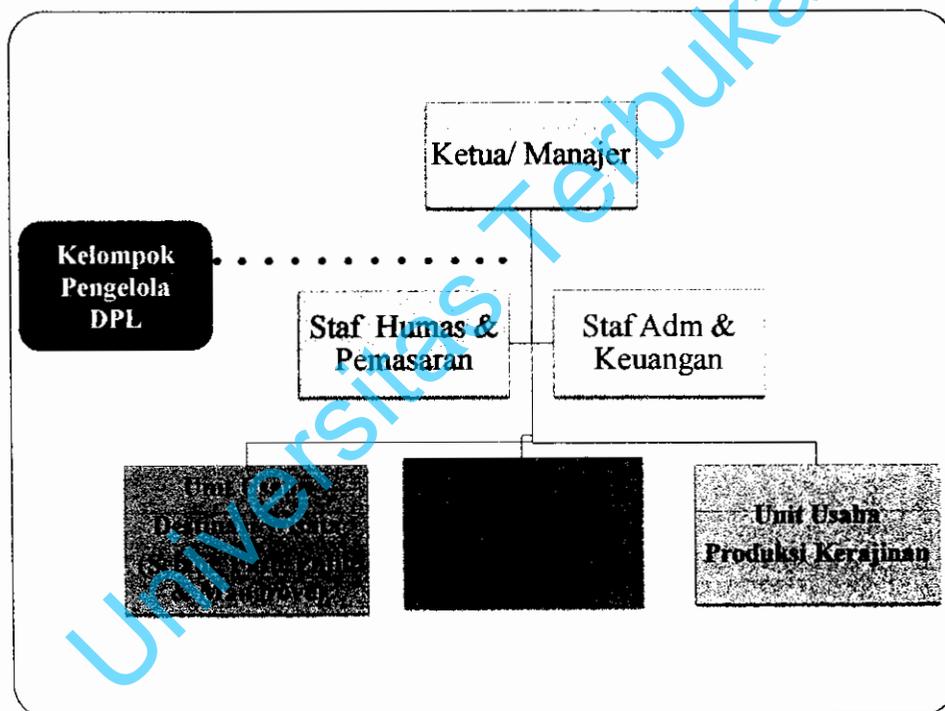
Dari uraian tersebut pada tabel 4.4 disajikan ringkasan analisis jabatan dan kompetensi bagi organisasi kelompok pengelola yang ideal di Desa Bahoi.

Tabel 4.4
 Kondisi Ideal Personil Kelompok Ekowisata Desa Bahoi

No	Posisi / Jabatan	Kualifikasi dan Kompetensi Minimum
1.	Ketua / Manajer	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan SMA/SMK atau lebih tinggi • Memiliki kemampuan dan jiwa kepemimpinan • Mampu bekerja dalam tim • Menguasai dasar-dasar berorganisasi • Memiliki kepedulian terhadap lingkungan • Memiliki pengetahuan dasar tentang ekosistem laut dan terumbu karang
2.	Staf Administrasi dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan SMA/SMK atau lebih tinggi • Memiliki pengetahuan dasar pembukuan keuangan • Bertanggungjawab, dan menjunjung tinggi asas keterbukaan atau/ akuntabilitas • Memiliki ketelitian ekstra dalam bekerja • Mampu mengoperasikan komputer
3	Staf Humas & Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan SMA/SMK atau lebih tinggi • Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik • Memiliki kemampuan berbahasa Inggris • Mempunyai kemampuan teknologi informasi dan internet • Mampu mengoperasikan komputer • Memiliki wawasan luas dan berpikiran progresif
4	Pemandu Wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan SMA/SMK atau lebih tinggi • Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik • Mempunyai sertifikat menyelam kualifikasi <i>Dive Master</i> atau <i>Rescue Diving</i> • Memiliki kemampuan Bahasa Inggris • Memiliki kemampuan untuk memelihara peralatan selam dan <i>snorkling</i> • Memiliki pengetahuan dasar ekosistem laut dan terumbu karang
5	Pengelola <i>Homestay</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan SMA/SMK atau lebih tinggi • Memiliki rumah yang layak dijadikan sebagai <i>homestay</i> • Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik • Mempunyai sertifikat pelatihan manajemen perhotelan kualifikasi pelayanan hotel kelas melati • Memiliki kemampuan komunikasi dalam Bahasa Inggris
6	Pengrajin <i>souvenir</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki ketrampilan memproduksi barang kerajinan khas lokal dan ramah lingkungan • Mempunyai jiwa bisnis / wirausaha

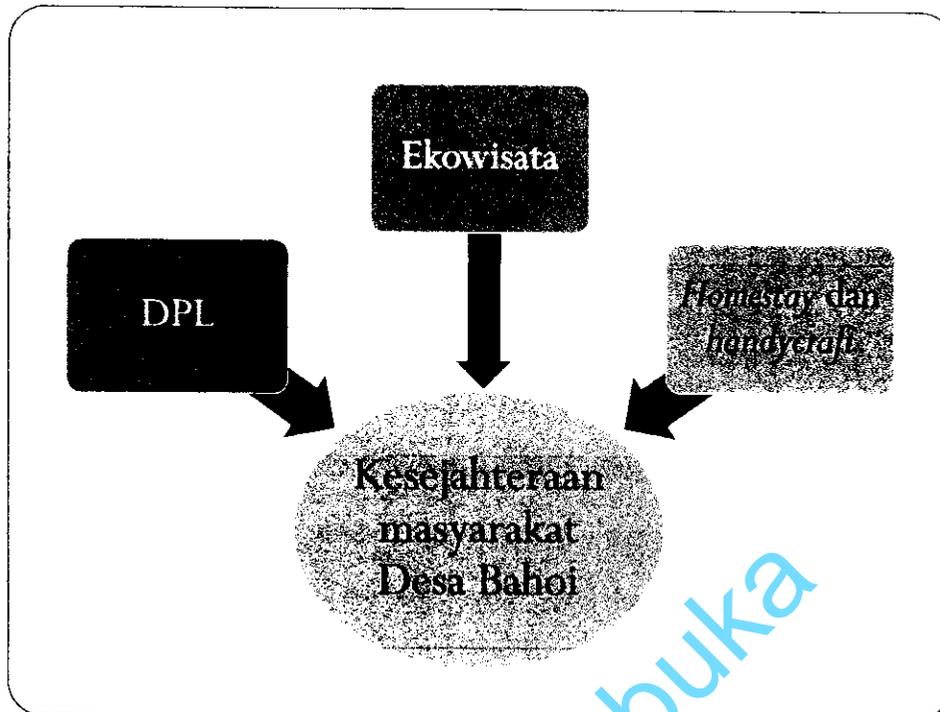
Keterangan: Diolah dari hasil studi pustaka, wawancara dan FGD

Semua posisi dalam organisasi kelompok ekowisata tersebut idealnya harus terintegrasi atau berkoordinasi secara intensif dan baik dengan kelompok pengelola DPL, sehingga hasil pendapatan yang diperoleh dari kegiatan kelompok ekowisata dikelola bersama sebagian diperuntukkan bagi biaya operasional pemeliharaan dan penjagaan kawasan DPL. Dengan demikian alternatif struktur organisasi yang ideal berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas menjadi seperti gambar bagan 4.4 dan model integrasi pengelolaan ekowisata dan DPL seperti pada bagan 4.5.



Gambar 4.4

Struktur Organisasi Pengelola Ekowisata Desa Bahoi Berdasarkan Analisis Kebutuhan SDM yang ideal.



Gambar 4.5

Ilustrasi model pengelolaan terpadu yang saling terintegrasi antara kelompok ekowisata dengan kelompok DPL di Desa Bahoi

3. Strategi Implementasi Pemenuhan Kebutuhan SDM

Untuk memenuhi kebutuhan SDM sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang memenuhi standar bagi kelompok pengelola ekowisata yang berbasis masyarakat tidaklah mudah. Salah satu unsur yang diprioritaskan dalam pemenuhan kebutuhan SDM tersebut adalah dengan pemberdayaan masyarakat setempat. Artinya semua posisi yang ada untuk organisasi pengelola ekowisata di Desa Bahoi sedapat mungkin diisi oleh personil yang berasal dari Desa Bahoi sendiri. Apabila memang calon dari desa tidak ada yang memenuhi kualifikasi seperti yang telah ditetapkan maka tetap memprioritaskan calon yang paling mendekati kualifikasi dan calon tersebut harus dibina dan diberi pelatihan formal maupun informal yang memadai sehingga minimum calon tersebut mendekati standar kualifikasi dan ketrampilan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Untuk kemampuan manajerial umum bagi ketua atau manajer ekowisata, staf humas/pemasaran maupun staf administrasi keuangan maka pelatihan atau peningkatan kapasitas SDM (*capacity building*) bisa dilakukan atau dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan yang ada di Sulawesi Utara, antara lain Universitas Sam Ratulangi Manado, Sekolah Politeknik Negeri Manado, maupun Balai Pendidikan dan Latihan milik Pemerintah Provinsi atau Kabupaten.

Sedangkan Pelatihan bagi pemandu wisata agar memiliki kualifikasi *dive master* atau *rescue diving* bisa dilaksanakan di Sekolah Politeknik Negeri Manado, jurusan Ekowisata laut. Menurut keterangan dari Informan S.14 Sekolah Politeknik Negeri Manado mempunyai kerjasama dengan *Scuba School International* (SSI) sehingga berhak menyelenggarakan pelatihan selam sesuai standard internasional yang seperti disajikan pada tabel 4. 5, sekaligus merupakan salah satu institusi yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikat *diving* hingga kualifikasi *Dive Master* atau level *Diving 4* bagi peserta pelatihan/kursus dan diakui secara internasional.

Tabel 4.5

Ekuivalensi Standar Pelatihan Selam direferensi dari beberapa Organisasi/Industri Selam Dunia (*Tourism Related Services*) dan Ketrampilan Selam yang diajarkan di Program Studi Ekowisata Bawah Laut Politeknik Negeri Manado

ISO NORM	PADI	SSI	CMAS	NAUI	JJM	POLI TEKNIK
Entry Level Diver Level 1 - ISO 24801-1	Scuba Diver	Scuba Diver	Basic Diver			
Autonomous Diver Level 2 -ISO 24801-2	Open Water Diver	Open Water Diver	CMAS* Diver	Scuba Diver	60 / 14 = 4.5/week	Diving 1
	Advanced Open Water Diver	Advanced Adventurer	CMAS** Diver	Advanced Scuba Diver	/ 14 = / week	Diving 2
	Specialty Course	Specialty Course			/ 14 = / week	EFR
	Rescue Diver	Diver Stress & Rescue	Dive Safety & Rescue		/ 14 = / week	Diving 3
		Advanced Open Water Diver				
	Master Scuba Diver	Master Diver		Master Scuba Diver	/ 14 = / week	Diving 4
Dive Leader Level 3 -ISO 24801-3		Dive Guide	CMAS*** Diver	Divemaster		
	Divemaster	Divemaster	CMAS**** Diver		/ 14 = / week	Diving 5

Sumber : *Technical committee ISO/TC 228 Tourism and related Services : Recreational Diving Services ISO Norm 24801-24803 (2007) – Safety related minimum requirements for the training of recreational SCUBA Divers (iso.org) – Sekolah Politeknik Negeri Manado*

Khusus untuk pengelola *homestay* untuk memenuhi kebutuhan ideal pengelolaan *homestay* maka diperlukan pelatihan secara formal mengenai manajemen perhotelan dalam hal ini untuk kualifikasi manajemen hotel kelas melati. Sesuai dengan keterangan dari informan S.14 maka program pelatihan ini bisa dilaksanakan oleh Sekolah Politeknik Negeri Manado, jurusan Manajemen Perhotelan. Dalam kursus manajemen perhotelan ini maka para pengelola *homestay* akan mendapatkan materi pelatihan yang meliputi: teknik pelayanan

(*hospitality*), tata boga /memasak, pengelolaan sanitasi, seni komunikasi, dan pemanduan wisata (*guide*). Dengan mendapatkan paket pelatihan manajemen perhotelan ini maka diharapkan para pengelola *homestay* di Desa Bahoi memiliki ketrampilan yang memadai untuk memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan yang berkunjung dan bermalam di Desa Bahoi.

Sementara bagi kelompok pengrajin *souvenir* agar memiliki ketrampilan yang cukup bisa dilatih oleh Balai Diklat Pariwisata atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang ada di Provinsi atau Kabupaten. Produk-produk yang dihasilkan juga sebaiknya diberikan kesempatan untuk mengikuti pameran-pameran pariwisata yang rutin diadakan oleh instansi terkait, seperti: Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian/Perdagangan maupun Kadin Daerah. Hal ini dikuatkan oleh informan S.15. bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara setiap tahun mempunyai beberapa kali program promosi pariwisata baik pada tingkat kabupaten, provinsi, nasional bahkan internasional yang bisa dimanfaatkan sebagai ajang promosi pariwisata daerah, termasuk ekowisata Desa Bahoi ini. Secara ringkas pada tabel 4.6 disajikan strategi peningkatan kapasitas SDM dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM yang ideal untuk kelompok pengelola ekowisata di Desa Bahoi. Kegiatan peningkatan kapasitas yang disajikan pada tabel tersebut sesuai dengan urutan prioritasnya.

Tabel 4.6
Strategi Peningkatan kapasitas SDM bagi Kelompok Pengelola Ekowisata di Desa Baho'i Berdasarkan Urutan Prioritas

Aspek Kompetensi	Jenis Pelatihan	Instansi Penyelenggara
1. Kemampuan Manajerial (<i>leadership</i> , organisasi, keuangan, pemasaran)	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Universitas Sam Ratulangi • Politeknik Negeri Manado • Balai Diklat Kabupaten/Provinsi
2. Pemandu Selam kualifikasi <i>Dive master</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Scuba Diving</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Sekolah Politeknik Negeri Manado, jurusan Ekowisata Laut
3. Komunikasi dan Bahasa Inggris	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan <i>guide</i> • Jursus Bahasa Inggris 	<ul style="list-style-type: none"> • Universitas Sam Ratulangi • Politeknik Negeri Manado • Balai Diklat Kabupaten/Provinsi
4. Pengelolaan <i>homestay</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kursus Manajemen Perhotelan/ <i>homestay</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Sekolah Politeknik Negeri Manado
5. Produksi Kerajinan Lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Kursus pembuatan <i>handycraft</i> dan promosi /pemasaran/pameran 	<ul style="list-style-type: none"> • Balai Diklat Perindustrian dan Perdagangan • Dinas Pariwisata Kabupaten/Provinsi
6. Komputer dan Teknologi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Komputer • Web desain • Seni desain grafis 	<ul style="list-style-type: none"> • Sekolah Politeknik Negeri Manado

Sumber: Diolah dari hasil wawancara dan FGD

Untuk memenuhi kebutuhan SDM pengelola ekowisata yang ideal di Desa Baho'i perlu didorong prakondisi yang ada di masyarakat dan kelompok pengelola ekowisata dan DPL akan perlunya memahami bagi dilakukan perubahan organisasi kelompok yang lebih ideal sesuai dengan kaedah pengelolaan bisnis agar pengelolaan ekowisata di Desa Baho'i bisa lebih optimum dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Dengan demikian sebelum dilakukan perubahan organisasi kelompok pengelola perlu dilakukan sosialisasi

kepada seluruh anggota masyarakat di Desa sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan potensi konflik sosial di lapangan.

Tabel 4.7
 Strategi Implementasi Pemenuhan Kebutuhan SDM bagi Kelompok Pengelola Ekowisata di Desa Bahoi Sesuai dengan Urutan Prioritas Kegiatan.

No.	Uraian Kegiatan	Tujuan	Keterangan / Pelaksanaan
1	Sosialisasi pembentukan organisasi kelompok pengelola ekowisata yang baru di Desa Bahoi	Untuk memberikan gambaran kepada masyarakat di Desa Bahoi akan pentingnya pembentukan kelompok ekowisata yang baru yang sesuai dengan kaedah manajemen bisnis serta mampu memberikan manfaat yang optimum bagi masyarakat di Desa Bahoi	<ul style="list-style-type: none"> • Difasilitasi oleh LSM pendamping (YAPEKA) • Melibatkan seluruh komponen masyarakat di Desa Bahoi, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
2	Pembentukan struktur organisasi kelompok ekowisata yang baru	Untuk membentuk kelompok pengelola ekowisata yang ideal sesuai dengan kaedah manajemen bisnis yang mampu memberikan manfaat optimum bagi kesejahteraan masyarakat di Desa Bahoi	<ul style="list-style-type: none"> • Difasilitasi oleh LSM pendamping (YAPEKA) • Melibatkan seluruh komponen masyarakat di Desa Bahoi, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. • Dilaksanakan atas dasar musyawarah mufakat.
3	Seleksi dan Pemilihan Manajer, Staf Adm & Keuangan, Staf Humas & Pemasaran, Koordinator dan Anggota Unit Kegiatan Ekowisata, Unit Kegiatan <i>Homestay</i> dan Unit Kegiatan Kerajinan	Untuk mengisi komposisi personil kelompok pengelola ekowisata yang ideal yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kaedah manajemen bisnis sehingga kegiatan ekowisata mampu memberikan manfaat optimum bagi kesejahteraan masyarakat di Desa Bahoi	<ul style="list-style-type: none"> • Difasilitasi oleh LSM pendamping (YAPEKA) • Melibatkan seluruh komponen masyarakat di Desa Bahoi, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. • Apabila diperlukan melibatkan Lembaga Pendidikan setempat (Unsrat atau Politeknik Negeri Manado)
4	Pelatihan Organisasi dan Manajemen Bisnis bagi Pengelola Ekowisata	Meningkatkan kapasitas seluruh SDM pengelola ekowisata dalam aspek manajemen bisnis: Organisasi, <i>leadership</i> , keuangan, dan pemasaran.	<ul style="list-style-type: none"> • Difasilitasi oleh LSM pendamping (YAPEKA) • Berkoordinasi dengan Lembaga Pendidikan Setempat (Unsrat atau Politeknik Negeri Manado) dalam perencanaan dan pelaksanaan pelatihan.

5	Pelatihan <i>Scuba Diving</i> kualifikasi <i>Dive master</i>	Meningkatkan kapasitas SDM pemandu selam sehingga memenuhi standar kualifikasi <i>Dive master</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Difasilitasi oleh LSM (YAPEKA). • Pelaksanaan berkoordinasi dengan Sekolah Politeknik Negeri Manado, jurusan Ekowisata Laut
6	Kursus komunikasi dan Bahasa Inggris	Meningkatkan kapasitas pemandu selam sehingga memenuhi standar kualifikasi <i>Dive master</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Difasilitasi oleh LSM (YAPEKA). • Pelaksanaan berkoordinasi dengan Sekolah Politeknik Negeri Manado jurusan Manajemen Perhotelan.
7	Pelatihan/Kursus manajemen perhotelan/ <i>homestay</i>	Meningkatkan kapasitas SDM pengelola <i>homestay</i> sesuai dengan standar pelayanan hotel melati/ <i>homestay</i> Kementerian Pariwisata.	<ul style="list-style-type: none"> • Difasilitasi oleh LSM (YAPEKA). • Pelaksanaan berkoordinasi dengan Sekolah Politeknik Negeri Manado jurusan Manajemen Perhotelan.
8	Pelatihan Produksi dan Pemasaran Kerajinan Lokal	Meningkatkan kapasitas SDM kelompok <i>handicraft</i> agar mampu memproduksi produk kerajinan lokal yang berkualitas sesuai dengan permintaan pasar	<ul style="list-style-type: none"> • Difasilitasi oleh LSM (YAPEKA). • Pelaksanaan berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten / Provinsi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat.
9	Kursus Komputer, Web Desain dan Teknologi Informasi	Meningkatkan kapasitas SDM kelompok pengelola ekowisata dalam administrasi dan pengembangan program pemasaran dan teknologi informasi berbasis internet.	<ul style="list-style-type: none"> • Difasilitasi oleh LSM (YAPEKA). • Pelaksanaan berkoordinasi dengan Sekolah Politeknik Negeri Manado jurusan Manajemen Pariwisata.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian Analisis Kebutuhan SDM Pengelolaan Ekowisata Berbasis Masyarakat: Studi Kasus di Desa Bahoi Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara ini ditarik tiga kesimpulan, yaitu :

1. Struktur organisasi kelompok pengelola ekowisata di Desa Bahoi termasuk kategori sederhana dengan kondisi kapasitas SDM saat ini masih terbatas, terutama dalam aspek manajemen bisnis. Kapasitas SDM yang masih kurang antara lain adalah manajemen organisasi, pengelolaan keuangan, program pemasaran, pengelolaan *homestay*, produksi kerajinan, kualifikasi pemandu wisata selam, serta ketrampilan komunikasi dan Bahasa Inggris.
2. Struktur organisasi dan komposisi SDM kelompok pengelola ekowisata di Desa Bahoi yang ada pada saat ini perlu diubah menjadi lebih ideal guna meningkatkan efektivitas kinerja pengelolaan ekowisata di Desa Bahoi. Ketua kelompok pengelola ekowisata direposisiakan fungsinya menjadi seorang manajer suatu organisasi bisnis. Sedangkan posisi sekretaris direposisiakan menjadi seorang staf yang menjalankan fungsi humas dan pemasaran. Sementara posisi bendahara direposisiakan sebagai staf administrasi dan keuangan. Tiga personil inti tersebut mengkoordinir dan mengelola 3 unit usaha kegiatan ekowisata, yaitu unit usaha destinasi ekowisata (selam, pasir putih dan mangrove), unit usaha pengelolaan *homestay* dan unit usaha kerajinan.

3. Strategi Implementasi pemenuhan kebutuhan SDM kelompok pengelola ekowisata yang ideal di Desa Bahoi harus tetap memprioritaskan tenaga kerja setempat yang berasal dari Desa Bahoi, dengan pertimbangan bahwa program ini adalah kegiatan ekowisata yang berbasis masyarakat. Untuk meningkatkan kapasitas SDM menuju sebuah kelompok pengelola ekowisata yang ideal ini diperlukan minimal tujuh macam pelatihan/ kursus, yaitu: (1) pelatihan manajemen bisnis (*leadership*, organisasi, keuangan dan pemasaran); (2) pelatihan selam tingkat *dive master* atau *rescue diving*; (3) pelatihan pemandu wisata/*guide*; (4) kursus seni komunikasi dan Bahasa Inggris, (5) kursus manajemen perhotelan/ *homestay*, (6) pelatihan produksi kerajinan lokal maupun pameran/ promosi wisata; dan (7) pelatihan atau kursus komputer/web desain/teknologi informasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan maka penelitian Analisis Kebutuhan SDM Pengelolaan Ekowisata Berbasis Masyarakat: Studi Kasus di Desa Bahoi Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara ini merekomendasikan empat buah saran, yaitu:

1. Untuk mengimplementasikan perbaikan/perubahan struktur organisasi dan komposisi SDM menuju pengelolaan ekowisata yang ideal di Desa Bahoi memerlukan peran dan fasilitasi dari LSM yang selama ini telah mendampingi kegiatan ekowisata di Desa Bahoi serta sudah sangat mengenal adat, kebiasaan dan kehidupan masyarakat setempat. Perbaikan/ perubahan struktur dan komposisi SDM kelompok pengelola

ini harus dilaksanakan melalui musyawarah dengan melibatkan semua unsur masyarakat yang ada di Desa Bahoi, baik Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat serta seluruh anggota dan pengurus/ kelompok masyarakat yang selama ini telah terlibat dalam pengelolaan ekowisata di Desa Bahoi.

2. Untuk implementasi strategi pemenuhan kebutuhan SDM dengan meningkatkan kapasitas SDM melalui program pelatihan-pelatihan/ kursus dan lain-lain menuju pengelolaan ekowisata yang ideal di Desa Bahoi memerlukan peran dan fasilitasi LSM, hal ini dikarenakan LSM telah memiliki pengalaman yang cukup selama ini dalam melakukan pendampingan di tengah masyarakat sebelumnya di Desa Bahoi. LSM juga memiliki akses bagi pendanaan guna melaksanakan pengembangan kapasitas SDM tersebut. Dengan demikian LSM diharapkan mampu untuk menjadi jembatan dalam menjalin kerjasama dengan Lembaga Pendidikan serta Balai Pendidikan dan Latihan milik Instansi Pemerintah yang ada di Sulawesi Utara, antara lain: Universitas Sam Ratulangi, Sekolah Politeknik Negeri Manado, Balai Diklat Pariwisata/ Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Pariwisata setempat dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM pengelola ekowisata di Desa Bahoi
3. Untuk menghindari konflik dan kecemburuan sosial antara kelompok ekowisata dan kelompok DPL di Desa Bahoi diperlukan pengelolaan kegiatan secara terpadu di bawah satu organisasi *holding* yang mampu memberikan payung organisasi bagi kedua kelompok baik dari aspek

operasional biaya, pendapatan maupun komunikasi dengan pihak luar. Hasil pendapatan atau penghasilan maupun bantuan program yang diterima atau dihasilkan oleh kedua kelompok dikelola secara bersama untuk kepentingan seluruh kelompok dan masyarakat di Desa Bahoi. Pengelolaan terpadu antara kegiatan ekowisata dan DPL ini sebaiknya dikuatkan dengan Peraturan Desa dan SK Kepala Desa guna menggantikan Peraturan Desa dan SK Kepala Desa sebelumnya sehingga bersifat mengikat bagi seluruh anggota masyarakat di Desa Bahoi.

4. Sebagai implikasi dari penelitian ini maka diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui model bisnis atau badan hukum yang sesuai dan layak untuk diterapkan dalam sinergi antara kelompok ekowisata dan kelompok DPL tersebut. Model bisnis atau badan hukum yang akan dibentuk selain mempertimbangkan aspek ekonomi juga harus sesuai dengan kaedah pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat dengan selalu mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan sumber daya alam, kearifan sosial dan budaya setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimus. 2010. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bahoi. *Arsip Pemerintah Desa Bahoi, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara*.
- Anonimus. 2010. Peraturan Desa Bahoi tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Laut Desa Bahoi. *Arsip Pemerintah Desa Bahoi, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara*.
- Anonimus. 2010. Surat Keputusan Kepala Desa (Hukum Tua) tentang Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut Desa Bahoi. *Arsip Pemerintah Desa Bahoi, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara*.
- Anonimus. 2010. Surat Keputusan Kepala Desa (Hukum Tua) tentang Kelompok Pengelola Pesisir (Ekowisata) Desa Bahoi. *Arsip Pemerintah Desa Bahoi, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara*.
- Anonimus. 2010. Surat Keputusan Kepala Desa (Hukum Tua) tentang Pelaksanaan Wilayah Pesisir dan Laut Desa Bahoi. *Arsip Pemerintah Desa Bahoi, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara*.
- Agusalim. (2013). Program Ekowisata Bahari Solusi Pemberdayaan Masyarakat Serta Konservasi Pesisir dan Laut. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pariwisata Ambon.
- Digdo, A.A. (2013). Strengthening Biodiversity Resilience in North Sulawesi Seascape Through Replication of Village Marine Protected Area (MPA) in Bahoi, Talise and Lihunu, Indonesia. *Project Document Good Planet Foundation, YAPEKA, Bogor*.
- Ardahaey, A.F. (2009). The Role of Human Resources Empowerment in the Sustainable Development of Tourism Industry. *Journal SSRN*: <http://ssrn.com/abstract>
- Aryunda H. (2011). Dampak Ekonomi Pengembangan Kawasan Ekowisata Kepulauan Seribu. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 22, No. 1, 1 – 16
- Azam M. and Sarker T. (2011). Green Tourism in The Context of Climate Change Towards Sustainable economic Development in South Asian Region. *Journal SSRN Vol II: Issue I (3)*.
- Basrowi dan Suwandi, (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Brandon, K. (1996). Ecotourism and Conservation: A Review of Keys Issues. *Journal Environment and Social Sustainable Development* : No. 33. The World Bank.
- Ceballos-Lascurain, H. (1991). *Tourism, Ecotourism and Protected Areas*. *Parks* 2 (3): 31-35.

Crawford, B., Kasmidi, M., Korompis, F., Pollnac, R.B. (2006). Factors Influencing Progress in Establishing Community-Based Marine Protected Areas in Indonesia., *Journal ISSN: 0892-0753 Coastal Management*: 34:39–64.

Dessler, G. (2000). Human Resources management. 8th edition. Prentice Hall. Inc.

Creswell, J.W. 2007. Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. Second Edition. SAGE Publications.

Ferse, S. Manez, C. Manez K. & Glaser, M. (2010). Increasing the role of local community in marine protected area implementation. *Jurnal Environmental Conservation* Vol: 37 (1) : 21-34. Center for Tropical Marine Ecology, Bremen, Germany.

Hakim, L., Soemarno², M., dan Hong, S.K. (2012). Challenges for conserving biodiversity and developing sustainable island tourism in North Sulawesi Province, Indonesia. *Journal Ecology Field Biology*: 35(2): 61-71,

Iswanto, Y. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Universitas Terbuka. Buku Materi Pokok. Jakarta.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2014). Masyarakat Ekonomi ASEAN Berpotensi Dorong Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan ke Indonesia di Atas 10%. *Siaran Pers Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif April 2014*.

Kinard, M.F and O'Brien, T.G. (1996). Ecotourism in The Tangkoko Dua Saudara Nature Reserve: Opening Pandora Box. *Journal Oryx* 30 (1): 65-73.

Latifah, N. (2014). Manajemen Ekowisata Bahari. www.academia.edu.

Mangkuprawira, T.S. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Miles, M. and Huberman, M. (2002). *An Expanded Source Book: Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication.

Mirsanjari, M.M. and Mirsanjari, M.O. (2012). Study of Strategic Eco-Torism Potential Based on Sustainabile Development and Management. *Journal SSRN*: 565366 <http://ssrn.com>

Mudayen, Y.M.V. dan Lantum, A.L. (2008). Needs Assessment Pelatihan Pengembangan SDM Pendukung Pariwisata di Kabupaten Bantul. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Volume 5, Nomor 1.

Nandi (2009). Pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Jurnal GEA Pendidikan Geografi* : Vol 8 No.1.

Pangemanan, P., Luntungan, J., Woworuntu, J., dan Pangkey, H. 2002. Profil Pariwisata Proyek Pesisir Pesisir Kabupaten Minahasa, Kota Manado dan Kota Bitung Sulawesi Utara. Technical Report: TE-02/28-I

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 61 Tahun 2009. Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Parawisata Bidang Kepemanduan Ekowisata.

Ratmawati, D. dan Herachwati, N. 2012. Perilaku Organisasi – Buku Materi Pokok. Universitas Terbuka.

Sastria D., (2009). Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal Dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Malang. *Journal of Indonesian Applied Economics* Vol. 3, No. 1, 37-47

Simamora, H. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. STIE YKPN. Bandung

Sukmara, A., Crawford, B. R. and Pollnac, R. B. (2001). Community-based coastal resources management: Interim assessment of the Coastal Resources Management Project in the Village of Talise, Minahasa District, North Sulawesi Province. *TE-01/05-I. Narragansett, RI: University of Rhode Island, Coastal Resources Center.*

Sukmara, A. dan Crawford, B. (2003). Perubahan Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku Sosial Masyarakat Ddesa Talise Sebagai Desa Proyek Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Berbasis Masyarakat Di Sulawesi Utara. *Prosiding: Konperensi Nasional III Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Indonesia 2002*

Tulungen, J. T., Devi, B. P. and Rotinsulu, C. (2000). Pengelolaan, pengembangan, persetujuan dan pelaksanaan rencana pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat di Sulawesi Utara. *Prosiding Seminar Proyek Pesisir, Bappenas.*

Von Essen, L.M., Ferse, S.C.A., Glaser, M., Kunzmann, A. (2013). Attitudes and perceptions of villagers toward community-based marine culture in Minahasa, North Sulawesi, Indonesia. *Journal: Ocean & Coastal Management* :73 (2013) 101e112.

Wiadnya, R. Syafaat, E. Susilo, D. Setyohadi, Z. A. Wiryawan, B. (2001). Recent Development of Marine Protected Areas (MPAs) in Indonesia: Policies and Governance. *Journal : ISSN: 2090-4215 J. Appl. Environ. Biol. Sci.*, 1(12) 608-613, 2011

Lampiran 1

PERTANYAAN PENELITIAN

**ANALISIS KEBUTUHAN SDM PENGELOLAN EKOWISATA BERBASIS
MASYARAKAT (STUDI KASUS DI DESA BAHOI, KECAMATAN
LIKUPANG BARAT, KABUPATEN MINAHASA UTARA)**

Aspek Penelitian 1:

Kondisi *Existing* SDM Pengelola Ekowisata di Desa Bahoi

Informan:

1. Kepala Desa Bahoi
2. Ketua dan Anggota Kelompok Pengelola Ekowisata Bahoi
3. LSM Pendamping (WCS, Celebio, YAPEKA)

Pertanyaan Penelitian	Keterangan
1.a. Bagaimana proses dibentuknya kelompok pengelola ekowisata di Desa Bahoi? Apakah pembentukannya dikuatkan dengan SK Kepala Desa atau Perdes ?	Dokumen Perdes/SK Kepala Desa atau sejenisnya difotokopi untuk lampiran penelitian
1.b. Ap visi/misi atau tujuan dibentuknya kelompok pengelola ekowisata di Desa Bahoi dan apakah dikuatkan dan tercantum dalam AD/ART atau sejenisnya ?	Dokumen pendukung (AD/ART) dan sejenisnya difotokopi untuk lampiran penelitian
1.c. Bagaimana komposisi personil yang sebagai kelompok pengelola ekowisata di Desa Bahoi dan bagaimanakah bagan organisasi kelompok pengelola tsb?	Apabila memungkinkan dilengkapi dengan data profil singkat/biografi semua anggota pengelola Ekowisata dilampirkan beserta struktur organisasinya, serta SOP.
1.d. Bagaimana prosedur dan tatacara pemilihan personel kelompok pengelola ekowisata? Apakah ada persyaratan khusus/tertentu untuk menjadi ketua/anggota/ pengurus kelompok ekowisata di Desa Bahoi ?	Dokumen pendukung, SK , Perdes, SOP dan sejenisnya difotokopi dan dilampirkan
1.e. Bagaimana prosedur dan mekanisme penggantian anggota pengelola ekowisata, dan apakah hal tsb pernah terjadi ?	Dokumen SK penggantian personel dan sejenisnya difotokopi dan dilampirkan
1.f. Menurut saudara bagaimana kapasitas SDM kelompok pengelola ekowisata yang telah dibentuk ? apakah SDM yang ada mempunyai	Dilampirkan kunjungan wisatawan, dan saran/kesan wisatawan pada buku tamu.

Lampiran 1

kapasitas cukup untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan visi/misi / tujuan pengelolaan Ekowisata di Desa Bahoi ?	
1.g. Apakah aspek utama yang menjadi kendala dalam pengelolaan ekowisata di Desa Bahoi ? (misalnya: Dana, SDM atau lainnya..?)	Lampirkan data akumulasi kunjungan wisatawan 3 tahun terakhir, lama kunjungan, kesan/pesan pada buku tamu
1.h. Khusus terkait dengan kendala kapasitas SDM pengelola ekowisata, langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan oleh pihak Pengelola ekowisata di Desa Bahoi ? Bagaimana peran bantuan dan dukungan dari Pemerintah Desa, LSM, Pemda atau pihak lainnya? Apakah dukungan tersebut dirasa mencukupi atau masih jauh dari harapan?	Lampirkan data/dokumen kegiatan pengelolan ekowisata 3 tahun terakhir, bantuan yang pernah diperoleh, pelatihan yang diikuti, dsb.

Aspek Penelitian 2:

Kondisi Ideal SDM Pengelola Ekowisata di Desa Bahoi dan Strategi Pemenuhan Kebutuhan SDM

Informan dan Nara Sumber:

1. Kelompok Pengelola Ekowisata Desa Bahoi
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Utara
3. Dinas Pariwisata, Kabupaten Minahasa Utara.
4. Universitas Sam Ratulangi, Manado
5. Politeknik Negeri Manado
6. LSM Pendamping, WCS Indonesia program, Manado.
7. LSM Pendamping, Yapeka, Bogor.
8. LSM Pendamping, Celebio, Manado, Sulawesi Utara

Pertanyaan Penelitian	Keterangan
2.a. Setelah mengetahui kondisi <i>existing</i> SDM kelompok pengelola ekowisata di Desa Bahoi, menurut anda bagaimana seharusnya organisasi SDM pengelola ekowisata di Bahoi apabila dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai?	Apabila narasumber belum mengenal ekowisata Desa Bahoi maka sampaikan informasi singkat perihal ekowisata Di Desa Bahoi beserta organisasi kelompok pengelolanya.
2.b. Kira-kira perlu penambahan personil atau	Apabila diperlukan lengkapi dengan

Lampiran 1

<p>pengurangan apa agar pengelolaan ekowisata di Desa Bahoi menjadi lebih ideal sehingga mampu mencapai visi dan misi / tujuannya ?</p>	<p>bagan/struktur organisasi yang direkomendasikan serta ringkasan analisis dari informan/narasumber</p>
<p>2.c. Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang ideal tersebut di atas bagaimana strategy pemenuhan kebutuhan personelnnya? Apakah perlu direkrut personel dari luar Desa ? Ataukah personel tetap dari Desa setempat ?</p>	<p>Apabila diperlukan informasi bisa diteruskan kepada pihak terkait yang dirujuk oleh para nara sumber/informan.</p>
<p>2.d. Program pelatihan apa saja yang diperlukan oleh SDM kelompok pengelola ekowisata agar memiliki kompetensi dan kapasitas yang mencukupi untuk menjalankan misinya/tujuannya?</p>	<p>Apabila diperlukan informasi bisa diteruskan kepada pihak terkait yang dirujuk oleh para nara sumber/informan.</p>
<p>2.e. Bagaimana strategi untuk melibatkan partisipasi dari instansi pendidikan atau pelatihan di luar Kabupaten Minahasa Utara guna memenuhi kebutuhan SDM kelompok pengelola ekowisata tersebut agar mampu mencapai tujuan ?</p>	<p>Apabila diperlukan informasi bisa diteruskan kepada pihak terkait yang dirujuk oleh para nara sumber/informan.</p>
<p>2.f. Selain pelatihan-pelatihan secara formal, bagaimana bentuk bantuan teknis atau pendampingan LSM yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas SDM ideal bagi kelompok pengelola ekowisata di Desa Bahoi agar bisa mencapai visi dan misinya/tujuannya ?</p>	<p>Apabila diperlukan informasi bisa diteruskan kepada pihak terkait yang dirujuk oleh para nara sumber/informan.</p>

PANDUAN PELAKSANAAN *FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)*

ANALISIS KEBUTUHAN SDM PENGELOLAAN EKOWISATA BERBASIS MASYARAKAT: STUDI KASUS DI DESA BAHOI, KECAMATAN LIKUPANG BARAT, KABUPATEN MINAHASA UTARA

a. Latar belakang

Hasil evaluasi Proyek Pesisir di Sulawesi Utara menyebutkan bahwa tantangan utama dalam pengembangan industri wisata bahari di Kabupaten Minahasa adalah masih kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku industri jasa pariwisata dan masih minimnya program kemitraan dengan masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata bahari (Pangemanan dkk, 2002).

Salah satu lokasi yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan ekowisata bahari adalah Desa Bahoi di Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Desa Bahoi adalah lokasi model desentralisasi dan penguatan pengelolaan sumber daya alam pesisir yang berbasis desa yang melibatkan kelompok masyarakat. Desa Bahoi mendapatkan bantuan Program berupa kegiatan Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut (DPL) dan Ekowisata Bahari berbasis masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Lingkungan Mandiri Perdesaan dari Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2009-2012.

Bagaimanakah kondisi *existing* SDM kelompok pengelola Ekowisata di Desa Bahoi dan bagaimana kebutuhan SDM yang ideal untuk mengelola Ekowisata di Desa Bahoi agar mampu mencapai tujuan dan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat adalah permasalahan yang penting untuk dilakukan penelitian.

B. Tujuan kegiatan

Tujuan dilaksanakannya kegiatan FGD ini adalah :

1. Untuk mendapatkan gambaran detail tentang kondisi *existing* SDM Kelompok Pengelola Ekowisata Di Desa Bahoi.

Lampiran 2

2. Untuk mendapatkan gambaran detail tentang kebutuhan ideal SDM untuk pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat di Desa Bahoi.
3. Untuk mengetahui alternatif pemenuhan kebutuhan SDM pengelola ekowisata di Desa Bahoi

C. Tempat dan waktu pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan di dua tempat, yaitu di Kantor Desa Bahoi, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara pada hari Kamis, Tanggal 2 Oktober, 2014. FGD kedua dilaksanakan di Kantor WCS Indonesia Program, di Manado pada Tanggal 29 September 2009. Sementara itu wawancara mendalam kepada para narasumber dilaksanakan pada hari Jumat Tanggal 2 Oktober 2014.

D. Keluaran

Melalui kegiatan FGD ini diharapkan diperoleh keluaran:

1. Keterangan, gambaran dan data/dokumen pendukung kondisi *existing* SDM Kelompok Pengelola Ekowisata di Desa Bahoi.
2. Keterangan, gambaran dan data pendukung kondisi ideal SDM Kelompok Pengelola Ekowisata di Desa Bahoi.
3. Keterangan, gambaran dan data pendukung strategi pemenuhan kebutuhan SDM Pengelola Ekowisata yang ideal di Desa Bahoi.

E. Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan

- Kegiatan FGD diawali dengan pengenalan, paparan mengenai tujuan dilaksanakannya FGD, keluaran yang diharapkan serta tatacara / prosedur pelaksanaan FGD.
- Pelaksanaan FGD akan dipandu oleh seorang Fasilitator berdasarkan panduan FGD yang telah dipersiapkan.
- Diskusi difokuskan kepada 2 aspek penelitian yang telah ditulis dalam tujuan FGD dan dijabarkan dalam lembar pertanyaan penelitian.

Peserta FGD

FGD di Desa Bahoi

No.	Nama Instansi/Lembaga/Organisasi	Jumlah orang
1.	Peneliti	1 orang
2.	Kepala Desa Bahoi	1 orang
3.	Perangkat Desa Bahoi	2 orang
4.	Kelompok Pengelola Ekowisata Desa Bahoi	6 orang
5.	LSM Pendamping	2 orang
	Total Peserta	12 orang

FGD di Kantor WCS Manado

No.	Nama Instansi/Lembaga/Organisasi	Jumlah orang
1.	Peneliti	1 orang
2.	LSM Pendamping Celebio	2 orang
3.	LSM Pendamping YAPEKA	2 orang
4.	LSM Pendamping WCS Indonesia program	1 orang
	Total Peserta	6 orang

Lampiran 3

SALINAN WAWANCARA

ANALISIS KEBUTUHAN SDM PENGELOLA EKOWISATA BERBASIS MASYARAKAT (STUDI KASUS DI DESA BAHOI, KECAMATAN LIKUPANG BARAT, KABUPATEN MINAHASA UTARA)

- Tanggal** : 30 September – 3 Oktober 2014
- Lokasi** : Desa Bahoi, Kecamatan Likupang Barat Kab. Minahasa Utara
- Informan** : 1. Kepala Desa Bahoi (Kode S.1)
2. Ketua Kelompok Ekowisata (Kode S.2)
3. Ketua Kelompok DPL (Kode S.3)
4. Bendahara Ekowisata /Pengelola *Homestay* I (Kode S.5)
5. Pengelola *Homestay* II (Kode S.8)
6. Anggota Pemandu Wisata I (Kode S.6)
7. Anggota Pemandu Wisata II (Kode S.7)
8. Produsen *Handycraft* (Kode S.9)

Pertanyaan 1.a.

Bagaimana proses dibentuknya kelompok pengelola ekowisata di Desa Bahoi? Apakah pembentukannya dikuatkan dengan SK Kepala Desa atau Perdes?

Jawaban:

- S.1. *“Proses pembentukan kelompok ekowisata dilakukan pada tahun 2010, yaitu pada saat ada program BLM (bantuan langsung masyarakat) PNPM LMP. Proses pembentukan kelompok difasilitasi oleh FK (Fasilitator Kecamatan) PNPM LMP dan CSO (WCS). Usulan kegiatan ekowisata di Bahoi diusulkan pada forum musyawarah desa yang akan diajukan ke program PNPM LMP. Usulan ini kemudian diajukan ke musyawarah antar desa di tingkat kecamatan dan mendapat persetujuan dari program untuk mendapat pendanaan. Usulan ekowisata ini dulu dinyatakan layak oleh program dikarenakan potensi keberlanjutannya dianggap cukup baik. Kegiatan utama ekowisata waktu itu adalah pembelian peralatan selam (10 set), pelatihan guide dan bantuan satu unit perahu motor, namun sekarang perahu motor tersebut sudah rusak. Juga ada bantuan pondok kerja, sekaligus pembentukan kelompok yang telah kuatkan dengan SK Kepala Desa dan Peraturan Desa tahun 2010. Dokumennya nanti saya fotokopikan pak, ada di kantor Desa”.*
- S.2. *“Pengurus kelompok ekowisata dipilih secara aklamasi pada musyawarah Desa PNPM LMP pada tahun 2010. Penunjukan saya dikarenakan saya dipandang oleh masyarakat mempunyai kepedulian lingkungan dan kegiatan sosial, disamping mungkin juga karena faktor usia atau dituakan di desa ini. Kelompok ekowisata ini dibentuk*

Lampiran 3

melanjutkan kegiatan PNPM LMP lain sebelumnya, yaitu DPL. Makanya pengurus ekowisata adalah juga dulunya pengurus TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) PNPM LMP yang ada di desa Bahoi. Jadi pengurus yang ada seperti ketua (saya), sekretaris (Carles Sahudege) dan bendahara (Jomilke Cornelis) semua adalah mantan pengurus TPK tahun 2009 untuk kegiatan PNPM LMP”.

- S.3. *“Sebenarnya dibentuknya kelompok kegiatan pengelola ekowisata ini dulunya adalah untuk menambah manfaat dengan adanya DPL supaya masyarakat bisa menambah pendapatan dari hasil kunjungan wisata. Jadi DPL tidak hanya memberi manfaat banyak ikan saja, namun juga untuk kunjungan wisata. Maka melalui program PNPM LMP pada tahun 2010 diusulkanlah kegiatan ekowisata ini untuk memanfaatkan potensi laut yg ada sebelumnya yaitu DPL”.*

Pertanyaan 1b.

Bagaimanakah visi dan misi atau tujuan dibentuknya kelompok pengelola ekowisata di Desa Bahoi dan apakah dikuatkan dan tercantum dalam AD/ART atau sejenisnya?

Jawaban :

- S.1. *“Sesuai dengan visi dan misi desa maka ekowisata ini dikelola untuk memanfaatkan kekayaan pesisir Desa Bahoi bagi kesejahteraan masyarakat”.*
- S.2. *“Tentu saja tujuan ekowisata ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Bahoi. Saat ini yang banyak menikmati pendapatan dari pariwisata di manado adalah para pemilik hotel dan restoran yang bermodal besar. Warga masyarakat Desa yang sebenarnya mempunyai lokasi tujuan wisata, seperti di Bahoi tidak pernah bisa menikmati hasil kunjungan wisata tersebut. Maka ekowisata ini dibangun untuk itu, memberikan peluang kepada masyarakat di Desa Bahoi untuk mendapatkan kesejahteraan dari potensi wisata yang ada di Desa”.*
- S.3. *“Pengelolaan ekowisata hanya akan memanfaatkan zona du luar zona inti DPL. Jadi zona inti di kawasan DPL khusus ganya dilindungi saja tidak boleh diganggu gugat. Dan ini sudah ada di Perdes nya”.*

Pertanyaan 1.c.

Bagaimana susunan personil yang ditetapkan sebagai kelompok pengelola ekowisata di Desa Bahoi dan bagaimanakah bagan organisasi kelompok pengelola tersebut saat ini?

Jawaban ;

- S.1. *“Pengurus awal kelompok ekowisata terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara sebagai pengurus inti. Kemudian ada bidang dive center 9 orang. Kemudian ekowisata berkembang dengan bertambah lagi bidang homestay 10 orang dan handicraft pada tahun 2012”.*

Lampiran 3

- S.2. *“Susunan pengurus inti kelompok ekowisata adalah ketua (Opa Hans Lahamendu), Sekretaris (Carles Sahudage) dan Bendahara (Jomilke Cornelis). Kami bertiga dulunya adalah pengurus TPK PNPM LMP di Desa Bahoi yang dipilih melalui musyawarah Desa. Pengurus inti mengkoordinasikan unit atau bidang kegiatan diving, yang kemudian berkembang juga usaha homestay dan kerajinan. Sebelumnya Anggota diving ada 9 orang, namun saat ini yang aktif tinggal 6 orang, karena yang lain sudah menikah dan tinggal/ pindah ke desa lain”.*

Pertanyaan 1.d.

Bagaimana prosedur dan tatacara pemilihan personel kelompok pengelola ekowisata? Apakah ada persyaratan khusus/tertentu untuk menjadi ketua/anggota/pengurus kelompok ekowisata di Desa Bahoi?

Jawaban:

- S.1. *“Pengurus inti Ketua, sekretaris dan bendahara dipilih berdasarkan musyawarah di Desa. Pada saat itu yang dipilih adalah 3 orang yang pernah menjadi pengurus PNPM LMP, atau Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang dianggap oleh masyarakat berpengalaman mengelola program. Sedangkan tim diving dipilih 9 orang yang mempunyai kemampuan teknis menyelam di laut. Pengurus ditetapkan SK Kepala Desa pada tahun 2010”.*
- S.2. *“Pemilihan pengurus pengelola ekowisata dilakukan melalui musyawarah di tingkat desa yang difasilitasi oleh PNPM LMP pada saat itu. Waktu itu orang-orang memilih saya mungkin karena faktor usia yang sudah tua, dan saya banyak aktif di kegiatan sosial dan pemerhati lingkungan. sehingga dianggap lebih berpengalaman. Namun untuk anggota tim diving semua para pemuda memiliki kemampuan khusus menyelam di laut”.*
- S.3. *“Semua pengurus kelompok di Bahoi ini baik DPL maupun ekowisata sebenarnya dipilih karena kekerabatan atau hubungan keluarga. Maksudnya baik Anggota kelompok DPL maupun ekowisata semua berkerabat dengan hukum tua. Meskipun secara formal semua pengurus kelompok diputuskan melalui forum musyawarah Desa”.*

Pertanyaan 1.e.

Bagaimana prosedur dan mekanisme penggantian anggota pengelola ekowisata, dan apakah hal tersebut pernah terjadi?

Jawaban:

- S.1 *“Selama ini belum pernah ada rapat khusus tentang penggantian pengurus ekowisata”.*

Lampiran 3

- S.2. *“Memang sampai dengan saat ini belum pernah ada pengurus yang diganti. Sebenarnya saya ini kan sudah tua (70 tahun), hanya tamatan SR (Sekolah Rakyat). Banyak warga yang lebih muda dan berpendidikan yang lebih pantas menjadi pengurus kelompok ekowisata ini. Sebenarnya sudah berkali-kali (lebih dari 50 kali mungkin...), setiap ada pertemuan saya mewacanakan penggantian pengurus, dan memberi kesempatan kepada mereka yang masih muda-muda< namun ternyata mereka tidak mau bersuara, mungkin mereka segan kepada para tetua desa. Mungkin juga mereka tidak mau menjadi pengurus dikarenakan ini kerja social yang tidak ada gaji atau honorinya... ha ha”.*

Pertanyaan 1.f.

Menurut saudara bagaimana kapasitas SDM kelompok pengelola ekowisata yang telah dibentuk? apakah SDM yang ada mempunyai kapasitas cukup untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan visi/misi / tujuan pengelolaan Ekowisata di Desa Bahoi?

Jawaban:

- S.1 *“Kapasitas SDM kami masih sangat kurang, terutama dalam hal manajemen homestay, handicraft, dan pengelolaan keuangan. Untuk guide selam mereka masih kurang kemampuan Bahasa Inggris, padahal kebanyakan wisatawan diving berasal dari manca Negara. Pelatihan diving yg dulu dilaksanakan tidak termasuk pelatihan Bahasa Inggris, hanya teknik diving saja”.*
- S.2 *“Kami menyadari bahwa kapasitas SDM pengelola ekowisata ini masih banyak kekurangan. Motivasi Anggota kelompok untuk mengurus ekowisata ini masih minim. Untuk tim diving memang mereka sudah mendapatkan sertifikat diving, namun masih kurang dalam ketrampilan guide, dan Bahasa Inggris. Selain itu kami tidak mengerti manajemen organisasi yang baik, kami kurang mengerti tentang pemasaran atau promosi yang baik. Promosi wisata kami terbatas hanya pada stand-stand pameran di Pemda”.*
- S.5 *“Memang secara khusus kami pengelola homestay ini belum pernah mendapatkan pelatihan khusus bagaimana cara mengelola homestay dan melayani tamu yang menginap dengan baik. Banyak pemilik homestay belum berani menerima tamu untuk menginap di homestay nya dikarenakan masih takut dan ragu-ragu karena tidak memiliki pengalaman menerima tamu selama ini. Pemilik homestay yang sudah cukup berpengalaman menerima tamu bermalam adalah Ibu Konstanti (S.8). Kebetulan ada sanak keluarganya yang bekerja di satu Resort di*

Lampiran 3

Bitung yang memberikan informasi bagaimana memberikan pelayanan kepada para tamu”.

- S.6 *“Ada yang masih kurang dari kami pemandu diving adalah sertifikat diving kami yang masih level basic diving. Banyak wisatawan yang meragukan kami karena mereka yang berwisata ke Bahoi banyak yang memiliki sertifikat diving level dive master, dan ini membuat kami merasa kurang percaya diri saat memandu mereka. Bahkan mereka memberitahukan kepada kami bahwa sebenarnya untuk menjadi pemandu selam seperti kami harus memiliki sertifikat level dive master. Selain itu kemampuan Bahasa Inggris kami yang minim juga menjadi kendala pada saat memandu turis asing. Kebanyakan yang menyelam ke Bahoi adalah turis asing dan kami tidak mampu berkomunikasi baik dengan mereka karena keterbatasan kemampuan Bahasa Inggris ini”.*

Pertanyaan 1.g.

Apakah aspek utama yang menjadi kendala dalam pengelolaan ekowisata di Desa Bahoi?

- S.1 *“Salah satu kendala utama yang kami alami adalah buruknya infrastruktur jalan ke Desa Bahoi. Namun bersyukur tahun ini Desa mendapat bantuan dari Kabupaten (Dinas PU) pengerasan jalan desa, meskipun belum diaspal (hotmix) tapi dirasakan sudah cukup banyak membantu. Buruknya infrastruktur jalan ini sering dikomplain oleh turis asing yang berkunjung ke Bahoi, bahkan seorang turis dari Ceko secara khusus berkelakar kepada saya untuk minta obat, dikarenakan sakit perut waktu menyelusuri jalan di Desa Bahoi karena kondisi yang sangat buruk dan penuh lubang. Kendala kedua adalah pengelolaan homestay. Selama ini baru ada satu yang dianggap cukup siap untuk melayani tamu, yaitu homestay milik Ibu Konstanti (S.8). Namun hal ini belum bisa diikuti oleh pemilik homestay yang lain”.*
- S.2. *“Untuk kendala infrastruktur jalan, bersyukur sekarang dari Bupati sudah membantu pengerasan jalan Desa, meskipun belum sampai diaspal. Disamping itu kemampuan SDM kami adalah juga merupakan kendala utama. Disamping teknik guide yang baik, kemampuan promosi/pemasaran adalah kendala yang selama ini kami rasakan masih sangat kurang”.*
- S. 6 *“Kami memiliki beberapa kendala antara lain beberapa peralatan diving yang sudah rusak, perahu motor yang rusak dan kendala belum memiliki sertifikat level dive master atau minimum rescue diving. Kerusakan beberapa peralatan selam sering mengakibatkan batalnya agenda penyelaman, sedangkan rusaknya perahu motor bantuan dari PNPM LMP*

Lampiran 3

menyebabkan kami harus menyewa perahu milik nelayan untuk melakukan penyelaman dengan wisatawan”.

- S.8 *“Kendala yang utama dari sisi pengelolaan homestay adalah masih minimnya ketrampilan kami dalam memberikan pelayanan yang baik bagi para tamu. Kebanyakan pemilik homestay mengeluhkan lingkungan rumah mereka yang sangat bising dengan kebiasaan warga desa memutar musik dengan volume yang tinggi/keras. Hal ini yang menyebabkan mereka tidak mampu melayani tamu dengan baik karena banyak keluhan dari para tamu yang menginap akibat kebisingan tersebut. Bersyukur tetangga-tetangga saya di sekitar sini sudah mengerti dan memahami hal tersebut sehingga ketika ada tamu yang menginap mereka mengecilkan volume musiknya sehingga tidak mengganggu para tamu yang menginap di homestay.”*

Jawaban :

Pertanyaan 1.h.

Khusus terkait dengan kendala kapasitas SDM pengelola ekowisata, langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan oleh pihak Pengelola ekowisata di Desa Bahoi? Bagaimana peran bantuan dan dukungan dari Pemerintah Desa, LSM, Pemda atau pihak lainnya? Apakah dukungan tersebut dirasa mencukupi atau masih jauh dari harapan?

Jawaban:

- S.1 *“Untuk homestay, dulu Ibu Konstanti pernah mendapat pengarahan dari pemilik resort yang ada di Bitung (Resort Batu Putih). Rencana di Bahoi akan dipersiapkan 10 rumah homestay. Meskipun yang saat ini siap baru 6 rumah. Sebenarnya yg dibutuhkan turis yang bermalam di homestay bukan kemewahan fasilitas, tapi mereka hanya membutuhkan kamar dan kamar mandi yang bersih dan rapi, juga makan yang khas lokal yang sehat. Nach, ketrampilan untuk memenuhi pelayanan yang diminta turis itulah yang diperlukan, dan saat ini kami belum mempunyai panduan untuk itu. Untuk pengembangan produksi dan promosi kerajinan pemerintah Desa Bahoi sudah minta dukungan Dinas Pariwisata dan Deperindag untuk membantu pengembangan usaha produksi kerajinan di Desa Bahoi. Untuk kegiatan Promosi , pencetakan brosur dsb kami difasilitasi oleh WCS. Juga bantuan pemberitaan ke Media masa: Metro TV, Trans TV, Kompas TV dan MNC TV yang pernah meliput ekowisata di Bahoi. Dengan pemberitaan media ini Bahoi lebih dikenal oleh orang dari luar negeri dibanding orang dari Manado sendiri”.*

Lampiran 3

S.2. *“Untuk tim Diving mereka pernah mendapat pelatihan dari Dragon net Diving Centre, di Malalayang (Manado), dan sudah mendapatkan sertifikat diving basic level Scuba School International. Kemudian mereka juga pernah mendapatkan pelatihan dari WCS tentang ekosistem terumbu karang, jenis-jenis ikan dan karang. Pihak Pemda juga sudah membantu perbaikan jalan desa, pembangunan dermaga, dan sarana pendukung lain seperti pondok wisata (gazebo)”*.

Pertanyaan 2.a.

Setelah mengetahui kondisi *existing* SDM kelompok pengelola ekowisata di Desa Bahoi, menurut pendapat anda bagaimana seharusnya organisasi SDM pengelola ekowisata di Bahoi apabila dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai?

Jawaban :

S.1 *“Untuk saat ini kegiatan ekowisata hanya melibatkan pengurus saja. Ke depan kegiatan ekowisata di Desa Bahoi harus mampu melibatkan seluruh Anggota masyarakat yang ada di Desa Bahoi. Terutama melalui usaha kerajinan dan kuliner seperti kondisi pariwisata di Bali. Jangan sampai ekowisata di Bahoi ini hanya pengurus homestay dan pemandu diving saja yang menikmati hasil kunjungan wisatawan, tapi seluruh masyarakat bisa menikmati hasil dari kegiatan ekowisata ini. Agar kelompok ekowisata ini bisa berkembang kami sudah merencanakan untuk memasukan kegiatan ini dalam unit usaha BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) agar seiring dengan semangat UU Desa tahun 2013”*.

Pertanyaan 2.b.

Kira-kira perlu penambahan personil apa atau pengurangan agar pengelolaan ekowisata di Desa Bahoi menjadi lebih ideal sehingga mampu mencapai visi dan misi/ tujuannya?

Jawaban :

S.1 *“Untuk saat ini kami belum memikirkan penambahan maupun pengurangan personil pengelola ekowisata. Pengurus yang ada dimaksimalkan dulu”*.

S.2. *“Kami sepenuhnya serahkan masalah ini kepada teman-teman LSM yang mendampingi kami di lapangan, karena mereka mengetahui lebih banyak masalah ini daripada kami warga masyarakat Desa”*.

Pertanyaan 2.c.

Lampiran 3

Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang ideal tersebut di atas bagaimana strategy pemenuhan kebutuhan personelnya? Apakah perlu direkrut personel dari luar Desa? Ataupun personel tetap dari Desa setempat dengan dilatih kapasitas tertentu ?

Jawaban :

- S.1 *“Sebaiknya pengurus ekowisata tetap berasal dari warga desa Baho sendiri sesuai dengan semangat program pemberdayaan masyarakat”.*
- S.2 *“Kalau diminta memilih ya kami memilih pengurus ekowisata ini dari kalangan warga sendiri, walaupun ada kekurangan di sana-sini maka kami siap untuk dilatih dan dibina baik oleh LSM maupun Pemerintah”.*

Pertanyaan 2.d.

Program pelatihan apa saja yang diperlukan oleh SDM kelompok pengelola ekowisata agar memiliki kompetensi dan kapasitas yang mencukupi untuk menjalankan misinya/ tujuannya?

Jawaban :

- S2. *“Kami perlu pelatihan bagaimana melayani tamu (manajemen homestay), program pemasaran, atau pelatihan manajemen lainnya. Untuk Diving juga perlu pelatihan lanjutan (tidak hanya pelatihan dasar). Sebenarnya banyak tamu asing yang akan bermalam di Desa, tapi kesiapan homestay di sini masih sangat kurang. Apabila semua siap, saya yakin industri kuliner akan tumbuh di masyarakat Desa. Hal lain yang diperlukan adalah produksi kerajinan. Bahan baku melimpah di desa (kelapa), namun jenis dan variasi produk kerajinan masih minim. Kalau produk kerajinan ini sudah mantap tinggal dipikirkan pemasarannya nanti.*

Pertanyaan 2.e.

Bagaimana strategi untuk melibatkan partisipasi instansi pendidikan atau pelatihan di luar kabupaten Minahasa Utara guna memenuhi kebutuhan SDM kelompok pengelola ekowisata tersebut agar mampu mencapai tujuan ?

Jawaban :

- S.2. *“Selama ini kami hanya tahu dibantu oleh teman-teman dari LSM yang selalu mendampingi kami di lapangan. Mereka yang biasanya memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan pelatihan yang kami rasakan perlu. Misalnya konservasi terumbu karang, pelatihan diving dan penyiapan SOP. Kalau Pemerintah Daerah (Dinas PU, KKP, Pariwisata) banyak membantu*

Lampiran 3

infrastruktur sarana pendukung, seperti jalan, jembatan, dermaga, rumah apung, pondok wisata”.

Pertanyaan 2.f.

Selain pelatihan-pelatihan secara formal, bagaimana bentuk bantuan teknis atau pendampingan LSM yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas SDM ideal bagi kelompok pengelola ekowisata di Desa Bahoi agar bisa mencapai visi dan misinya/tujuannya ?

Jawaban :

- S.1. *“Kami sangat perlu pendampingan dari LSM seperti yang telah dilakukan oleh WCS selama ini. Terkait dengan desain pengembangan ekowisata dan penguatan kelembagaan serta rencana pembentukan BUMDes hal ini sangat penting pendampingan tersebut. Draft pembentukan BUMDes sekarang sudah ada, persiapan disosialisasikan kepada masyarakat dan BPD (Badan Perwakilan Desa)”.*
- S.2. *“Keberadaan fasilitator pendamping dari PNPM dan WCS sangat kami rasakan manfaatnya. Kami tidak bisa membayangkan apabila dulu mereka tidak ada dan tidak mendampingi kami selama program berlangsung. Hampir semua permasalahan di Desa ini selalu kami mintakan nasihatnya kepada LSM”.*

Lampiran 3

- Tanggal** : 3 Oktober 2014
- Lokasi** : 1. Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara
2. Kampus Universitas Sam Ratulangi Manado
3. Kampus Politeknik Negeri Manado
- Informan** : 1. Kepala Seksi Pengawasan Dinas Pariwisata Minahasa Utara (Kode S.15)
2. Pakar/Dosen Ilmu Sumber Daya Perairan Unsrat Manado (Kode S.16)
3. Pakar/Ketua Program Studi Ekowisata Laut Politeknik Negeri Manado (Kode S.17)

Pertanyaan 2.a.

Setelah mengetahui kondisi *existing* SDM kelompok pengelola ekowisata di Desa Bahoi, menurut pendapat anda bagaimana seharusnya organisasi SDM pengelola ekowisata di Bahoi apabila dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai?

Jawaban :

- S.15 *“Untuk saat ini Pemerintah mempunyai program pengembangan DMO (Destination Management Organization). Ada 15 DMO yang digarap oleh pemerintah saat ini, 3 diantaranya adalah Wisata bahari, yaitu Bunaken, Raja Ampat dan Wakatobi. Program DMO dirancang dan diimplementasikan oleh Kemenparekraf untuk menyusun dan menyempurnakan sistem kelola destinasi wisata, agar lebih terstruktur dan sinergis yang mencakup fungsi koordinasi, perencanaan, implementasi dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistematis melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi dengan peran serta masyarakat, pelaku/asosiasi, industri, akademis dan pemerintah. Pengembangan destinasi ekowisata di Desa Bahoi bisa mengacu kepada pola pengembangan DMO yang telah dirancang oleh Kemenparekraf tersebut. Ekowisata adalah wisata minat khusus yang pengunjungnya tidak sebanyak destinasi wisata yang bersifal masal (mass tourism), sehingga pola pengembangannya akan berbeda pula”.*
- S.16 *“Ekowisata di Desa Bahoi ini adalah Ekowisata berbasis DPL yang dikelola dengan pola pemberdayaan masyarakat. Idealnya program yang berjalan harus mampu memberikan manfaat ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Desa. Namun memang hal ini tidak*

Lampiran 3

mudah untuk diimplementasikan di lapangan. Pertamakali yang perlu ditekankan kepada masyarakat adalah pentingnya menumbuhkan motivasi akan pentingnya keberadaan kawasan DPL dan ekowisata tersebut bagi keamanfaatan bersama. Seringkali apabila suatu program berhubungan dengan pendapatan (uang) maka akan menimbulkan konflik sosial di antara kelompok masyarakat yang ada di Desa, hal ini mungkin terjadi juga di Bahoi. Salah satu cara untuk meminimalisir hal tersebut adalah dengan melibatkan Tokoh setempat yang disegani dan dihormati semua pihak, dan Seorang Tokoh Adat atau Tokoh Agama (Pendeta) bisa menjadi alternatif pilihan yang terbaik. Apabila semua permasalahan dimusyawarahkan secara adat atau ditengahi Pendeta di Gereja biasanya permasalahan di Desa itu bisa cepat selesai”.

- S.17 *“Untuk mengelola ekowisata yang baik para pengurus atau kelompok harus mengetahui dan memahami pengetahuan dasar-dasar ekowisata, manajemen operasional ekowisata, pemanduan wisata diving dan manajemen dasar pelayanan hotel non bintang atau homestay. Tatakelola ekowisata yang berbasis masyarakat tentu saja berbeda dengan tata kelola pariwisata umum yang menggunakan standar hotel berbintang. Karena konsep pengelolaan ekowisata laut yang berbasis masyarakat seperti di Bahoi ini adalah konsep pariwisata minat khusus yang harus dikelola secara hati-hati dengan mempertimbangkan daya dukung ekologi lautnya serta kearifan lokal masyarakat Desa itu sendiri. Sehingga pengelolaannya harus dengan pendekatan konsercvasi namun bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat di Desa Bahoi”.*

Pertanyaan 2.b.

Kira-kira perlu penambahan personil apa atau pengurangan agar pengelolaan ekowisata di Desa Bahoi menjadi lebih ideal sehingga mampu mencapai visi dan misi/tujuannya?

Jawaban :

- S.15 *“Terpenting dalam pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat ini adalah adanya promosi yang tepat dan uang yang didapatkan harus dikelola dengan baik dan transparan bagi seluruh anggota kelompok. Namun demikian hendaknya sebelum melakukan promosi yang luas harus dipersiapkan terlebih dahulu infrastruktur pendukung ekowisata dan kesiapan SDM lainnya”.*
- S.16 *“Sebenarnya siapapun yang duduk sebagai pengurus DPL ataupun ekowisata asalkan program itu adalah murni partisipatif dari masyarakat maka pasti akan berhasil”.*

Lampiran 3

S.17 *“Apabila merujuk kepada pengelolaan ekowisata yang ideal tadi maka organisasi minimum yang harus ada adalah seorang ketua atau manajer yang mampu mengkoordinasikan seluruh kegiatan operasional ekowisata, dan masing-masing penanggungjawab operasional, yaitu keuangan, pemasaran, pelayanan homestay, dan pemandu wisata”.*

Pertanyaan 2.c.

Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang ideal tersebut di atas bagaimana strategi pemenuhan kebutuhan personelnnya? Apakah perlu direkrut personel dari luar Desa? Ataukah personel tetap dari Desa setempat dengan dilatih kapasitas tertentu ?

Jawaban :

S.15 *“Kami dari pemerintah biasanya bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan LSM untuk memberikan materi pelatihan-pelatihan tentang pariwisata, seperti halnya kami lakukan pada program DMO”.*

S.16 *“Semua program pemberdayaan masyarakat yang partisipatif akan berhasil apabila ada pendampingan yang intensif di lapangan oleh LSM. Kunci utama keberhasilan dari program ekowisata ini adalah membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi laut yang bisa dikelola sebagai ekowisata dan mendatangkan manfaat secara ekonomi, dan peran LSM adalah untuk menumbuhkan motivasi tersebut. Menurut saya karena ini program pemberdayaan masyarakat maka anggota kelompok pengelola harus mutlak dari Desa itu sendiri, namun tetap harus didampingi oleh LSM di lapangan. Sedangkan kami perguruan tinggi bisa membantu memfasilitasi dalam hal kemampuan teknis, seperti survey potensi, monitoring dan evaluasi daya dukung laut tersebut untuk kegiatan ekowisata dari sisi kompetensi ilmu sumber daya perairan yang kami miliki. Dana kami untuk terjun langsung ke lapangan seperti Bahoi ini sangat terbatas, yaitu dari pos pengabdian masyarakat yang itu jumlahnya sangat kecil”.*

S.17 *“Tentu saja kalau ini ekowisata yang berbasis masyarakat maka prioritas komposisi personil disesuaikan dengan kebutuhannya dan sebaiknya diambil dari warga desa setempat”.*

Pertanyaan 2.d.

Program pelatihan apa saja yang diperlukan oleh SDM kelompok pengelola ekowisata agar memiliki kompetensi dan kapasitas yang mencukupi untuk menjalankan misinya/ tujuannya?

Lampiran 3

Jawaban :

- S.15 *“Ekowisata adalah jenis wisata minat khusus yang pengunjungnya memang juga khusus. Kalau Bahoi ini pengunjung yang banyak adalah turis yang hobi diving dan para peneliti terumbu karang. Dengan demikian pelatihan yang diperlukan adalah manajemen pariwisata yang sesuai dengan sifat pengunjungnya tersebut, misalnya bagaimana mengelola homestay dengan baik dan bagaimana memandu para pengunjung yang datang dengan baik, dalam hal ini diving. Untuk Pemasaran Dinas Pariwisata bisa membantu dengan menyediakan stand promosi wisata bagi kelompok pengelola Desa Bahoi apabila akan mempromosikan destinasi ekowisata dan produk kerajinan. Promosi wisata ini biasanya dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata pusat maupun Provinsi Sulawesi Utara”.*
- S.16 *“Pelatihan yang paling utama bagi semua program pemberdayaan masyarakat adalah pelatihan motivasi, ini sangat penting agar masyarakat menyadari akan pentingnya program konservasi laut atau DPL, dan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Tanpa motivasi kuat yang timbul dari masyarakat sendiri maka program akan sulit berhasil”.*
- S.17 *“Untuk mengelola suatu destinasi wisata seperti ekowisata bahari di Desa Bahoi ini maka minimum kelompok pengelola harus mendapatkan pelatihan dasar ekowisata (pariwisata). Kemudian pelatihan yang mendukung operasional ekowisata itu sendiri, antara lain: manajemen dasar perhotelan atau homestay, keuangan dan promosi wisata atau pemasaran. Pelatihan yang juga merupakan keharusan bagi ekowisata bahari adalah pelatihan untuk pemandu wisata khususnya diving. Khusus untuk pemandu diving mereka harus memiliki sertifikat Diving level Dive Master untuk standar SSI (Scuba School International), atau level Dive 4 di Politeknik Negeri Manado”.*

Pertanyaan 2.e.

Bagaimana strategi untuk melibatkan partisipasi instansi pendidikan atau pelatihan di luar kabupaten Minahasa Utara guna memenuhi kebutuhan SDM kelompok pengelola ekowisata tersebut agar mampu mencapai tujuan ?

Jawaban :

- S.15 *“Untuk Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Bahoi sudah dimasukkan dalam Rencana Induk Strategis Pariwisata Daerah. Memang untuk pelatihan-pelatihan SDM pengelolanya kami belum memberikan bantuan*

Lampiran 3

kepada Desa Bahoi. Hal yang sudah dilakukan untuk pengembangan ekowisata di Bahoi adalah bantuan sarana pendukung, seperti Gazebo lokasi pengembangan Pasir Putih. Kemudian diikuti dengan pembangunan jembatan untuk menyambung akses dari Desa menuju Pasir Putih. Apabila memang ada usulan dari Pemerintah Desa Bahoi untuk dibantu pelatihan-pelatihan maka kami akan siapkan anggaran untuk bisa direalisasikan tahun 2015 mendatang. Pelatihan yang dapat kami berikan adalah pola pengembangan DMO lokal. Dalam pelatihan tersebut kami bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan LSM dengan dukungan pendanaan dari APBN dan APBD. ”

- S.16 “Universitas Sam Ratulangi Fakultas Kelautan dan Perikanan biasanya menjalin kerjasama dengan Pemerintah dan LSM dalam beberapa program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Sulawesi Utara ini. Seperti halnya pada proyek CMRP tahun 200-2002 lalu dengan Bappenas (Proyek Pesisir) kami diminta untuk memberikan pelatihan survey potensi, monitoring terumbu karang dan konservasi DPL berbasis masyarakat. Untuk program dari universitas sendiri kami sangat terbatas dananya sehingga hanya ada pos pada penelitian dan pengabdian masyarakat, namun itu jumlahnya sangat terbatas ”.
- S.17 “Politeknik Negeri Manado siap memberikan kursus dan pelatihan yang diperlukan bagi peningkatan kapasitas SDM pengelola ekowisata seperti di Desa Bahoi ini. Kami memiliki program studi Majamen Pariwisata yang mampu memberikan penguatan kapasitas dalam manajemen hospitality, tata boga, standar pelayanan hotel berbintang dan non bintang (kelas melati/homestay), pelatihan guide atau pemandu wisata. Kami juga memiliki program studi ekowisata laut yang bisa menyediakan pelatihan diving hingga level dive master (dive 4) maupun level instructor (dive 5). Pelatihan diving Politeknik Negeri Manado bermitra dengan SSI (Scuba School International) sehingga sertifikatnya diakui secara internasional”.

Pertanyaan 2.f.

Selain pelatihan-pelatihan secara formal, bagaimana bentuk bantuan teknis atau pendampingan LSM yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas SDM ideal bagi kelompok pengelola ekowisata di Desa Bahoi agar bisa mencapai visi dan misinya/tujuannya ?

Jawaban :

- S.15 “Memang keberadaan LSM sebagai pendamping masyarakat di lapangan adalah hal yang masih sangat dibutuhkan. Pendekatan yang dilakukan oleh LSM biasanya lebih mengena di lapangan. Pemerintah akan mendukung

Lampiran 3

kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang memang muncul dari partisipasi masyarakat sendiri dibantu oleh LSM”.

- S.16 *“Tidak bisa dipungkiri bahwa peran LSM sangat sentral dalam program pemberdayaan masyarakat, seperti halnya ekowisata di Bahoi ini. Tanpa peran dari LSM kami yakin program pemberdayaan yang berbasis proyek tidak akan bertahan lama”.*
- S.17 *“Peran langsung lembaga pendidikan seperti kami untuk terjun langsung pada program berbasis masyarakat sangat terbatas, hanya pada program Bakti Sosial saja. Namun demikian hal itu sangat kecil dan tentu saja tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Untuk itu peran LSM sangat diperlukan untuk memenuhi gap tersebut. LSM juga lebih fleksibel dalam peranannya sebagai fasilitator masyarakat di lapangan dan biasanya memiliki jaringan akses pendanaan yang memadai”.*

Universitas Terbuka

SALINAN HASIL FGD

ANALISIS KEBUTUHAN SDM PENGELOLA EKOWISATA BERBASIS MASYARAKAT (STUDI KASUS DI DESA BAHOI, KECAMATAN LIKUPANG BARAT, KABUPATEN MINAHASA UTARA)

FGD I

Tanggal : 29 September 2014

Lokasi : Kantor WCS Manado

Informan : 1. Program Manager WCS Sulawesi Utara (Kode S.10)
2. Fasilitator Program WCS, Manado (Kode S.11)
4. Program Manager LSM YAPEKA Bogor (Kode S.13)
5. Direktur LSM CELEBIO, Manado (Kode S.14)

1.a. Proses pembentukan kelompok pengelola ekowisata di Desa Bahoi, Dokumen pendukungnya: SK Kepala Desa atau Perdes.

“Kegiatan ekowisata di desa Bahoi dimulai pada tahun 2010 sejak masuk program PNPM LMP dan ada pendampingan dari WCS. Sebenarnya kalau program DPL sudah ada program sebelumnya yaitu ketika ada proyek CMRP (proyek pesisir) tahun 2000-an, namun tidak berbekas lagi alias mati suri. Sejak 2010 ada PNPM LMP itulah DPL dihidupkan kembali dan hingga sekarang masih berlanjut. Pembentukan kelompok DPL maupun ekowisata ini telah dikuatkan dengan Perdes dan SK Hukum Tua (kepala desa). Namun implementasinya sangat tergantung dari “Hukum Tua” (Kepala Desa). Secara resmi struktur dan komposisi pengurus yang ada sekarang adalah hasil perdes dan SK tahun 2010. (S.10)

Tahun 2010 pada saat PNPM LMP masuk di Desa Bahoi dibentuk 2 kelompok sekaligus dengan SK pembentukan kelompok yang terpisah. Kelompok DPL dibentuk dengan SK sendiri dan Kelompok ekowisata juga SK dibentuk dengan tersendiri. Ketua kelompok DPL adalah Pak Maxi dan Ekowisata Opa(Hans Lahamendu). (S.13)

Untuk SK dan Perdesnya ada di Kantor Desa dan nanti bisa dilihat detailnya di lapangan sana. (S.14)

1b. Tujuan dibentuknya kelompok pengelola ekowisata di Desa Bahoi, AD/ART, SOP , dll.

“Tujuan pokok dari ekowisata di Desa Bahoi adalah memanfaatkan kawasan DPL dan sumber daya alam lainnya untuk kesejahteraan kelompok masyarakat. Dokumen yang ada sekarang adalah SK pembentukan kelompok dan Perdes untuk pengelolaan DPL dan Ekowisata. Tapi implementasi kegiatan 2 kelompok tersebut belum terkoordinasi dengan

Lampiran 4

baik. Kelompok pengelola DPL jalan sendirisementara kelompok juga ekowisata jalan sendiri, karena belum ada SOP yang jelas. Perdes yang ada belum diimplementasikan dengan baik”. (S.10)

1.c. Komposisi personil dan organisasi kelompok pengelola ekowisata di Desa

“Tahun 2010 dibentuk 2 kelompok sekaligus dengan SK pembentukan kelompok yang terpisah. Kelompok DPL SK sendiri dan Kelompok ekowisata juga SK sendiri. DPL ketuanya Pak Maxi dan Ekowisata ketuanya Opa (Hans L.). Masing-masing kelompok ada anggota-anggota yang tercantum dalam SK pembentukan tahun 2010. Sebenarnya SK akan diperbaharui tahun ini dengan beberapa anggota pengurus yg tidak aktif lagi akan diganti. Namun hal ini nanti sangat tergantung dari kepala desanya”. (S.10)

“Masing-masing kelompok ada bidang-bidangnya. Untuk ekowisata selain ketua, bendahara dan sekretaris ada anggota yang menangani diving”. (S.14)

“Struktur kepengurusan bisa detail dilihat di dokumen SK dan Perdes di kantor Desa, yang jelas struktur terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa Anggota, yang jumlahnya sekitar 10 orang”. (S.11)

1.d. Prosedur dan tatacara pemilihan personel kelompok pengelola ekowisata, persyaratan khusus/tertentu untuk menjadi ketua/anggota/pengurus kelompok ekowisata di Desa Bahoi

“Khusus untuk tim diving dipilih berdasarkan kemampuan teknis berenang dan menyelam di laut, kalau pengurus lainnya kayaknya karena faktor kedekatan dengan hukum tua saja. Faktor Kepala Desa sangat dominan dalam menentukan susunan kepengurusan, meskipun keputusan dilakukan melalui musyawarah desa”. (S.10)

1.e. Prosedur dan mekanisme penggantian anggota pengelola ekowisata

“Kayaknya pengurus ekowisata maupun DPL di Bahoi pernah ganti, masih sesuai dengan SK tahun 2010. Dasar resmi kepengurusan ekowisata masih seperti pada saat dibentuk tahun 2010 dan belum ada pergantian. Karena dahulu pengurus dipilih melalui musyawarah desa maka seharusnya pergantian juga dengan melalui musayawah desa. Namun untuk lebih baik sebelum diganti kepengurusan sebaiknya dimusyawarahkan dulu dengan tokoh adat dan tokoh agama di Desa untuk menghindari konflik antar anggota masyarakat. Tokoh agama dan adat dianggap bisa menjadi penengah bagi warga desa dan biasanya bersikap netral”. (S.10 & S.13).

1.f. Kapasitas SDM kelompok pengelola ekowisata saat ini.

“Kayaknya hanya tim diving yang punya kapasitas cukup dalam arti teknis. Kalau pengurus lainnya kapasitas SDM nya masih sangat kurang. Penguatan kelembagaan masih sangat kurang. Kapasitas SDM ini menjadi titik lemah dari pengelolaan ekowisata di Bahoi. Kalau bagaimana melindungi terumbu karang mereka sudah mahir, namun bagaimana menjalankan organisasi dengan baik mereka masih sangat lemah dan perlu penguatan. Penguatan SDM inilah yang dulu tidak kami sentuh dan sekarang terasa sangat penting akibat banyak terjadi konflik sosial antar kelompok senagai akibat lemahnya manajemen koordinasi dan pengelolaan antar kegiatan: DPL, ekowisata, homestay, handicraft”. (S.10)

1.g. Aspek kendala utama dalam pengelolaan ekowisata di Desa Bahoi

“Kita dulu terlalu konsentrasi pendampingan-pendampingan yang bersifat teknis dan fisik, seperti membuat batas-batas DPL, pelatihan ekosistem terumbu karang dsb, ternyata masalah utamanya ada di non teknis, yaitu masalah SDM, sehingga terjadi konflik sosial antar kelompok di Desa Bahoi, yang itu terlambat kita antisipasi. Masalah koordinasi belum juga terselesaikan hingga sekarang antara kelompok DPL dan ekowisata. Kapasitas SDM yang dirasa cukup hanya tim diving (pemandu selam) karena memang perlu keahlian khusus dan telah menjalani pelatihan diving meskipun tingkatnya masih basic diving. Selain itu masalah administrasi juga masih sangat kurang. Sebenarnya banyak kunjungan wisatawan yang ke Bahoi pada setiap minggu/ akhir pekan sekitar 30 orang, Mereka biasanya datang untuk memancing di kawasan sekitar DPL. Namun kunjungan ini tidak terdokumentasi dengan baik pada buku tamu, dikarenakan mereka tidak menginap di homestay. Ini juga merupakan salah satu kelemahan administrasi kelompok ekowisata/ DPL di Bahoi. Jadi kendala utama dalam pengelolaan ekowisata di Bahoi ini memang adalah kapasitas SDM”. (S.10)

1.h. Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala SDM

“Sebenarnya yang telah kami lakukan sudah cukup banyak (LSM), ada pelatihan alternatif livelihood untuk mencegah mereka mengambil ikan di laut di wilayah DPL dan terumbu karang. Pelatihan monitoring terumbu karang, pelatihan diving, pelatihan guide, homestay, handicraft, dsb. Tapi pelatihan manajemen untuk meningkatkan kapasitas SDM memang masih sangat kurang kami lakukan. Akibatnya masing-masing kelompok tersebut berjalan sendiri-sendiri. Sekarang kami sedang menggodok SOP yang mengatur koordinasi antar kelompok tersebut supaya tidak jalan

sendiri-sendiri, tapi masih belum selesai. Rencananya SOP ini nanti akan dimusyawarahkan dulu dengan kelompok dan Kepala Desa di Bahoi”. (S.10)

2.a. Bagaimana sistem pengelolaan ekowisata di Desa Bahoi yang ideal

“Untuk tata kelola DPL dan ekowisata di Bahoi ini perlu dibuatkan system yang lebih mantap, semacam SOP, jadi kalau Kepala Desa berganti pengelolaan DPL dan ekowisata tetap jalan, tidak tergantung siapa hukum tuanya. Program ini harus dimasukkan dalam kegiatan regular pemerintah desa, misalnya masuk dalam RPJMDes, jadi walaupun program bantuan sudah tidak ada lagi kegiatan DPL dan ekowisata masih tetap jalan secara mandiri oleh masyarakat dan Desa. Idealnya pengelolaan DPL dan ekowisata di Desa Bahoi dikelola menjadi satu wadah bersama, sehingga tidak ada kecurigaan satu dengan lainnya, serta mengurangi konflik sosial yang selama ini terjadi antara kelompok pengelola DPL dengan kelompok pengelola ekowisata. Keterlibatan Instansi yang diperlukan adalah pembinaan dari DKP (Kelautan & Perikanan) dan Dinas Pariwisata”. (S.10)

2.b. Perubahan kepengurusan kelompok ekowisata

“Sebelum merombak kepengurusan sebaiknya dipersiapkan terlebih dulu SOP atau sistem pengelolaannya. Perubahan personil dimusyawarahkan dengan tokoh adat dan tokoh agama di Desa. Hukum Tua sebaiknya hanya berfungsi sebagai pembina dan penasehat saja. Karena biasanya tokoh adat atau tokoh agama lebih netral dan bisa diterima semua pihak”. (S.10 & S.13)

2.c. Strategy pemenuhan kebutuhan SDM yang ideal

“Karena program ini adalah program pemberdayaan masyarakat maka harus masyarakat di desa itu sendiri yang mengelola. Tidak perlu mengambil pengurus dari luar desa. Hanya memang perlu penguatan-penguatan dan peningkatan kapasitas terutama SDM dalam hal manajemen organisasi supaya meminimalisir konflik antar kelompok masyarakat”. (S.10 & S.13).

2.d. Program pelatihan yang diperlukan kelompok pengelola ekowisata selanjutnya.

“Karena yang dianggap titik lemah adalah kapasitas SDM dalam manajemen pengelolaan/organisasi maka pelatihan manajemen yang paling diperlukan, baik leadership, keuangan, tim work, manajemen homestay dan

pemasaran handicraft. Mungkin diperlukan juga pelatihan diving lanjutan/advanced". (S.10)

2.e. Strategi untuk melibatkan partisipasi instansi pendidikan atau pelatihan setempat dalam pemenuhan kebutuhan SDM

"Di Manado ini ada sekolah politeknik yang mampu menyediakan paket-paket kursus dan pelatihan yang dibutuhkan untuk peningkatan kapasitas SDM pengelola ekowisata di Bahoi. Yang paling utama manajemen organisasi dan manajemen perhotelan/homestay. Mereka punya jurusan ekowisata bawah laut yang sangat cocok untuk program pelatihan ekowisata Desa Bahoi. Untuk lebih jelasnya nanti kita wawancara Ketua Program Studinya langsung". (S.10)

2.f. Perlunya pendampingan LSM

"LSM masih diperlukan untuk pendampingan di lapangan. Masyarakat di Desa Bahoi ini selama ini masih sangat tergantung dari program-program bantuan yang diberikan oleh pihak luar, baik LSM maupun pemerintah. Mereka sangat merasakan manfaat dari pendampingan ini, terbukti sekarang Bahoi dikenal dengan ekowisata dan DPL nya bahkan dikenal hingga ke manca negara dikarenakan langkah-langkah dari pendampingan LSM dan PNPM LMP yang selama ini membantu mereka. Melalui jaringan internet bahkan Desa Bahoi saat ini makin dikenal, banyak wartawan yang sudah berkunjung ke Bahoi dengan bantuan fasilitasi dari jaringan LSM". (S.10 & s.13).

Lampiran 4

FGD II

- Tanggal** : 2 Oktober 2014
- Lokasi** : Kantor Desa Bahoi, Kec. Likupang Barat, Kab. Minahasa Utara
- Peserta** : 1. Kepala Desa Bahoi (Kode S.1)
2. Ketua Kelompok Ekowisata (Kode S.2)
3. Ketua Kelompok DPL (Kode S.3)
4. Sekretaris Kelompok Ekowisata (Kode S.4)
5. Anggota Pemandu Wisata (Kode S.6)
6. Anggota Pemandu Wisata (Kode S.7)

1.a. Proses pembentukan kelompok pengelola ekowisata di Desa Bahoi, Dokumen pendukungnya: SK Kepala Desa atau Perdes.

“Kelompok ekowisata di desa Bahoi ada sejak tahun 2010, pada saat masuk program PNPM LMP. Waktu itu pendampingnya ada fasilitator dari PNPM LMP dan fasilitator dari LSM (WCS). Kelompok ekowisata dibentuk dari kelanjutan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) kegiatan PNPM LMP yang ada di desa Bahoi. Jadi pengurus ketua, sekretaris dan bendahara semua ada sekarang adalah mantan pengurus TPK tahun 2009 untuk kegiatan PNPM LMP. Pembentukan kelompok DPL maupun ekowisata ini telah dikuatkan dengan Perdes dan SK Hukum Tua (Kepala Desa) pada tahun 2010. Tahun 2010 pada saat PNPM LMP dibentuk 2 kelompok sekaligus dengan SK pembentukan kelompok terpisah. Kelompok DPL dengan SK sendiri dan Kelompok ekowisata juga dengan SK sendiri sedangkan Aturan pengelolaannya ada pada Perdes tahun 2010”. (S.1, S.2, S3).

1b. Tujuan dibentuknya kelompok pengelola ekowisata di Desa Bahoi, AD/ART, SOP, dll.

“SOP khusus memang belum ada, menurut Pak Sony (WCS) SOP sedang dipersiapkan. Namun saat ini aturan secara umum sudah ada dan tercantum dalam SK dan Perdes yang telah dibuat pada tahun 2010. Tujuan pokok dari ekowisata di Desa Bahoi adalah memanfaatkan kawasan DPL dan sumber daya alam lainnya untuk menambah pendapatan masyarakat desa”. (S.1, S2 dan S.3)

1.c. Komposisi personil dan organisasi kelompok pengelola ekowisata

“Menurut SK tahun 2010 dan hingga sekarang masih sama seperti dul, Ketuanya adalah Opa (Hans L), Bendahara adalah Ibu Jomilke, dan sekretaris adalah Carles Sahudege. Mereka adalah pengurus TPK PNPM LMP sebelumnya, jadi tinggal meneruskan saja supaya praktis dan mereka yang telah berpengalaman mengurus kegiatan bantuan program di Desa”. (S.1).

Lampiran 4

“Kebetulan ketua saya (Hans) dan memang belum pernah diganti, padahal saya sudah tua dan sebaiknya diganti dengan pengurus yang lebih muda. Tapi ternyata yang lebih muda tidak berani jadi ketua, jadi terpaksa saya masih mengurus ini. Mereka yang muda-muda saat ini menjadi anggota penyelam/ diving”. (S.2).

1.d. Prosedur dan tatacara pemilihan personel kelompok pengelola ekowisata, persyaratan khusus/tertentu untuk menjadi ketua/anggota/pengurus kelompok ekowisata di Desa Bahoi

“Pengurus dulu dipilih dari kesepakatan musyawarah desa. Opa (Hans L.) dipilih karena memang tokoh yang dituakan di Desa. Khusus untuk tim diving memang dipilih yang masih muda dan bisa berenang/ menyelam di laut”. (S.1., S.2 dan S.3).

1.e. Prosedur dan mekanisme penggantian anggota pengelola ekowisata

“Dari mulai dibentuk tahun 2010 hingga sekarang pengurus belum pernah diganti. Karena dahulu pengurus dipilih melalui musyawarah desa maka pergantian juga dengan musyawarah desa. Prakteknya sih tergantung Kepala Desa”. (S.2 dan S.3).

1.f. Kapasitas SDM kelompok pengelola ekowisata saat ini.

“Kalau bagaimana cara melindungi DPL kelompok sudah siap dan paham, yang masih lemah di kami adalah manajemen bagaimana mengelola home stay dengan baik, membuat dan memasarkan produk kerajinan, mempromosikan/ memasarkan wisata”. (S.1, S.2, S.3).

“Selain itu untuk diving yang kurang adalah sertifikat rescue atau dive master. Karena pemandu guide yang ada hanya punya sertifikat basic diving. Padahal wisatawan yang dipandu banyak yang punya sertifikat dive master. Jadi sertifikat diving kami perlu ditingkatkan lagi. Kemampuan Bahasa Inggris juga penting, karena kami tidak bisa ngomong langsung dengan para turus asing saat memandu mereka, sehingga harus dibantu penterjemah dari WCS. Kalau bisa Bahasa Inggris tentu lebih afdol”. (S.6 dan S.7).

1.g. Aspek kendala utama dalam pengelolaan ekowisata di Desa Bahoi

“Kendala utama saat ini adalah infrastruktur jalan yang belum mulus di Desa Bahoi. Banyak turis yang berkunjung mengeluh kepada kami tentang buruknya kondisi jalan di Bahoi”. (S.1 dan S.2)

“Kendala perahu motor yang rusak juga mengganggu kegiatan ekowisata. Biaya perbaikan mahal menjadi kendala tersendiri. Sehingga kami harus

menyewa perahu dari nelayan yang tentu saja itu menjadi pengeluaran tambahn operasional. Selain itu beberapa peralatan selam seperti compressor ada yang rusak karena minimnya perawatan. Kendala kemampuan teknis dan biaya pemeliharaan menjadi kendala kami selama ini” (S.6 dan S.7).

“Ada dua kelompok yang mengelola laut di Bahoi DPL dan ekowisata belum terkoordinasi dengan baik, alias masih jalan sendiri-sendiri. Tidak ada koordinasi ini menjadi benih kecurigaan antara kelompok DPL dan Ekowisata. DPL hanya disuruh menjaga kawasan laut dari pencurian ikan dan pengrusakan terumbu karang tapi tidak pernah mendapat manfaat langsung dari kegiatan kunjungan turis. Yang paling menikmati adalah pengelola homestay dan pemandu selam karena langsung menerima pembayaran dari turis secara langsung”. (S.3).

1.h. Langkah-langh yang telah dilakukan oleh untuk mengatasi kendala SDM

“Kepala Desa sudah minta bantuan ke Pemda untuk perbaikan jalan, akhir tahun ini akan diluncurkan anggaran dari kabupaten. Kemudian untuk promosi wisata dan kerajinan Kepala Desa sudah minta bantuan ke Dinas Pariwisata dan Dinas Perindustrian Kabupaten Minahasa Utara. (S.1)

“Untuk kekurangan kapasitas SDM lainnya kami selama ini langsung minta bantuan dari LSM (WCS, YAPEKA & CELEBIO)”. (S.2 dan S.3)

2.a. Bagaimana sistem pengelolaa ekowisata di Desa Bahoi yang ideal

“Memang disadari bahwa selama ini ekowisata belum mampu memberikan kontribusi banyak kepada masyarkat desa. Idealnya memang semua kawasan pesisir baik laut, hutan mangrove maupun pantai dikelola secara terpadu oleh satu tim atau kelompok saja. Namun bentuk kelompok itu seperti apa kami masih belum tahu”. (S.1, S.2,)

“Sebaiknya baik DPL maupun ekowisata dikelola secara bersama karena memanfaatkan potensi alam yang sama di Desa Bahoi. Semua pendapatan yang masuk baik dari kunjungan turis maupun denda pelanggaran DPL masuk ke Kas Desa dan dipergunakan bersama untuk kesejahteraan masyarakat desa”. (S.3).

2.b. Perubahan kepengurusan kelompok ekowisata

“Untuk sementara ini pengelolaan ekowisata akan dijalankan dengan pengurus yang ada, sambil menunggu saran dari WCS kalau SOP sudah jadi”. (S.1)

Lampiran 4

2.c. Strategi pemenuhan kebutuhan SDM yang ideal bagi ekowisata

“Menyerahkan sepenuhnya peningkatan kapasitas SDM pengelola kepada LSM yang mendampingi”. (S.1, S.2, S.3).

2.d. Program pelatihan yang diperlukan kelompok pengelola ekowisata selanjutnya.

“Kami memerlukan pelatihan manajemen homestay supaya bisa melayani tamu lebih baik lagi. Selain itu juga diperlukan pelatihan produksi handicraft dan dibantu promosinya” (S.1 & S.2).

“Kami juga memerlukan pelatihan diving lanjutan dan kursus Bahasa Inggris untuk memperlancar tugas sebagai pemandu diving”. (S.6 & S.7).

2.f. Perlunya pendampingan LSM

“Pendampingan LSM masih sangat diperlukan. Selama ini masyarakat sangat merasakan manfaat pendampingan program dari LSM baik WCS, YAPEKA maupun CELEBIO”. (S.1, S.2, & S3).

Universitas Terbuka

Lampiran 5

Daftar Informan dan Narasumber Penelitian

No.	Kode Informan	Nama Lengkap	Instansi	Jabatan/Posisi
1	S.1	Daud Dalero	Pemerintah Desa Bahoi	Kepala Desa
2	S.2	Hans Lahamendu	Kelompok Pengelola Ekowisata Desa Bahoi	Ketua
3	S.3	Maxi Lahading	Kelompok Pengelola Pesisir Desa / DPL Desa Bahoi	Ketua
4	S.4	Carles Sahudege	Kelompok Pengelola Ekowisata Desa Bahoi	Sekretaris
5	S.5	Jomilke Corneles	Kelompok Pengelola Ekowisata Desa Bahoi	Bendahara/ Pemilik <i>Home Stay</i>
6	S.6	Jatin Hengkengbala	Kelompok Pengelola Ekowisata Desa Bahoi	Anggota/Pemandu wisata selama
7	S.7	Johanis D. Hontong	Kelompok Pengelola Ekowisata Desa Bahoi	Anggota/Pemandu wisata selama
8	S.8	Konstansi Mancari	Warga Desa Bahoi	Pemilik Home Stay
9	S.9	Ny. Salmon	Warga Desa Bahoi	Pengrajin <i>handycraft</i>
10	S.10	Ir. Sony Tasidjawa, M.Si	WCS	LSM pendamping
11	S.11	Ir. Hendrik	WCS	LSM pendamping
12	S.12	Ir. Susanti Loho	YAPEKA	LSM pendamping
13	S.13	Ir. Agustinus Wijayanto	YAPEKA	LSM pendamping
14	S.14.	Ir. Marthin Makarunggawa	CELEBIO	LSM pendamping
15	S.15	Ferdy Tulong	Dinas Pariwisata Kab.Minahasa Utara	Kepala Seksi Pengawasan
16	S.16	Dr.Ary Mokodompis, M.Sc	Universitas Sam Ratulangi	Staf Pengajar Manajemen Sumberdaya Perairan
17	S.17	Dr. Jusak Pahlano Daud, M.Sc	Politeknik Negeri Manado	Ketua Program Studi Ekowisata Laut